KEKUASAAN, KEBEBASAN DAN KEADILAN DALAM PANDANGAN POLITIK ‘ALĪ BIN ABĪ ṬĀLIB: TELAAH SURAT ‘ALĪ BIN ABĪ ṬĀLIB KEPADA MĀLIK AL-ASHTAR

Oleh:

AS Irfani Thahirah Hidayah Al-Aidid

(20.11.1.212.003)

Pembimbing:

Dr. Umar Shahab, MA

Tesis diajukan kepada STAI Sadra sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama dalam Aqidah dan Filsafat Islam

PROGRAM STUDI MAGISTER AQIDAH &

FILSAFAT ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SADRA

JAKARTA

2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "KEKUASAAN, KEBEBASAN DAN KEADILAN DALAM PANDANGAN POLITIK ʻALĪ BIN ABĪ ṬĀLIB: TELAAH SURAT ʻALĪ BIN ABĪ ṬĀLIB KEPADA MĀLIK AL-ASHTAR" peneliti menyadari bahwa keberhasilan penyusunan tesis ini tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan tesis dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini.

Penulisan tesis ini dilakukan untuk memperoleh gelar memperoleh gelar Magister Agama dalam Aqidah dan Filsafat Islam pada STAI Sadra. Penghormatan yang tulus penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini dari proses awal hingga akhir. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hossein Mottaghi selaku Ketua Yayasan Hikmat Al-Mustafa, yang senantiasa memberikan nasihat dan bimbingan serta berbagai macam dukungan selama penulis menempuh pendidikan di STAI Sadra.
2. Bapak Dr. Kholid Al-Walid selaku Rektor dan ketua STAI Sadra periode 2014-2024 atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di STAI Sadra.
3. Bapak Dr. Otong Sulaiman selaku Rektor dan ketua STAI Sadra periode 2024-2028 atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan untuk penulis bisa menyelesaikan tulisan ini.
4. Bapak Dr. Umar Shahab, MA selaku dosen pembimbing yang telah berperan besar dalam penulisan tesis ini, banyak ilmu, masukan, ide, saran, waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing serta mengerahkan penulis selama masa studi, penelitian, maupun penyusunan tesis ini.
5. Kepada keluarga tercinta, Mamah, Abah, Kak Sumayya, Kak Faizana, Ali, Zainal dan Mustafa yang dengan luar biasa mendukung semua perjalanan saya dari awal pendidikan S1 saya di Iran dan S2 saya, tidak lelah dan henti untuk terus mendoakan, memberikan dukungan, nasihat dan semangat sehingga mereka menjadi alasan utama bagi penulis untuk selalu memberikan yang terbaik selama mengenyam pendidikan. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan kasih sayang-Nya kepada mereka.
6. Seluruh dosen dan staf pendidik STAI Sadra yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan serta dukungan selama masa perkuliahan di STAI Sadra.

7. Sahabat-sahabat terdekat (Sena, Zehra dan Fatime) dan juga teman-teman terbaik di kantor (Annisa, Rahma, dan Laras), teman satu angkatan yang menjadi sumber inspirasi dan dukungan saya (Mba Widya, Mba Eka, Mas Dhuha), atasan yang selalu memberikan semangat dan dukungan moral dalam menyelesaikan tesis ini (Pak Firman, Pak Mahdawi dan Bu Lingga) dan teman-teman terdekat saya dalam kegiatan sosial dan olahraga (Awan, Ibay, Anto, Leon, Ido, Muhammad, Stefani, Mariska dan lainnya).
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas yang telah mendidik, mengajar dan membimbing penulis dengan sabar selama penulis menuntut ilmu, serta seluruh staf STAI Sadra yang telah mengatur semua administrasi selama masa perkuliahan.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan sesuatu yang lebih baik. Penulis sadar masih banyak kekurangan pada tesis ini, namun penulis juga berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 14 Februari 2025

AS Irfani Thahirah Hidayah Al-Aidid

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

KEKUASAAN, KEBEBASAN DAN KEADILAN DALAM PANDANGAN POLITIK ‘ALĪ BIN ABĪ ṬĀLIB: TELAAH SURAT ‘ALĪ BIN ABĪ ṬĀLIB KEPADA MĀLIK AL-ASHTAR

Oleh:

AS Irfani Thahirah Hidayah Al-Aidid

(20.11.1.212.003)

Pembimbing:

Dr. Umar Shahab, MA

TESIS

Tesis diajukan kepada STAI Sadra sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama dalam Aqidah dan Filsafat Islam

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Tesis ini merupakan karya asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam tesis ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari karya ini terbukti plagiat, menjiplak atau pernah dipublikasikan sebagai tesis di tempat lain, maka penulis siap menerima sangsi akademik berupa pembatalan gelar yang diperoleh.

Jakarta,

AS Irfani Thahirah Hidayah Al-Aidid

PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lembar Pengesahan Sidang Tesis
Program Studi Filsafat Agama/Ilmu Aqidah dan Filsafat Islam

Tesis ini disusun oleh,
AS Irfani Thahirah Hidayah Al-Aidid
(20.11.1.212.003)
Judul Tesis: **KEKUASAAN, KEBEBASAN DAN KEADILAN DALAM PANDANGAN POLITIK 'Alī Bin Abī Ṭālib: TELAAH SURAT 'ALI BIN ABI ṬĀLIB KEPADA MĀLIK AL-ASHTAR**

Telah disahkan oleh dewan sidang tesis:

Dr. Umar Shahab, MA
(Ketua Sidang/ Pembimbing Tesis) Date 19/03/2025 (.....)

Ammar Fauzi, Ph.D
(Penguji I) Date 18/03/2025 (.....)

Dr. Muhammad Shodiq, MA
(Penguji II) Date 18/03/2025 (.....)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pandangan politik ‘Alī bin Abī Ṭālib dalam suratnya kepada Mālik al-Ashtar, yang merupakan salah satu pedoman penting dalam kepemimpinan Islam. Surat ini menekankan prinsip-prinsip utama pemerintahan, yaitu kekuasaan sebagai amanah, kebebasan sebagai hak fundamental yang harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial, dan keadilan sebagai landasan utama dalam tata kelola negara. Pokok masalah yang dibahas ada dua: Pertama, masalah dalam politik modern, di mana kekuasaan sering kali diasosiasikan dengan korupsi, kebebasan dikaitkan dengan kebebasan individu tanpa batas sehingga mengabaikan tanggung jawab, serta keadilan menjadi isu yang menantang dengan adanya kesenjangan sosial dan ekonomi, diskriminasi, serta ketidaksetaraan. Kedua, pokok masalah dalam filsafat Barat, yaitu pemikiran filsafat Barat modern yang sering kali menekankan kebebasan individu sebagai hak alami, namun hal ini menimbulkan perdebatan tentang batasan kebebasan dan bagaimana kebebasan individu dapat selaras dengan keadilan sosial. Konsep keadilan dalam filsafat Barat juga menjadi perdebatan, dengan berbagai teori yang berbeda mengenai bagaimana keadilan harus didistribusikan dalam masyarakat. Selain itu, filsafat Barat juga mengkaji berbagai bentuk kekuasaan, legitimasi kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan dapat digunakan secara etis. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prinsip-prinsip kepemimpinan yang terdapat dalam surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar, serta menilai relevansinya dalam sistem pemerintahan kontemporer, khususnya dalam aspek keadilan sosial, kebebasan, dan tanggung jawab kepemimpinan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer seperti Nahjul Balaghah serta literatur sekunder yang membahas pemikiran politik Islam dan filsafat politik modern. Temuan-temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada merupakan pedoman kepemimpinan yang mencerminkan prinsip-prinsip utama pemerintahan Islam, yaitu kebajikan, kebersihan, dan keadilan. ‘Alī bin Abī Ṭālib menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan integritas, kejujuran, dan kepedulian terhadap rakyat, serta menekankan pentingnya keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan konflik. Prinsip-prinsip ini selaras dengan teori politik modern seperti konsep keadilan distributif John Rawls dan etika politik Immanuel Kant. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran politik ‘Alī bin Abī Ṭālib memiliki relevansi yang kuat dalam tata kelola pemerintahan modern. Implementasi nilai-nilai kepemimpinan yang berorientasi pada keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan kekuasaan sebagai amanah dapat menjadi inspirasi bagi sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan berbasis etika moral.

Kata Kunci: ‘Alī bin Abī Ṭālib, kepemimpinan Islam, kekuasaan, kebebasan, keadilan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterai Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turabiyan* dengan beberapa pengecualian.

A. Konsonan

b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
th	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	ṣ	=	ص	l	=	ل
ḥ	=	ح	ḍ	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	ṭ	=	ط	n	=	ن
d	=	د	ẓ	=	ظ	h	=	ه
dh	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

B. Vokal

Pendek	: a = ◌َ ;	i = ◌ِ ;	u = ◌ُ
Panjang	: ā = ا ;	ī = ي ;	ū = و
Diftong	: ay =يا;	aw = وا	

C. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbutah yang diidafkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti lafal في معرفة الله ditulis *fi ma‘rifat Allāh. Ta’* marbutah yang bersambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis “h”, seperti lafal الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ ditulis *al-madīnah al fāḍilah*.

D. Shaddah

Shaddah atau tashdid ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggandakan dua huruf, seperti lafal عقلية ditulis ‘*aqliyyah*, فِعْلِيَّة ditulis *fi‘liyyah*, dan قُوَّة ditulis *quwwah*, sedangkan *tasydid* yang berada di akhir kata seperti عدو ditulis ‘*aduw*.

E. Kata Sandang

Kata sandang “*al*” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf shamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf *al-qamariyyah*.

F. Pengecualian Literasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia seperti lafal سُنَّةُ اللهِ maka akan ditulis *sunnatullāh*, dan juga *asma al-husna* seperti عَبْدُ الرَّحْمٰن maka akan ditulis ‘*Abdurraḥmān* dan جلال الدين maka akan ditulis *Jalāluddīn*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iv

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI DAN PEMBIMBING v

ABSTRAK vi

PEDOMAN LITERASI vii

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 10
1. Identifikasi Masalah 11
2. Pembatasan Masalah 11
3. Perumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
E. Kajian Pustaka 12
F. Metode Penelitian 13
1. Jenis Penelitian 14
2. Sumber Data 14
3. Metode Analisis 15
G. Sistematika Penulisan 17

BAB II SEJARAH DAN KANDUNGAN SURAT POLITIK ‘ALĪ BIN ABĪ ṬĀLIB KEPADA MĀLIK AL-ASHTAR

A. Surat-Surat Politik ‘Alī bin Abī ṬāLib 19
B. Sanad Dan Sejarah Surat ‘Alī bin Abī ṬāLib Kepada Mālik al-Ashtar 24
C. Garis Besar Kandungan Surat Politik ‘Alī bin Abī ṬāLib Kepada Mālik al-Ashtar 30

BAB III PANDANGAN POLITIK ‘ALĪ BIN ABĪ ṬĀLIB TERKAIT KEKUASAAN, KEBEBASAN, DAN KEADILAN

A. ‘Alī bin Abī ṬāLib dan Kekuasaan 38
B. ‘Alī bin Abī ṬāLib dan Kebebasan dalam Pandangan 48
C. ‘Alī bin Abī ṬāLib dan Keadilan 52

BAB IV ANALISIS ATAS PANDANGAN ‘ALĪ BIN ABĪ ṬĀLIB TERKAIT KEKUASAAN, KEBEBASAN DAN KEADILAN
A. Analisis Pandangan ‘Alī bin Abī ṬāLib Tentang Kekuasaan ... 59
B. Kebebasan dalam Pandangan ‘Alī bin Abī ṬāLib..... 67
C. Analisis Pandangan ‘Alī bin Abī ṬāLib Tentang Keadilan 74
D. Keterkaitan konsep Kekuasaan, Kebebasan dan Keadilan dengan Filsafat Politik Modern..... 82
E. Konflik Dan Resolusi Menurut Surat ‘Alī bin Abī ṬāLib Kepada Mālik al-Ashtar 84
BAB V PENUTUP
A. Simpulan 87
B. Saran 89
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam politik modern, konsep kekuasaan, kebebasan, dan keadilan seringkali menjadi fokus perdebatan dan permasalahan yang kompleks. Kekuasaan dalam politik modern seringkali diasosiasikan dengan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan dominasi kelompok tertentu, yang bertentangan dengan prinsip kekuasaan sebagai amanah yang ditekankan dalam pemikiran ‘Ali bin Abi Thalib. Kebebasan di era modern seringkali diartikan sebagai kebebasan individu yang tanpa batas, mengabaikan tanggung jawab sosial dan moral, yang dapat mengarah pada konflik dan ketidakadilan. Keadilan dalam politik modern juga menjadi isu yang menantang, dengan adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebar, diskriminasi, serta ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan peluang.

Dalam filsafat Barat, konsep kekuasaan, kebebasan, dan keadilan telah menjadi topik kajian yang mendalam dan beragam. Pemikiran filsafat Barat modern seringkali menekankan pada kebebasan individu sebagai hak alami, namun hal ini memunculkan perdebatan tentang batasan kebebasan dan bagaimana kebebasan individu dapat selaras dengan keadilan sosial. Konsep keadilan dalam filsafat Barat juga menjadi perdebatan, dengan berbagai teori yang berbeda mengenai bagaimana keadilan harus didistribusikan dalam masyarakat. Selain itu, filsafat Barat juga mengkaji berbagai bentuk kekuasaan, legitimasi kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan dapat digunakan secara etis.

Pada penelitian ini penulis akan berfokus pada pandangan-pandangn politik ‘Alī bin Abī Ṭālib yang dituangkannya dalam surat yang dikirimkan kepada Mālik al-Ashtar gubernur Mesir. Surat ini merupakan salah satu warisan paling signifikan dari kepemimpinannya dan bukan hanya sebuah dokumen administratif, tetapi juga merupakan panduan etika yang mendalam tentang bagaimana menjalankan pemerintahan yang adil dan penuh integritas.

Surat ini, yang ditulis sekitar 1.400 tahun yang lalu, bisa ditemukan di dalam *Nahjul Balaghah* surat nomor ke 53. Surat tersebut masih relevan hingga saat ini dan sering dikutip sebagai model ideal dalam berbagai konteks pemerintahan dan manajemen. Dalam surat tersebut, ‘Alī bin Abī Ṭālib memberikan nasihat yang komprehensif kepada Mālik al-Ashtar, yang mencakup berbagai aspek kepemimpinan, mulai dari cara memperlakukan rakyat hingga prinsip-prinsip dasar keadilan, perlakuan yang adil terhadap rakyat, kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, transparansi, akuntabilitas, kesederhanaan, dan keteladanan merupakan fondasi yang kuat untuk setiap bentuk kepemimpinan yang ingin mencapai keberhasilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Surat ini juga mengingatkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral dan etika untuk melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, pemimpin dapat membangun pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang harmonis dan Sejahtera.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori filsafat politik sebagai cara pandang untuk lebih memahami isi dari surat tersebut. Teori yang pertama adalah kebebasan. Kebebasan adalah salah satu konsep paling mendasar dan penting dalam filsafat politik. Ia menjadi pusat dari berbagai perdebatan dan refleksi filosofis tentang bagaimana masyarakat harus diatur dan bagaimana individu harus berinteraksi dengan negara dan satu sama lain. Beberapa teori kebebasan yang dikenal di dunia barat antara lain adalah sebagai berikut:

Isaiah Berlin, dalam essainya "*Two Concepts of Liberty*" (1958), memperkenalkan dua konsep kebebasan yang sangat berpengaruh: kebebasan negatif dan kebebasan positif. Kebebasan negatif merujuk pada kebebasan dari campur tangan eksternal. Ini adalah kebebasan untuk bertindak tanpa adanya hambatan atau gangguan dari pihak lain. Dalam konteks politik, ini berarti individu memiliki hak untuk hidup tanpa campur tangan negara, selama tindakan mereka tidak merugikan orang lain. Kebebasan positif, di sisi lain, adalah kebebasan untuk mengontrol diri sendiri dan menentukan nasib sendiri. Ini melibatkan kapasitas untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan kolektif, dan sering kali dikaitkan dengan konsep pemberdayaan dan pengembangan diri.[1]

Sedangkan tradisi liberalisme, kebebasan individu dianggap sebagai nilai tertinggi yang harus dilindungi oleh negara. John Locke, salah satu pendiri liberalisme klasik, berpendapat bahwa kebebasan adalah hak alamiah yang diberikan kepada setiap individu oleh Tuhan. Locke menekankan pentingnya hak-hak individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti, dan berargumen bahwa peran utama pemerintah adalah melindungi hak-hak ini.

John Stuart Mill, seorang filsuf liberal yang lebih modern, dalam karyanya "*On Liberty*" (1859), menekankan pentingnya kebebasan berbicara dan berekspresi sebagai komponen penting dari kebebasan individu. Mill memperkenalkan prinsip "*harm principle*", yang menyatakan bahwa kebebasan individu harus dihormati sejauh tidak merugikan orang lain. Mill juga berpendapat bahwa kebebasan adalah esensial untuk pengembangan diri dan kemajuan sosial.

Pendekatan komunitarian terhadap kebebasan menekankan pentingnya komunitas dan hubungan sosial dalam membentuk identitas dan kebebasan individu. Michael Sandel, salah satu eksponen utama komunitarianisme, mengkritik pandangan liberal yang terlalu individualistik. Sandel berargumen bahwa kebebasan sejati hanya bisa dipahami dalam konteks keterlibatan sosial dan tanggung jawab

[1] Isaiah Berlin, *Two Concepts of Liberty*, (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2004), https://plato.stanford.edu/entries/berlin/, diakses pada 23 Juni 2024 pukul 18.00 WIB.

bersama. Menurutnya, kebebasan individu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan moral dan politik komunitas.

Karl Marx memberikan perspektif yang berbeda tentang kebebasan dengan menekankan aspek material dan ekonomi. Bagi Marx, kebebasan sejati hanya bisa dicapai melalui penghapusan kapitalisme dan pembebasan dari eksploitasi kelas. Marx melihat kebebasan sebagai kondisi di mana individu tidak lagi terasing dari produk kerja mereka dan dapat memenuhi potensi manusia sepenuhnya dalam masyarakat yang adil dan tanpa kelas. Teori feminis menyoroti bagaimana struktur patriarki membatasi kebebasan perempuan dan bagaimana kebebasan gender dapat dicapai. Nancy Fraser, seorang filsuf feminis terkemuka, menggabungkan isu kebebasan dengan keadilan sosial. Fraser berpendapat bahwa kebebasan tidak hanya memerlukan pengakuan sosial tetapi juga redistribusi ekonomi. Kebebasan bagi perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya melibatkan perombakan struktur sosial yang mendukung ketidakadilan dan ketimpangan.[2]

Dari beberapa teori diatas terlihat bahwa para filsuf politik terkenal diatas menekankan pentingnya kebebasan Individu, meskipun satu sama lain berbeda dalam memahami dan menjelaskan kebebasan dan dimensi-dimensinya. Jika kita kautkan dengan pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib terkait kebebasan, maka sesungguhnya ‘Alī bin Abī Ṭālib telah berbicara tentang kebebasan Individu jauh sebelum para filsuf politik barat diatas. Sebagaimana yang disebutkan ‘Alī bin Abī Ṭālib didalam suratnya kepada Mālik al-Ashtar mengenai kebebasan:

أَطْلِقْ عَنِ النَّاسِ عُقْدَةَ كلِّ حِقْد، وَاقْطَعْ عَنْک سَبَبَ كلِّ وِتْر، وَتَغَابَ عَنْ كلِّ مَا لايضِحُ لَک، وَلاَ تَعْجَلَنَّ إِلَى تَصْدِيقِ سَاع فَإِنَّ السَّاعِى غَاشٌّ، وَإِنْ تَشَبَّهَ بِالنَّاصِحِينَ.

Artinya: *Bebaskan publik dari penyakit kedengkian dan pangkaslah pemicu permusuhan dari mereka (dengan bergaul sedekat mungkin dengan mereka). Cemehkan hal yang tidak terlihat olehmu, dan jangan tergesa-gesa mempercayai penuduh, sebab orang seperti itu adalah penipu meskipun ia berpura-pura sebagai penasihat yang tulus.*[3]

Teori filsafat politik tentang kebebasan menekankan pentingnya hak individu untuk bertindak sesuai kehendaknya tanpa paksaan atau penindasan. Kelebihan teori ini, ketika dikorelasikan dengan surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar, adalah penekanan pada perlindungan kebebasan rakyat di bawah pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. ‘Alī bin Abī Ṭālib dalam suratnya menekankan bahwa seorang pemimpin harus memperlakukan rakyatnya dengan kasih sayang dan

---

[2] Kiichiro Yagi, *Teori Kapital Marx dalam Sejarah Ekonomi: Konsep Kapital Marx, Mazhab Klasik, Mazhab Austria, dan Teori Pertumbuhan*, (Evolut Inst Econ: Volume 18 Nomor 2) h. 465–489.

[3] Al-Islam, *Imam Ali's Letter to Mālik al-Ashtar: The Richest Treasure*, The Research Treasure, https://www.al-islam.org/richest-treasure-imam-ali/imam-alis-letter-malik-al-ashtar-richest-treasure diakses pada tanggal 17 Agustus 2024

keadilan, menciptakan lingkungan di mana kebebasan individu dihormati dan dilindungi.

Kebebasan Individu memang penting tapi bukan segala-galanya, seab kebebasan sering kali berbenturan dengan kewajiban sosial dan ketertiban umum. Surat ‘Alī bin Abī Ṭālib juga menekankan pentingnya stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat, yang kadang-kadang memerlukan pembatasan kebebasan individu untuk kebaikan bersama. Ini menunjukkan bahwa penerapan kebebasan yang tanpa batas bisa menjadi sulit dalam praktik, terutama ketika harus menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Oleh karena itu, meskipun kebebasan sangat penting, pemimpin juga harus bijaksana dalam memastikan bahwa kebebasan tersebut tidak mengorbankan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

‘Alī bin Abī Ṭālib juga menekankan pentingnya melindungi hak-hak individu, termasuk hak atas keamanan, keadilan, dan kesejahteraan ekonomi. Dia menasihati Malik untuk tidak memaksakan pajak yang memberatkan, memastikan distribusi yang adil dari sumber daya, dan memperlakukan semua rakyat dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Ini menunjukkan bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālib memahami kebebasan bukan hanya dalam konteks hak-hak sipil dan politik, tetapi juga dalam konteks sosial dan ekonomi.

Selain persoalan kebebasan, persoalan kekuasaan juga mendapat perhatian besar para filsuf politik, sepeti Max Weber yang membedakan antara kekuasaan tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Max Weber, seorang sosiolog dan filsuf politik terkemuka, mengembangkan teori kekuasaan yang membedakan tiga jenis otoritas: tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Otoritas tradisional berasal dari adat istiadat dan tradisi yang telah berlangsung lama, di mana kekuasaan dipegang berdasarkan garis keturunan atau kebiasaan yang telah ada. Otoritas karismatik, di sisi lain, didasarkan pada kualitas pribadi dan kharisma individu, di mana pengikut merasa terinspirasi dan loyal karena kepemimpinan yang dianggap luar biasa.[4] Sementara itu, otoritas rasional-legal adalah kekuasaan yang dilegitimasi oleh sistem hukum dan aturan yang rasional, di mana pemimpin diangkat melalui prosedur formal dan sah. Menurut Weber, ketiga bentuk otoritas ini menunjukkan bagaimana legitimasi kekuasaan dapat bervariasi berdasarkan konteks sosial dan budaya, dan bagaimana kekuasaan dapat diterima oleh masyarakat melalui berbagai cara yang berbeda.[5]

Terkait kekuasaan ini, ‘Alī bin Abī Ṭālib dalam suratnya kepada Mālik al-Ashtar menekankan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk melayani rakyat dan bukan untuk keuntungan pribadi. ‘Alī bin Abī Ṭālib menulis: "*Janganlah sekali-kali*

---

[4] Iván Szelenyi, *Weber’s theory of domination and post-communist capitalisms*, (Springlink: Volume 45 nomor 3, 2016), h. 1–24

[5] M. Aris Yusuf, *Teori Kekuasaan: Pengertian, Legitimasi, dan Sumber Kekuasaan*, Politik Ekonomi, https://www.gramedia.com/literasi/teori-kekuasaan/, diakses pada 23 Juni 2024 Pukul 19.00 WIB.

engkau berkata, 'Aku adalah pemimpinmu yang memerintah dan harus ditaati,' karena yang demikian itu merusak hati, meruntuhkan agama, dan mendatangkan kehancuran." ʻAlī bin Abī Ṭālib mengingatkan Malik bahwa kekuasaan yang dimilikinya adalah amanah dari Allah dan harus digunakan dengan tanggung jawab besar. Ini sejalan dengan konsep kekuasaan yang adil dan bertanggung jawab dalam filsafat politik, di mana kekuasaan bukanlah alat untuk penindasan, tetapi sarana untuk mencapai kebaikan bersama.

Teori selanjutnya yang mendapat banyak perhatian oleh filsuf politik adalah persoalan keadilan dan kesetaraan. Kesetaraan mengajarkan bahwa semua individu memiliki nilai dan hak yang sama. John Locke dan Jean-Jacques Rousseau adalah dua filsuf yang banyak membahas konsep ini. Locke berargumen bahwa semua orang dilahirkan setara dengan hak-hak alamiah tertentu, sementara Rousseau menekankan pentingnya kontrak sosial untuk menjaga kesetaraan. John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, dua filsuf besar dalam tradisi pemikiran politik Barat, memiliki pandangan yang signifikan tentang kesetaraan. John Locke berargumen bahwa semua individu dilahirkan dengan hak-hak alami yang sama, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti.[6] Menurut Locke, kesetaraan ini bersifat mendasar dan harus dihormati oleh pemerintah, yang keberadaannya sendiri didasarkan pada persetujuan rakyat untuk melindungi hak-hak tersebut. Di sisi lain, Jean-Jacques Rousseau menekankan pentingnya kesetaraan sosial dan moral dalam masyarakat. Rousseau mengkritik ketidaksetaraan yang timbul dari kepemilikan dan status sosial, dan mengajukan konsep kontrak sosial di mana individu secara kolektif setuju untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.[7] Bagi Rousseau, kesetaraan bukan hanya hak alami, tetapi juga kondisi yang harus diciptakan dan dijaga melalui struktur sosial dan politik yang adil. Kedua pemikir ini, meskipun berbeda dalam pendekatan mereka, sama-sama melihat kesetaraan sebagai prinsip yang esensial untuk kebebasan dan keadilan dalam masyarakat.

ʻAlī bin Abī Ṭālib juga menekankan pentingnya kesetaraan dalam suratnya. Ia menginstruksikan Mālik al-Ashtar untuk tidak membedakan antara orang kaya dan miskin, kuat dan lemah. ʻAlī bin Abī Ṭālib menulis: "Jadikanlah engkau memiliki hati yang lembut dan kasih sayang terhadap rakyatmu, *dan janganlah engkau seperti binatang buas yang mengincar mereka untuk dimangsa. Karena mereka ada dua macam: satu, saudara-saudaramu seagama; dua, orang-orang sepertimu dalam penciptaan*.". Pernyataan ini menyoroti pentingnya perlakuan yang adil dan setara terhadap semua rakyat, tanpa memandang status sosial mereka. Ini menggarisbawahi prinsip kesetaraan yang fundamental dalam filsafat politik.

---

[6] Enslikopedia Gramedia, *Jean-Jacques Rousseau (1712—1778)*, internet encyclopedia of philosophy, https://iep.utm.edu/rousseau/, diakses pada 23 Juni 2024 Pukul 19.30 WIB.

[7] Spring, *Hobbes, Locke, Montesquieu, and Rousseau on Government*, (Bill of Rights in Action: Developments in democracy, 2004), https://teachdemocracy.org/online-lessons/bill-of-rights-in-action/bria-20-2-c. diakses pada 23 Juni 2024 Pukul 19.30 WIB.

Sejalan dengan kesetaraan adalah persoalan keadilan. Keadilan adalah salah satu konsep paling sentral dalam filsafat politik. Plato dalam "Republik"-nya mengajukan gagasan tentang keadilan sebagai harmoni dalam masyarakat, sementara John Rawls dalam "*A Theory of Justice*" mendefinisikan keadilan sebagai keadilan sosial dan distribusi yang adil dari hak dan sumber daya. Dalam "*A Theory of Justice*," John Rawls mengajukan konsep keadilan sebagai keadilan sosial yang berfokus pada distribusi yang adil dari hak dan sumber daya dalam masyarakat. Rawls memperkenalkan dua prinsip utama keadilan. Pertama, prinsip kebebasan yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, yang kompatibel dengan kebebasan yang sama untuk orang lain. Kedua, prinsip perbedaan yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung, serta melekat pada posisi dan jabatan yang terbuka bagi semua orang di bawah kondisi persamaan kesempatan yang adil. [8]

Rawls menggunakan konsep "*veil of ignorance*" (tabir ketidaktahuan) sebagai alat pemikiran di mana individu, dalam posisi asli di belakang tabir ini, tidak mengetahui posisi sosial, kemampuan, atau preferensi mereka di dunia nyata, sehingga mereka akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang adil dan tidak bias. Dengan demikian, Rawls menekankan bahwa keadilan bukan hanya tentang hasil yang adil tetapi juga tentang proses dan struktur sosial yang memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk sukses dan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung.

‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahan. Ia menulis: "*Hendaklah yang paling engkau cintai di antara segala urusan adalah yang tengah-tengah dalam keadilan, yang paling umum dalam keridhaan rakyat, dan yang paling menyeluruh dalam mendatangkan kemakmuran*.". ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan bahwa keadilan harus menjadi prinsip utama dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin. Ini mencerminkan pandangan bahwa keadilan bukan hanya tentang hukuman yang setimpal, tetapi juga tentang memastikan kesejahteraan dan kepuasan rakyat.

Kelebihan dari surat yang di wasiatkan ‘Alī bin Abī Ṭālib adalah penekanan pada nilai-nilai moral dan etika dalam kekuasaan, kesetaraan, dan keadilan. Pendekatan ini mendorong pemimpin untuk bertindak dengan integritas dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Berdasarkan hasil hipotesa penulis, prinsip-prinsip yang diutarakan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālibsejalan dengan banyak teori modern dalam filsafat politik, menunjukkan relevansi dan universalitas pandangannya. Namun, implementasi dari prinsip-prinsip ini dalam praktik sering kali menghadapi

[8] John Rawls, *A theory of justice teori keadilan: dasar-dasar filsafat poliik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 200.

tantangan besar, terutama dalam konteks politik yang kompleks dan beragam. Mengadopsi nilai-nilai ini secara penuh membutuhkan komitmen yang tinggi dan sering kali menghadapi resistensi dari berbagai pihak yang mungkin memiliki kepentingan yang berbeda.

Surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana prinsip-prinsip kekuasaan, kebebasan, dan keadilan dapat diterapkan dalam pemerintahan. Meskipun ditulis lebih dari seribu tahun yang lalu, panduan ini tetap relevan dalam diskusi modern tentang filsafat politik. Dengan menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan etika, surat ini menginspirasi pemimpin untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam setiap tindakan mereka.[9]

Sayangnya, sebelum Mālik al-Ashtar bisa mengambil alih posisinya sebagai gubernur Mesir, ia diracun oleh musuh-musuh politik ‘Alī bin Abī Ṭālib. Pembunuhan ini menunjukkan betapa besar ancaman yang dirasakan oleh lawan-lawan politik terhadap kehadiran Mālik al-Ashtar. Mereka menyadari bahwa Mālik al-Ashtar, dengan integritas dan kemampuannya, akan menjadi penghalang besar bagi ambisi mereka. Keberhasilan musuh-musuh Malik dalam menghalangi dia untuk memerintah Mesir adalah pukulan besar bagi upaya ‘Alī bin Abī Ṭālibuntuk menstabilkan wilayah tersebut. Namun, warisan dan pengaruh Mālik al-Ashtar tetap hidup, terutama melalui surat pedoman pemerintahan yang diberikan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib. Surat tersebut terus diingat sebagai panduan penting bagi para pemimpin dalam menegakkan keadilan dan menjalankan pemerintahan yang bijaksana dan adil. Mālik al-Ashtar dikenal bukan hanya karena keberaniannya di medan perang, tetapi juga karena kebijaksanaannya dan dedikasinya terhadap nilai-nilai keadilan.[10] Ia dihormati oleh kawan dan lawan karena integritasnya dan kepemimpinannya yang adil. Malik juga dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan rakyat, sering mendengarkan keluhan mereka dan berusaha untuk memperbaiki kondisi mereka. Warisan Mālik al-Ashtar terus dikenang dalam sejarah Islam. Ia adalah contoh dari seorang pemimpin yang berani, setia, dan adil. Kesetiaannya kepada ‘Alī bin Abī Ṭālib dan perjuangannya untuk menegakkan keadilan membuatnya dihormati di kalangan umat Islam hingga hari ini. Banyak yang melihat Malik sebagai simbol dari keberanian dan dedikasi terhadap prinsip-prinsip Islam yang sejati.

Penunjukan Mālik al-Ashtar sebagai gubernur Mesir oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib adalah bukti nyata dari kepercayaan dan penghargaan yang besar terhadap kemampuan, integritas, dan kesetiaan Malik. Meskipun Malik tidak dapat mewujudkan tugasnya karena pembunuhan yang tragis, surat pedoman pemerintahan

---

[9] Ali Tareq Abdulhasan, *Imam Ali (a.s) & Transcendental Phenomenology: Letter to Mālik al-Ashtar as lifeworld system thinking Paradigm*, Researchgate : January, 2017, https://www.researchgate.net/publication/330292710_Imam_Ali_as_Transcendental_Phenomenology_Letter_to_Malik_al-Ashtar_as_lifeworld_system_thinking_Paradigm

[10] Muhammad, Abu Ja"far. *Tarikh Ath-Thabari Jilid 3. Penerjemah. Abu Ziad Muhammad Dhiaul-Haq dan Abdul Syukur Abdul Razak*. (Jakarta : Pustaka Azam, 2011), h. 77.

dari ‘Alī bin Abī Ṭālib tetap menjadi warisan yang abadi. Surat ini tidak hanya memberikan panduan bagi Malik, tetapi juga bagi generasi pemimpin Islam yang mengikuti, menegaskan pentingnya keadilan, kebijaksanaan, dan integritas dalam pemerintahan.[11]

Berdasarkan uraian diatas, pertimbangan untuk melakukan kajian mendalam berupa telaah dalam tesis ini muncul. Tujuannya adalah untuk mengetahui pola pikir serta sstematikan dalam berpolitik dan strategi memimpin sebuah negara yang dilakukan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib sebagaimana yang ia amanahkan dalam suratnya kepada Mālik al-Ashtar yang mencerminkan kebijaksanan yang adil serta strategi berdiplomasi dalam bernegara dan berpolitik pada masa pemerintahannya. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti berusaha mengkaji dengan menelaah setiap sejarah yang tertera sebagai sebuah bentuk sistem pemerintahan politik yang dilandasi oleh rasa adil dan bijaksana serta berpihak kepada rakyat yang mana hal tersebut telah diatur didalam al-Qur’an untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. [12]

Di tengah meningkatnya otoritarianisme dan korupsi dalam pemerintahan, muncul pertanyaan mendasar: Bagaimana sebuah sistem kepemimpinan dapat berjalan secara efektif dengan tetap mengutamakan prinsip keadilan, kebebasan individu, dan kesejahteraan masyarakat?. Tentunya dengan menelaah pemikiran politik Ali bin Abi Thalib, khususnya yang tertuang dalam suratnya kepada Mālik al-Ashtar, menawarkan perspektif yang kaya dan relevan dengan kondisi permasalahan kontemporer saat ini dalam sistem pemerintahan. Surat tersebut bukan sekadar pedoman administratif bagi seorang gubernur, tetapi juga merupakan manifestasi dari prinsip kepemimpinan yang berbasis moralitas, transparansi, serta tanggung jawab sosial.

Masalah kontemporer yang sedang terjadi, seperti meningkatnya otoritarianisme di beberapa negara terutama di Indonesia sebagai negara denga mayoritas masyarakat beragama muslim, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, lemahnya supremasi hukum, serta pembatasan kebebasan sipil, menunjukkan bahwa nilai-nilai kepemimpinan yang adil dan berbasis etika masih menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintahan yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat cenderung menghadapi krisis legitimasi dan perlawanan sosial. Dalam konteks ini, konsep kepemimpinan ‘Alī bin Abī Ṭālib dapat menjadi referensi penting dalam membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan keadilan sosial, kebebasan yang bertanggung jawab, serta kekuasaan yang dijalankan sebagai amanah.

Pokok masalah yang menjadi alasan utama penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip politik ‘Alī bin Abī Ṭālib dalam suratnya kepada Mālik al-Ashtar

---

[11] Qutaibah, Ibnu. *Politik dan Kekuasaan Dalam Sejarah Para Khalifah*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,2016, hlm. 12.

[12] Saefudin, Machfud, dkk. *Dinamika Perdaban Islam Prespektif Historis*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2013, hlm. 59.

dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan modern. Apakah nilai-nilai tersebut hanya relevan dalam konteks sejarah Islam atau justru memiliki nilai universal yang dapat menjadi solusi atas krisis kepemimpinan saat ini? Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan pemikiran ‘Alī bin Abī Ṭālib dengan konsep keadilan distributif John Rawls serta etika politik Immanuel Kant untuk menguji sejauh mana relevansi pemikirannya dalam konteks pemerintahan kontemporer. Dengan melakukan analisis historis dan filosofis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang konsep kekuasaan sebagai amanah, kebebasan yang diimbangi dengan tanggung jawab sosial, serta keadilan sebagai pilar utama dalam tata kelola pemerintahan. Lebih dari itu, kajian ini juga berupaya menawarkan perspektif baru bagi para pemimpin dan pembuat kebijakan dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih adil, demokratis, dan bermoral.

B. PERMASALAHAN

1. Identifikasi Masalah

1) Menjelaskan urgensi surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar
2) Ada banyak masalah penting yang disinggung dalam surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar. Antara lain:
   a) Pentingnya seorang pemimpin memiliki kepribadian yang sempurna yaitu taqwa kepada Allah SWT
   b) Pentingnya seorang pemimpin untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.
   c) Pentingnya berpedoman kepada kitab Allah SWT dan sunnah Rosul
   d) Pentingnya garis komando yang terjalin antara seorang pemimpin pada level yang lebih rendah kepada pemimpin dengan level yang lebih tinggi dalam hal ini Imam/ Khalifah seperti: keharusan berlaku adil kepada rakyat, tidak boleh memperlakukan rakyat semena-mena, rakyat harus diperlakukan secara adil, memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memberikan pendapatnya kepada penguasa, melibatkan rakyat dalam pembangunan negara dan sebagainya.

2. Pembatasan Masalah

Dari berbagai masalah yang berhasil penulis temukan dari identifikasi masalah, peniliti membatasi penelitian pada kekuasaan, kebebasan dan keadilan dalam pandangan politik ‘Alī bin Abī Ṭālib yang peneliti kaji dari suratnya kepada Mālik al-Ashtar.

3. Perumusan Masalah

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaa primer yaitu: Bagaimana pandangan politik ‘Alī bin Abī Ṭālib sebagaimana terdapat dalam suratnya kepada Mālik al-Ashtar?

Untuk menjawab pertanyaan primer ini peneliti menurunkannya menjadi tiga pertanyaan sekunder, yaitu:

a. Apa kandungan surat ‘Alī bin Abī Ṭālib secara global?
b. Bagaimana pandangan politik ‘Alī bin Abī Ṭālib terkait kebebasan, kekuasaan dan keadilan?
c. Sejauh mana keterkaitan pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib terkait 3 hal diatas dalam konteks filsafat politik modern?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana pandangan politik ‘Alī bin Abī Ṭālib dalam suratnya kepada Mālik al-Ashtar. Tujuan penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menganalisa dan mendalami pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang kekuasaan;
2. Menganalisa dan mendalami pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang kebebasan;
3. Menganalisa dan menelaah pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang keadilan.

D. MANFAAT PENELIIAN

Penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Adapaun maanfaat teoritisnya adalah:

1. Memberikan kontribusi bagi disiplin ilmu filsafat politik menyangkut teori kekuasaan, kebebasan, dan keadilan yang dikoreasikan dengan pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar;
2. Memberikan rekomendasi bagi masyarakat, negara, pemerintah, dan akademisi untuk mendalami pandangan politik ‘Alī bin Abī Ṭālib melalui telaah suratnya kepada Mālik al-Ashtar memiliki dampak signifikan di berbagai sektor. Dengan menelaah dokumen historis ini, kita tidak hanya membuka jendela ke masa lalu tetapi juga mendapatkan wawasan yang relevan untuk masa kini dan masa depan;
3. Memenuhi persyaratan kelulusan di memperoleh gelar Magister Agama dalam Aqidah dan Filsafat Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra Jakarta.

E. KAJIAN PUSTAKA

Agar penelitian ini dapat dikatakan sempurn, setidaknya penelitian dalam kajian telaah ini telah melewati beberapa riset pada beberapa jurnal ilmiah guna memperdalam temuan-temuan hasil pemikiran peneliti terhadap pandangan politik ‘Alī bin Abī Ṭālib dalam bernegara sebagai bentuk *mu’amalah bayna an-naas* (hubungan sosial dengan sesama manusia). Dalam kajian pustaka ini, penulis menyajikan tinjauan (*review*) singkat terhadap sejumlah riset terdahulu yang dapat dikumpulkan dalam waktu yang terbatas.

Penelitian terdahulu yang peneliti tinjau adalah jurnal yang diteliti oleh Ita Ristiana dengan Judul *Dakwah Khalifah Ali Dalam Konteks Politik (36-41 H)*.[13] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneiti yang terletak pada fokus yang mebahas pada pandangan politik ‘Alī bin Abī Ṭālib sebaga seorang pemimpin pada masa khulafaurrasyidin. Namun terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dimana penelitian yang dilakukan oleh Ita Ristiana masa awal kekhalifahannya, walaupun kondisi politik tidak mendukung pernerintahannya, ‘Alī bin Abī Ṭālibtetap membela kebenaran dan keadilan dalam situasi yang bagaimanapun dengan tagwa kepada Allah sebagai landasan utamanya. Metode yang digunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil argumentasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kemunculan Aliran-aliran politik dalam Islam disebabkan kebijakan ‘Alī bin Abī Ṭālib yang menyetujui attahkim (arbitrase) antara pasukan ‘Alī bin Abī Ṭālib dan Muawiyah, sehingga sebahagian pasukan ‘Alī bin Abī Ṭālib kecewa karena kebijakan tersebut dan menjadi perpecahan ummat Islam.

Untuk di tinjau lebih lanjut, peneliti meninjau berdasarkan Jurnal yang di teliti oleh Masduki yang *Khalifah Ali Bin Abi Tahlib; Awal Tragedi Perang Saudara dalam Sejarah Islam*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada konsep kekuasaan masa kekhilafahan ‘Alī bin Abī Ṭālib dari perpecahan dalam politik merembat ke masalah-masalah keyakinan (teologi), sehingga akhirnya umat Islam terkotak-kotak dalam berbagai aliran dan mazhab teologi. Perbedaan terletak pada objek yang dikaji, dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertitik fokus pada kekuasaan sebagaimana tertera dalam surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar pada saat menjadi gubernur Mesir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir *maudhû'i* dengan pendekatan kritik pemikiran yang digabungkan dengan pendekatan *affirmative action*. Jenis penelitian disertasi ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Argumentasi penelitian ini adalah umat Islam mengalami perubahan dan perbedaan dalam sistem politik kenegaraanya, dari sistem pemerinahan yang berdasarkan syura', berubah menjadi bentuk pemimpin yang tidak dipilih, tetapi berdasarkan penunjukkan yang secara turun temurun (bani/dinasti) atau berbetuk kerajaan. Di bidang pemahan keagamaan juga muncul berbagai aliran (madzhab/sekte) yang bermula timbul dari respon terhadap berbagai peristiwa di akhir pemerintahan ‘Alī bin Abī Ṭālib.[14]

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Saidin Hamzah dan Hamrian, dengan penelitian yang berjudul "*Khulafah Al- Rasyidun: Masa Kepemimpinan ‘Alī bin Abī Ṭālib*". Penelitian ini membahas mengenai Kekhalifaan ‘Alī bin Abī Ṭālib adalah

---

[13] Ita Ristiana, *Dakwah Khalifah Ali Dalam Konteks Politik (36-41 H)*, Jurnal Dakwah, Volume 9 Nomor 2, Juli-Desember 20008, h. 163-184.

[14] Masduki *Khalifah Ali Bin Abi Tahlib; Awal Tragedi Perang Saudara dalam Sejarah Islam*, Jurnal Al-Fath, Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember, 2008, h. 162-176.

kekhalifaan yang bermaksud mengejawantahkan pesan-pesan Rasulullah yang dia peroleh selama bersamanya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah untuk merekonstruksi peristiwa dengan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi sebagai tahap terakhir dari kegiatan penelitian.[15] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya berupa telaah konsep pandangan politik ‘Alī bin Abī Ṭālib yang telaah mealui surat yang diberikannya kepada Mālik al-Ashtar. Namun, terdapat persamaan mengenai penelitian ini dengan yang sebelumnya yang membahas masa pemerintahan ‘Alī bin Abī Ṭālib dan bagaimana kondisi yang ada pada saat masa pemerintahan ‘Alī bin Abī Ṭālib pada telaah melalui sejarah yang ada. Agumentasinya terhadap penelitiannya menyatakan bahwa khalifah ‘Alī bin Abī Ṭālib banyak memberikan sumbangsi dan mempertahankan Islam dari banyak musuh. Mahir dalam strategi perang dan mengalami kesulitan dalam mengendalikan administrasi negara yang dalam keadaan caos. Konfrontasi dari berbagai pihak (Khawarij, Thalha dan Mu’awiyah) adalah bukti sejarah Islam yang memilukan karena lebih banyak tergerakkan oleh motif-motif material ketimbang kemanusiaan dan agama.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Objek dalam penelitian ini adalah surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar sebagai nasihat Ketika dirinya dilantik menjadi gubernur Mesir kala itu. Sedangkan, Subyek penelitian dalam tesis ini adalah pandangan politik ‘Alī bin Abī Ṭālib konsep kekuasaan, kebebasan, dan keadilan dalam pemerintahan. Data yang dimaksud mencakup data sekunder yang berkaitan dengan surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar. Sumber primer dalam penelitian ini adalah teks asli surat tersebut, berdasarkan kitab *Nahjul Balaghah* serta literatur yang membahas pemikiran politik ‘Alī bin Abī Ṭālib, baik dari perspektif sejarah maupun filsafat politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep kekuasaan, kebebasan, dan keadilan dalam pemikiran politik ‘Alī bin Abī Ṭālib serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip dalam filsafat politik modern. selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi pemikiran ‘Alī bin Abī Ṭālib dalam konteks pemerintahan yang adil dan etis.

Metode ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses

[15] Saidin Hamzah dan Hamriana, *Khulafah Al- Rasyidun: Masa Kepemimpinan ‘Alī bin Abī Ṭālib*, CARITA : Jurnal Sejarah dan Budaya, Volume 3 Nomo 1, Mei 2022.

yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.[16]

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif Metode penelitian kualitatif adalah cara untuk meneliti suatu masalah dengan lebih mendalam, namun membutuhkan waktu yang lebih lama untuk selesai. Metode ini didasarkan pada analisis atau deskripsi, dengan fokus pada perspektif subjek dan penggunaan teori sebagai pemandu. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Dengan sumber data kepustakaan (*library research*), secara sederhana, lebih menekankan pada pemahaman makna teks oleh seorang peneliti.[17]

Penelitian kepustakaan atau *library research* merupakan metode yang penting dalam studi literatur, sejarah, dan teks-teks keagamaan. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada analisis dan pemahaman makna teks yang ada. Untuk meneliti pandangan politik ‘Alī bin Abī Ṭālib melalui telaah suratnya kepada Mālik al-Ashtar.[18]

2. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian maka peneliti membaginya menjadi dua macam, yaitu primer dan sekunder. Data primer penelitian ini adalah surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar. Untuk membantu pemahaman terhadap kandungan surat itu peneliti menggunakan data sekunder berupa surat dan ujaran ‘Alī bin Abī Ṭālib pada *Nahjul Balaghah* dan karya-karya ulama yang mengulas pandangan politik Ali, seperti: kebebasan, keadilan, dan juga konsep kekuasan dalam pandangan politik ‘Alī bin Abī Ṭālib sebagaimana tergambar pada surat yang ia wasiatkan Mālik al-Ashtar. Selain sumber utama, peneliti juga perlu mengumpulkan literatur pendukung yang mencakup buku, artikel jurnal, dan tulisan akademis lainnya yang membahas tentang ‘Alī bin Abī Ṭālib, kepemimpinannya, dan konteks sejarah serta politik pada zamannya. Literatur pendukung ini membantu memberikan konteks yang lebih luas dan memperkaya analisis.

3. Metode Analisis

Untuk menganalisis surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar peneliti menggunakan metode analisis konten (isi) dan metode sejarah (*hiytorical method*) yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Metode Analisis Isi (*content analysis*)

Dengan metode ini peneliti melakukan telaaah dan analisa surat Ali kepada Mālik al-Ashtar. untuk menganalisis isi surat ‘Alī bin Abī Ṭālib

---

[16] Abdurrahman, *Dudung. Metode Penelitian Sejarah*. (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu),1999, h.99.

[17] Muzairi et al., *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Grafindo Persada), h. 50-51

[18] Khatibah, K. . *Penelitian kepustakaan. Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*,, 2011, 5(01), h. 36-39.

kepada Mālik al-Ashtar dan memahami makna dan implikasinya terhadap pandangan politik ‘Alī bin Abī Ṭālib.

Berdasarkan metode ini, peneliti memahami isi surat sebagai sumber data dan menganalisisnya secara sistematis dan kualitatif. Peneliti juga menggunakan teori dan konsep yang relevan dalam analisis, seperti teori kekuasaan dan etika memerintah, untuk memahami makna dan implikasi surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar dalam konteks sejarah Islam. Metode analisis isi ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih dalam dan mendalam tentang pandangan politik ‘Alī bin Abī Ṭālib, serta bagaimana ia mengaplikasikan prinsip-prinsip kekuasaan dan etika dalam pemerintahannya. Dengan demikian, metode ini membantu dalam memahami bagaimana ‘Alī bin Abī Ṭālib melihat kekuasaan dan bagaimana ia mengelola pemerintahan, serta bagaimana pandangannya tentang kekuasaan dan etika memerintah berpengaruh pada keputusan dan tindakannya sebagai khalifah.

Pemahaman yang mendalam diperlukan untuk menangkap nuansa, makna, dan implikasi dari teks tersebut. Setelah memahami teks, peneliti kemudian melakukan analisis terhadap isi surat. Analisis ini bisa meliputi:[19]

1) Analisis Tematik. Mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam surat, seperti keadilan, kepemimpinan, etika politik, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat;
2) Analisis Kontekstual. Memahami konteks historis dan sosial di mana surat tersebut ditulis, serta bagaimana konteks ini mempengaruhi isi dan tujuan surat;
3) Analisis Retorika. Mempelajari gaya bahasa dan teknik retorika yang digunakan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib untuk menyampaikan pesannya.

Analisis kontekstual melibatkan pemahaman terhadap latar belakang historis dan sosial dari surat tersebut. Peneliti harus memahami situasi politik dan sosial pada masa ‘Alī bin Abī Ṭālib, termasuk tantangan dan konflik yang dihadapinya. Analisis ini membantu menempatkan teks dalam konteks yang tepat dan mengungkapkan relevansi historis dan politiknya. Analisis isi merupakan inti dari metode deskriptif analitis. Peneliti menelaah isi surat secara mendalam untuk mengungkap makna yang lebih dalam dari kata-kata dan kalimat yang digunakan. Ini termasuk analisis retorika, gaya bahasa, dan pesan implisit yang disampaikan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib. Peneliti mencari hubungan antara tema-tema yang diidentifikasi dan bagaimana mereka diartikulasikan dalam teks. Setelah menganalisis data, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan mereka. Kesimpulan ini mencakup interpretasi tentang pandangan politik ‘Alī bin Abī Ṭālib seperti yang tercermin dalam suratnya kepada Mālik al-Ashtar. Peneliti mengaitkan

[19] Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah.* (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu),1999, h. 34.

temuan mereka dengan literatur yang ada dan menunjukkan bagaimana analisis mereka memperkaya pemahaman tentang kepemimpinan dan politik dalam tradisi Islam.

b. Metode sejarah (*historical method*)

Untuk memahami *setting* situasi yang mengelilingi surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar maka peneliti menggukan metode sejarah. yang di dalamnya terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh di antaranya heuristik, kritik sumber baik kritik internal maupun kritik eksternal, interpretasi, dan historiografi. Metode ilmu sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis, rekaman dan peninggalan masa lalu manusia guna memperoleh kontruksi aktivitas manusia tersebut pada masa lalu. Dalam hal pendekatannya akan digunkan Teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan.

Peneliti harus jelas tentang apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Dalam konteks ini, tujuan penelitian mungkin meliputi pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip politik dan kepemimpinan yang disampaikan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib dalam suratnya kepada Mālik al-Ashtar. Selanjutnya, peneliti harus mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber utama yang relevan. Sumber utama dalam penelitian ini adalah surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar. Peneliti perlu mencari terjemahan dan interpretasi surat tersebut yang diakui dan kredibel. Langkah berikutnya adalah membaca dan memahami teks dengan cermat. Peneliti harus melakukan pembacaan mendalam (*close reading*) terhadap surat ‘Alī bin Abī Ṭālib dan literatur pendukung.

Peneliti juga harus membandingkan temuan dari surat tersebut dengan literatur lain yang membahas tentang kepemimpinan dan politik dalam tradisi Islam. Ini membantu peneliti untuk melihat persamaan dan perbedaan serta memperkuat analisis mereka. Guna menyusun hasil penelitian dalam bentuk hasil analisa. Peneliti harus menyajikan temuan mereka secara sistematis, jelas, dan terstruktur. Laporan ini harus mencakup pendahuluan, metodologi, hasil analisis, dan kesimpulan. Penelitian kepustakaan tentang pandangan politik ‘Alī bin Abī Ṭālib melalui telaah suratnya kepada Mālik al-Ashtar melibatkan langkah-langkah yang sistematis dan mendalam. Dari penentuan tujuan penelitian hingga penyusunan hasil akhir, setiap langkah bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan akurat tentang makna dan implikasi teks. Metode ini tidak hanya mengungkap wawasan historis dan politik yang berharga, tetapi juga memperkaya pengetahuan kita tentang prinsip-prinsip kepemimpinan yang relevan sepanjang masa.[20]

---

[20] Milya Sari, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6 (1), 2020, (41-53), h. 43.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini akan disusun ke dalam lima bab. Pandangan Politik ‘Alī bin Abī Ṭālib: Telaah Surat ‘Alī bin Abī Ṭālib Kepada Mālik al-Ashtar ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan,** berisi sub-sub bab mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II **Sejarah dan Kandungan Surat Politik ‘Alī bin Abī Ṭālib Kepada Mālik al-Ashtar** berisi kumpulan surat-surat politik ‘Alī bin Abī Ṭālib, sanad dan sejarah surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar, Garis besar kandungan surat politik ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar.

Bab III **Pandangan Politik ‘Alī bin Abī Ṭālib Terkait Kekuasaan, Kebebasan, dan Keadilan dan Keterkaitan 3 Hal Tersebut dalam Filsafat Politik Modern** berisikan uraian tentang, Pandangan Politik ‘Alī bin Abī Ṭālib Terkait Kekuasaan Kebebasan dan keadilan, Manajemen Pemerintahan yang Efektif Menurut Surat ‘Alī bin Abī Ṭālib Kepada Mālik al-Ashtar, Perlindungan Hak Dan Kesejahteraan Rakyat Menurut Surat ‘Alī bin Abī Ṭālib Kepada Mālik al-Ashtar, Keterkaitan konsep Kekuasaan, Kebebasan dan Keadilan dengan Filsafat Politik Modern. Konflik Dan Resolusi Menurut Surat ‘Alī bin Abī Ṭālib Kepada Mālik al-Ashtar .

Bab IV **Analisis Konsep kekuasaan, kebebasan dan keadilan menurut Pandangan Politik Antara Pemerintah Dan Rakyat ‘Alī bin Abī Ṭālib Berdasarkan Surat ‘Alī bin Abī Ṭālib Kepada Mālik al-Ashtar** berisi uraian mengenai kolaborasi antara konsep umum dengan implikasi yang akan menciptakan hasil-hasil penelitian, dan analisis.

Bab V **Penutup** dari tesis ini, yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulan adalah pernyataan final sekaligus upaya penulis menyoroti temuan-temuan signifikan dari kajian yang telah dilakukan. Adapun saran yang dimaksud ialah berkenaan dengan peta arah penelitian dan diskusi lebih lanjut serta tawaran yang berupa refleksi konseptual.

BAB II
SEJARAH DAN KANDUNGAN SURAT POLITIK ‘ALĪ BIN ABĪ ṬĀLIB KEPADA MĀLIK AL-ASHTAR

A. Surat-Surat Politik ‘Alī bin Abī Ṭālib

‘Alī bin Abī Ṭālib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW, adalah figur yang tak tergantikan dalam sejarah Islam. Selain menjadi salah satu *Khulafaur Rasyidin*, ‘Alī bin Abī Ṭālib dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, adil, dan memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip Islam. Warisan yang paling berharga dari ‘Alī bin Abī Ṭālib adalah surat-surat politik yang ditulisnya selama masa kepemimpinannya sebagai Khalifah. Surat-surat ini tidak hanya mencerminkan pandangan politik ‘Alī bin Abī Ṭālib, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang etika dan moralitas dalam kepemimpinan Islam.[26]

Surat-surat politik ‘Alī bin Abī Ṭālib ditulis dalam masa yang penuh tantangan dan ketidakpastian. ‘Alī bin Abī Ṭālib menjadi Khalifah dalam situasi yang kompleks, di tengah-tengah konflik internal yang dikenal sebagai Fitnah Kubra, atau fitnah besar. Perpecahan di kalangan umat Islam setelah wafatnya Utsman bin Affan dan peristiwa Perang Jamal serta Perang *Shiffin* menandai awal dari masa pemerintahan ‘Alī bin Abī Ṭālib. Dalam konteks ini, surat-surat yang ditulis oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib merupakan cerminan dari usaha beliau untuk mengembalikan stabilitas, keadilan, dan persatuan di tengah-tengah umat Islam yang sedang terpecah.[27]

Surat-surat politik ‘Alī bin Abī Ṭālib yang dikenal dalam sejarah Islam merupakan bagian dari kumpulan khotbah, surat, dan ucapan yang terdapat dalam kitab Nahjul Balaghah. Berikut adalah beberapa surat politik ‘Alī bin Abī Ṭālib yang terkenal dan memiliki pengaruh signifikan dalam sejarah dan pemikiran politik Islam:[28]

1. Surat kepada Mālik al-Ashtar. Ini adalah salah satu surat politik paling terkenal yang ditulis oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib. Surat ini diberikan kepada Mālik al-Ashtar saat ia diangkat sebagai gubernur Mesir. Surat ini berisi pedoman tentang bagaimana seorang pemimpin harus menjalankan pemerintahan dengan adil, bijaksana, dan penuh tanggung jawab. Surat ini mencakup berbagai aspek pemerintahan, termasuk perlakuan terhadap rakyat, administrasi keuangan, pemilihan pejabat, dan hubungan dengan berbagai kelompok masyarakat.[29]

---

[26] Abbas Mahmoud al-Akkad, *Ketakwaan Khlaifah ‘Alī bin Abī Ṭālib* (terj. Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad) (Jakarta: Bulan Bintang, 1979). h. 45-46.

[27] Jalaluddin as-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa’* (Mekah Mukarroinah: Makiabah Nizar Mushthafa al-Baz, 2000), h. 149, juga lihat Ahmad Syalabi, Sefarah Kebudayaan Islam, Jilid I (terj: Mukhtarv Yahya) (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992), cet. VII, h. 281.

[28] Jalaluddin as-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa’*, h. 149.

[29] Jalaluddin as-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa’*, h. 150.

2. Surat kepada Abdullah bin Abbas. Surat ini ditujukan kepada Abdullah bin Abbas, sepupu dan sahabat dekat ‘Alī bin Abī Ṭālib, yang diangkat sebagai gubernur Basra. ‘Alī bin Abī Ṭālib memberikan nasihat tentang bagaimana Abdullah bin Abbas harus mengelola urusan pemerintahannya dengan adil dan bijaksana, serta menghindari tindakan yang bisa menimbulkan ketidakadilan atau ketidakpuasan di kalangan rakyat.[30]
3. Surat kepada Utsman bin Hunaif. Surat ini dikirim kepada Utsman bin Hunaif, gubernur Basra pada saat itu, yang menghadiri sebuah perjamuan mewah. ‘Alī bin Abī Ṭālib mengkritik tindakan Utsman karena menghadiri acara yang hanya dihadiri oleh kalangan kaya, sementara rakyat jelata tidak diundang. Surat ini menekankan pentingnya kesederhanaan dan keadilan sosial dalam pemerintahan.[31]
4. Surat kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. ‘Alī bin Abī Ṭālib mengirim beberapa surat kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, penguasa Syam (Suriah) dan salah satu tokoh utama yang menentang kekhalifahan ‘Alī bin Abī Ṭālib. Surat-surat ini berisi peringatan dan nasihat kepada Muawiyah, serta mengecam tindakannya yang dianggap merongrong kesatuan umat Islam.[32]
5. Surat kepada Qutham bin Abbas. Surat ini ditujukan kepada Qutham bin Abbas, yang diangkat sebagai gubernur Mekah. ‘Alī bin Abī Ṭālib memberikan petunjuk tentang cara mengelola Mekah dengan adil, serta memastikan bahwa rakyat diperlakukan dengan penuh rasa hormat dan keadilan.
6. Surat kepada Gubernur Mesir sebelum Mālik al-Ashtar. Sebelum pengangkatan Mālik al-Ashtar, ‘Alī bin Abī Ṭālib mengirim surat kepada gubernur Mesir sebelumnya, yaitu Qays bin Sa'ad bin Ubadah. Surat ini memberikan arahan tentang pengelolaan Mesir, penanganan berbagai kelompok masyarakat, serta pentingnya menjaga keamanan dan keadilan di wilayah tersebut.[33]
7. Surat kepada Masyarakat Kufah. Surat ini ditulis kepada penduduk Kufah, sebuah kota yang menjadi pusat pemerintahan ‘Alī bin Abī Ṭālib. Surat ini berisi pengingat kepada penduduk Kufah tentang tanggung jawab mereka untuk mendukung ‘Alī bin Abī Ṭālib dalam upayanya menegakkan keadilan dan menjaga kesatuan umat Islam.[34]

Surat-surat politik ini menunjukkan kebijaksanaan ‘Alī bin Abī Ṭālib dalam mengelola pemerintahan dan memberikan panduan tentang nilai-nilai utama dalam kepemimpinan Islam, seperti keadilan, integritas, dan tanggung jawab moral. Surat-surat ini juga mencerminkan tantangan politik dan sosial yang dihadapi ‘Alī bin Abī

[30] Jalaluddin as-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa'*, h. 152.
[31] Jalaluddin as-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa'*, h. 155.
[32] Jalaluddin as-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa'*, h. 156.
[33] Jalaluddin as-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa'*, h. 158.
[34] Jalaluddin as-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa'*, h. 160.

Ṭālib selama masa kekhalifahannya, serta usahanya untuk menjaga keutuhan dan kestabilan umat Islam di tengah perpecahan dan konflik.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu surat paling terkenal yang ditulis oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib adalah suratnya kepada Mālik al-Ashtar, seorang sahabat dan gubernur yang diangkat oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib untuk memimpin Mesir. Surat ini tidak hanya berisi instruksi administratif, tetapi juga merupakan dokumen penting yang mencerminkan pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang keadilan dan etika kepemimpinan. Dalam surat tersebut, ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan pentingnya keadilan dalam memerintah, mengingatkan Mālik al-Ashtar untuk selalu memperlakukan rakyat dengan baik, dan menghindari sikap tirani atau ketidakadilan. ‘Alī bin Abī Ṭālib juga mengingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah dari Allah, dan seorang pemimpin harus bertanggung jawab di hadapan Allah atas bagaimana ia menggunakan kekuasaannya.

‘Alī bin Abī Ṭālib menggarisbawahi pentingnya pemimpin untuk tidak membeda-bedakan antara rakyatnya, baik yang kaya maupun yang miskin.[35] Ia menekankan bahwa keadilan harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Prinsip keadilan ini bukan hanya untuk menjaga kestabilan sosial, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan ajaran Islam. ‘Alī bin Abī Ṭālib menyadari bahwa keadilan adalah kunci untuk membangun kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya, dan tanpa keadilan, kepemimpinan akan kehilangan legitimasi moralnya.

Surat-surat ‘Alī bin Abī Ṭālib juga memberikan panduan tentang etika administrasi dan pemerintahan. ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan pemerintahan. Dalam suratnya kepada salah satu pejabat yang ditugaskan untuk mengelola baitul mal, ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan bahwa kekayaan negara harus dikelola dengan jujur dan bijaksana, tanpa ada penyalahgunaan wewenang atau korupsi. ‘Alī bin Abī Ṭālib juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan rakyat dan pengelolaan sumber daya yang ada.

‘Alī bin Abī Ṭālib juga memberikan perhatian besar pada hak-hak rakyat, terutama mereka yang lemah dan tidak mampu.[36] Dalam suratnya, ‘Alī bin Abī Ṭālib menegaskan bahwa seorang pemimpin harus selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, terutama mereka yang paling membutuhkan. Ia mengingatkan bahwa tugas seorang pemimpin bukan hanya untuk mengatur negara, tetapi juga untuk memastikan

---

[35] Mustafa al-Siba’i, *al-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri’ al-Islami* (Dar al-Qaumiyah, 1966 M.), h. 76.

[36] Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal* (Jakarta: Paramadina, 2001 M.), h. 15.

bahwa setiap individu mendapatkan hak-haknya dan tidak ada yang tertindas atau diabaikan. Prinsip ini menunjukkan betapa besar perhatian ‘Alī bin Abī Ṭālib terhadap keadilan sosial dan kesetaraan dalam Islam. Selain soal administrasi dan keadilan, surat-surat politik ‘Alī bin Abī Ṭālib juga mencerminkan pandangan beliau tentang diplomasi dan hubungan antarbangsa. ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan menghindari konflik yang tidak perlu. Dalam suratnya kepada para gubernurnya di berbagai wilayah, ‘Alī bin Abī Ṭālib mengingatkan bahwa hubungan antarbangsa harus didasarkan pada prinsip keadilan, saling menghormati, dan menjaga perdamaian. ‘Alī bin Abī Ṭālib juga menekankan pentingnya menjaga perjanjian dan komitmen yang telah dibuat dengan negara lain, karena hal itu merupakan cerminan dari integritas dan kehormatan seorang pemimpin.

Diplomasi bagi ‘Alī bin Abī Ṭālib bukan hanya soal menjaga hubungan politik, tetapi juga tentang membangun hubungan yang harmonis berdasarkan prinsip-prinsip Islam. ‘Alī bin Abī Ṭālib percaya bahwa Islam mengajarkan perdamaian dan kerjasama, dan oleh karena itu, seorang pemimpin Islam harus menjadi teladan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayahnya. Surat-surat ‘Alī bin Abī Ṭālib mencerminkan pandangan ini, menunjukkan bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālib adalah seorang pemimpin yang bijaksana dalam mengelola hubungan internasional, selalu mencari solusi damai untuk menyelesaikan konflik, dan menjaga integritas Islam di mata dunia.[37]

Surat-surat politik ‘Alī bin Abī Ṭālib juga mengandung banyak pelajaran tentang prinsip moral dan etika dalam kepemimpinan.[38] ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan pentingnya sifat-sifat seperti kejujuran, kesabaran, dan kerendahan hati dalam memimpin. Ia juga menekankan bahwa seorang pemimpin harus selalu siap menerima kritik dan saran, serta tidak boleh bersikap sombong atau merasa paling benar. ‘Alī bin Abī Ṭālib mengingatkan bahwa kekuasaan adalah ujian dari Allah, dan seorang pemimpin harus selalu waspada terhadap godaan kekuasaan yang bisa menjauhkan mereka dari jalan yang benar.

‘Alī bin Abī Ṭālib juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi dalam kepemimpinan.[39] Ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh terjebak dalam kenikmatan duniawi dan melupakan tanggung jawabnya kepada Allah dan rakyatnya. Surat-surat ‘Alī bin Abī Ṭālib mencerminkan pandangan yang mendalam tentang hubungan antara kekuasaan dan tanggung jawab spiritual, menunjukkan bahwa bagi ‘Alī bin Abī Ṭālib, kepemimpinan adalah sebuah

---

[37] Banyak hadits-hadits Nabi yang tercatat dalam berbagai buku hadits dan sirah yang mengungkap tentang keutamaan para sahabat Nabi termasuk ‘Alī bin Abī Ṭālib. Untuk Ali lihat juga dalam Jalaluddin as-Suyuthi, h. 150-155 di bawah *fashifi al-ahadits alwaridah fifadhlihi*.

[38] Muhammad Abu Zahw, *al-Hadis wa al-Muhadditsin* (Dar al-Fikr: Mesir, t.th.), h. 86.

[39] Mujar ibn Syarif, dkk., *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Cet. XI; Jakarta: Erlangga, 2008 M.), h. 124.

amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan nilai-nilai spiritual.

Meskipun surat-surat politik ‘Alī bin Abī Ṭālib ditulis lebih dari 1.400 tahun yang lalu, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tetap relevan hingga hari ini, seperti halnya prinsip keadilan, integritas, dan tanggung jawab yang ditekankan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib adalah nilai-nilai universal yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks kepemimpinan modern. Di era modern, di mana korupsi, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan sering terjadi, surat-surat ‘Alī bin Abī Ṭālib dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi para pemimpin untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan keadilan. Surat-surat tersebut juga mengingatkan kita bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral dan etika untuk melayani rakyat dengan adil dan bijaksana.

Selain itu, surat-surat ‘Alī bin Abī Ṭālib sangat relevan dalam konteks hubungan internasional dan diplomasi. Prinsip-prinsip yang ditekankan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang menjaga perdamaian, menghormati perjanjian, dan menjaga hubungan baik dengan negara lain adalah nilai-nilai yang sangat penting dalam diplomasi modern. Surat-surat tersebut mengajarkan bahwa hubungan internasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan saling menghormati, bukan hanya pada kepentingan politik atau ekonomi semata.

Dengan demikian, surat-surat politik ‘Alī bin Abī Ṭālib adalah warisan berharga yang menawarkan pandangan mendalam tentang kepemimpinan, keadilan, dan etika dalam Islam. Surat-surat tersebut bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga dokumen yang relevan dalam konteks kepemimpinan modern. Melalui surat-suratnya, ‘Alī bin Abī Ṭālib mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah tanggung jawab yang besar, yang harus dijalankan dengan integritas, keadilan, dan tanggung jawab moral. Prinsip-prinsip yang ditekankan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib dalam surat-suratnya menawarkan panduan yang berharga bagi para pemimpin di seluruh dunia, menunjukkan bahwa nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam tentang keadilan, tanggung jawab, dan etika adalah nilai-nilai universal yang tetap relevan hingga hari ini.

B. Sanad Dan Sejarah Surat ‘Alī bin Abī Ṭālib Kepada Mālik al-Ashtar

Surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar merupakan salah satu dokumen penting dalam sejarah Islam yang tidak hanya menunjukkan kebijaksanaan ‘Alī bin Abī Ṭālib sebagai seorang pemimpin, tetapi juga menyoroti prinsip-prinsip keadilan dan moralitas dalam pemerintahan. Surat ini, yang ditujukan kepada Mālik al-Ashtar, seorang gubernur yang diangkat oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib untuk memimpin Mesir, menjadi panduan etika bagi para pemimpin di berbagai zaman. Dalam esai ini, kita akan mengkaji

sanad dan sejarah dari surat ini dengan fokus pada hakikat, latar belakang, serta implikasinya dalam konteks pemerintahan dan etika kepemimpinan.

1. Latar Belakang dan Konteks Surat

Surat ini ditulis dalam konteks yang sangat penting dalam sejarah Islam, di mana ‘Alī bin Abī Ṭālib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad, berada di tengah-tengah konflik politik dan sosial yang mendalam. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, ‘Alī bin Abī Ṭālib menjadi khalifah keempat. Masa kepemimpinannya ditandai dengan berbagai tantangan, termasuk pemberontakan dan ketidakstabilan di berbagai wilayah kekhalifahan.

Mālik al-Ashtar adalah seorang sahabat dekat dan panglima perang yang setia kepada ‘Alī bin Abī Ṭālib. Ketika ‘Alī bin Abī Ṭālib mengangkatnya sebagai gubernur Mesir, ia menghadapi tugas yang berat dalam menstabilkan wilayah yang penuh dengan ketegangan politik dan sosial. Surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar disusun sebagai panduan yang rinci tentang bagaimana seorang pemimpin Muslim harus bertindak, baik dalam hal keadilan, pemerintahan, maupun interaksi dengan rakyatnya.[40]

2. Hakikat Surat: Sebuah Pedoman Etis dan Moral

Hakikat surat ini terletak pada upaya ‘Alī bin Abī Ṭālib untuk memberikan panduan moral yang kuat bagi Mālik al-Ashtar dalam menjalankan tugasnya sebagai gubernur. ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan pentingnya keadilan, belas kasih, dan perlakuan yang adil terhadap semua lapisan masyarakat, termasuk kaum minoritas dan orang-orang yang lemah. Surat ini mengandung nasihat yang berakar pada nilai-nilai Islam, serta pada prinsip-prinsip umum tentang hak asasi manusia dan etika kepemimpinan. ‘Alī bin Abī Ṭālib menyatakan didalam suratnya kepada Mālik al-Ashtar bahwa:

نْصِفِ اللهَ وَأَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِک، وَمِنْ خَاصَّةِ أَهْلِک، وَمَنْ لَک فِيهِ هَوًى مِنْ رَعِيتِک،
فَإِنَّک إِلاَّ تَفْعَلْ تَظْلِمْ! وَمَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللهِ کانَ اللهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ، وَمَنْ خَاصَمَهُ اللهُ أَدْحَضَ
حُجَّتَهُ، وَکانَ لِلَّهِ حَرْباً حَتَّى ينْزِعَ أَوْ يتُوبَ. وَلَيسَ شَىءٌ أَدْعَى إِلَى تَغْيِيرِ نِعْمَةِ اللهِ وَتَعْجِيلِ نِقْمَتِهِ مِنْ
.إِقَامَة عَلَى ظُلْم، فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ دَعْوَةَ الْمُضْطَهَدِينَ وَهُوَ لِلظَّالِمِينَ بِالْمِرْصَادِ

Artinya: “*Berlakulah adil terhadap hak Allah dan hak rakyat atas dirimu sendiri, keluarga terdekatmu dan orang-orang yang kaucintai. Jika tidak, maka engkau telah*

[40] Bernard Lewis, *Bangsa Arab dalam Lintasan Sejarah; dari segi Geografi, Sosial, Budaya dan Persatuan Islam* (terj. Said Jamburi) (Jakarta: Pedoman IImu Jaya, 1988), h. 51

berbuat zalim; sedangkan siapa saja yang zalim terhadap hamba-hamba Allah, maka dia telah memerangi Allah, dan bukan hamba-hamba tersebut. Dan siapa saja yang memerangi Allah, niscaya Dia akan menggugurkan hujjahnya dan memeranginya sampai dia berhenti dan bertobat. Ketahuilah, tiada yang lebih cepat meruntuhkan karunia Allah dan menyegerakan bencana-Nya daripada tindakan zalim. Sungguh Allah swt Maha Mendengar doa orang-orang yang tertindas dan Dia selalu siap menghukum kaum yang zalim."[41]

Melalui pernyataan diatas, ‘Alī bin Abī Ṭālib mengingatkan Mālik al-Ashtar untuk senantiasa berlaku adil, tanpa memandang status sosial atau agama seseorang. Dalam suratnya, ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan pentingnya memperlakukan rakyat dengan kebaikan dan keadilan, serta menjauhi segala bentuk tirani dan penindasan. Ia juga menekankan bahwa seorang pemimpin harus senantiasa mendengarkan keluhan rakyatnya dan memperlakukan mereka dengan rasa hormat dan martabat. Salah satu bagian yang paling menonjol dari surat ini adalah nasihat ‘Alī bin Abī Ṭālib agar Mālik al-Ashtar tidak pernah merasa bahwa dirinya lebih baik daripada rakyat yang dipimpinnya. ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah dari Allah, dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kekuasaan bukanlah alat untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk menindas orang lain, tetapi harus digunakan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang.

3. Sanad Surat: Keaslian dan Otentisitas

Sanad atau rantai perawi surat ini menjadi elemen penting dalam menilai keaslian dan otentisitasnya. Dalam tradisi Islam, sanad merupakan salah satu metode utama untuk menilai keabsahan sebuah dokumen atau pernyataan yang dikaitkan dengan tokoh-tokoh penting, terutama Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar memiliki sanad yang kuat dan telah diriwayatkan oleh beberapa ulama terkemuka dalam sejarah Islam.

Surat ini terdapat dalam berbagai sumber literatur Islam, termasuk dalam kitab Nahjul Balaghah, sebuah koleksi khotbah, surat, dan perkataan yang dikaitkan dengan ‘Alī bin Abī Ṭālib.[42] Meskipun kitab ini dikompilasi oleh Syekh Al-Sharif Al-Radi pada abad ke-10, banyak ulama menganggap bahwa isi *Nahjul Balaghah*, termasuk surat kepada Mālik al-Ashtar, mencerminkan pemikiran dan kata-kata asli

---

[41] Al-Islam, *Imam Ali's Letter to Mālik al-Ashtar: The Richest Treasure*, The Research Treasure, https://www.al-islam.org/richest-treasure-imam-ali/imam-alis-letter-malik-al-ashtar-richest-treasure diakses pada tanggal 15 Agustus 2024

[42] Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahih al-Bukhari,* Juz IX (Cet. I; Dar al-Ṭauq al-Najah, 1422 H.), h. 81.

‘Alī bin Abī Ṭālib.[43] Selain itu, banyak sejarawan dan ahli hadis yang mendukung keaslian surat ini dengan merujuk pada sumber-sumber lain yang menguatkan sanadnya.

Keaslian surat ini juga didukung oleh fakta bahwa banyak prinsip yang tercantum di dalamnya sejalan dengan ajaran Islam yang lebih luas, seperti yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Misalnya, prinsip keadilan yang ditekankan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib dalam surat ini sangat sesuai dengan ajaran Islam tentang keadilan sebagai salah satu pilar utama dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan demikian, sanad surat ini memiliki dasar yang kuat dalam tradisi Islam, meskipun seperti semua teks sejarah, ia tetap menjadi subjek penelitian dan analisis lebih lanjut.

Sanad atau rantai perawi dari surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar merupakan aspek penting dalam menilai keaslian dan otentisitas dokumen ini. Dalam tradisi Islam, sanad adalah metode kritis yang digunakan untuk menilai keabsahan sebuah pernyataan atau teks yang dikaitkan dengan tokoh-tokoh penting, seperti Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dengan adanya sanad yang kuat, sebuah dokumen atau hadis dapat dianggap sebagai otentik dan dipercaya sebagai bagian dari ajaran yang asli.[44]

Surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar bisa ditemukan di dalam *Nahjul Balaghah*. *Nahjul Balaghah* sendiri telah diakui secara luas dalam tradisi Syiah dan juga oleh banyak ulama Sunni sebagai salah satu sumber penting yang menggambarkan kebijaksanaan ‘Alī bin Abī Ṭālib.

Meskipun kitab *Nahjul Balaghah* dihormati, keaslian dari teks-teks yang terkandung di dalamnya, termasuk surat kepada Mālik al-Ashtar, sering kali menjadi subjek diskusi di kalangan ulama. Beberapa ulama mempertanyakan apakah teks-teks tersebut benar-benar berasal dari ‘Alī bin Abī Ṭālib atau telah ditambahkan oleh para perawi atau penyusun pada masa-masa berikutnya. Namun, sebagian besar ulama Syiah menerima *Nahjul Balaghah* sebagai representasi otentik dari ajaran dan kebijaksanaan ‘Alī bin Abī Ṭālib. Dalam mendukung keaslian surat ini, banyak ulama dan sejarawan mengacu pada fakta bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam surat tersebut sangat sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang lebih luas, termasuk ajaran-ajaran yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Misalnya, penekanan pada keadilan, perlakuan yang adil terhadap

---

[43] Agus Hasan Bashori dan Ulil Amri Syafri, *Studi Kritis Konsep Sanad Kitab Nahj Al-Balaghah Sebagai Upaya Membangun Budaya Tabayyun Dalam Keilmuan Islam* (el Harakah Volme 18 Nomor 2 Tahun 2016), h. 165.

[44] Marshall GS. Hudgson,. *The Venture of Islam, Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia, buku pertama* (terj. Mulyadhi Kartanegara) (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 309.

semua orang, dan tanggung jawab moral seorang pemimpin adalah prinsip-prinsip yang sering diulang dalam teks-teks keagamaan Islam lainnya.[45]

Selain itu, beberapa sumber sejarah Islam lainnya juga merujuk pada surat ini atau mengutip bagian-bagian dari surat ini, yang semakin memperkuat keabsahannya. Misalnya, para ahli sejarah mencatat bahwa surat ini telah dikutip oleh ulama-ulama lain dalam karya-karya mereka yang berbicara tentang etika kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam. Rujukan ini membantu membangun sanad yang lebih kuat dan menunjukkan bahwa surat ini telah diakui oleh berbagai kalangan dalam tradisi Islam sebagai bagian dari warisan intelektual dan spiritual ʻAlī bin Abī Ṭālib.[46]

Berdasarkan tradisi ilmu hadis, pengujian sanad dilakukan dengan melihat siapa saja yang termasuk dalam rantai perawi, kapan dan di mana mereka hidup, serta sejauh mana mereka dapat dipercaya sebagai sumber informasi yang akurat. Proses ini sangat kompleks dan membutuhkan keahlian dalam ilmu-ilmu keislaman, termasuk sejarah, biografi, dan kritisisme teks. Secara keseluruhan, meskipun ada perdebatan mengenai keaslian penuh dari surat ʻAlī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar, sebagian besar ulama sepakat bahwa prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam. Surat ini terus diakui sebagai dokumen penting dalam tradisi Islam, baik sebagai panduan etika kepemimpinan maupun sebagai contoh dari kebijaksanaan dan moralitas yang dipegang oleh ʻAlī bin Abī Ṭālib.

Syarat sah *sanad* dalam tradisi ilmu hadis dan sejarah Islam adalah kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah sanad (rantai perawi) dianggap otentik dan dapat dipercaya. Berikut adalah syarat-syarat utama yang harus dipenuhi untuk menilai sahnya sanad:[47]

a. Konektivitas Sanad (*Ittisal al-Sanad*). Sanad harus tersambung tanpa ada perawi yang terputus antara satu dengan yang lainnya. Semua perawi dalam rantai harus hidup pada zaman yang sama dan memiliki kemungkinan untuk bertemu dan menerima informasi secara langsung dari perawi sebelumnya.
b. Keadilan Perawi (*ʿAdalah al-Ruwat*). Setiap perawi dalam sanad haruslah seorang Muslim yang adil, yaitu seseorang yang memiliki integritas moral dan keagamaan yang baik, tidak melakukan dosa besar, dan dikenal sebagai orang yang jujur dan berakhlak mulia. Mereka juga harus bebas dari sifat-sifat yang dapat meragukan integritas mereka, seperti kebohongan, ketidakjujuran, atau amoralitas.

---

[45] Jousouf Sou'yb, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 4714,
[46] Jousouf Sou'yb, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 478.
[47] Harun Nasution, *Teologi Islam; aliran, sejarah, analisa perbandingan* (Jakarta:UI Pres, 1986), h. 5.

c. Kekuatan Hafalan atau Ketelitian (*Ḍabṭ*). Setiap perawi harus memiliki ingatan yang kuat atau ketelitian dalam menyampaikan informasi. Mereka harus mampu menghafal dan menyampaikan hadis atau informasi secara akurat sebagaimana mereka menerimanya, tanpa ada penambahan, pengurangan, atau perubahan.
d. Tidak Ada Kecacatan yang Tersembunyi (*ʿAdam al-ʿIllah*). Hadis atau riwayat yang disampaikan tidak boleh memiliki cacat tersembunyi (ʿillah) yang dapat merusak keabsahan sanadnya. Cacat tersembunyi ini bisa berupa kesalahan dalam penyampaian, kesalahan dalam sanad, atau hal-hal lain yang tidak terlihat secara langsung tetapi bisa mempengaruhi keotentikan hadis.
e. Tidak Bertentangan dengan Hadis atau Riwayat yang Lebih Kuat (*ʿAdam al-Shudhudh*). Sanad dan matan (isi) hadis tidak boleh bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih terpercaya atau yang memiliki sanad yang lebih kuat. Jika terdapat perbedaan, maka hadis dengan sanad yang lebih lemah dapat dianggap cacat atau tidak sah.

Dalam praktek, ulama hadis akan memeriksa setiap perawi yang termasuk dalam sanad untuk memastikan bahwa semua syarat ini dipenuhi. Mereka juga akan mempertimbangkan reputasi, kehidupan, dan kepribadian dari setiap perawi untuk memastikan bahwa hadis yang disampaikan dapat dipercaya. Jika semua syarat ini terpenuhi, sanad tersebut dianggap sah (*ṣaḥīḥ*), dan hadis yang disampaikan melalui sanad tersebut dapat diterima sebagai otentik.

4. Pengaruh dan Warisan Surat

Surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya pada masa hidup ‘Alī bin Abī Ṭālib, tetapi juga dalam sejarah Islam dan bahkan hingga zaman modern. Surat ini sering dipuji sebagai salah satu panduan paling komprehensif tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam surat ini telah diadopsi oleh banyak pemimpin dan pemikir Islam sepanjang sejarah. Dalam konteks pemerintahan, surat ini menawarkan model kepemimpinan yang berpusat pada keadilan, tanggung jawab, dan belas kasih.[48] Hal ini sangat relevan dalam diskusi kontemporer tentang tata kelola yang baik dan hak asasi manusia.[49] Banyak pemimpin Muslim dan intelektual modern merujuk pada surat ini sebagai sumber inspirasi untuk menegakkan keadilan dan memperjuangkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat mereka.

---

[48] Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar‘iyyah fi Islah al-Ra‘i wa al-Ra'iyah* (RiyaD: al-Maktabah al-Salafiyah wa Maktabatuha, 1387 H.), h. 88.

[49] Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar‘iyyah fi Islah al-Ra‘i wa al-Ra'iya*h (RiyaD: al-Maktabah al-Salafiyah wa Maktabatuha, 1387 H.), h. 91.

Selain itu, surat ini juga memiliki pengaruh yang mendalam dalam bidang hukum Islam dan etika.[50] Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib dalam surat ini sering kali digunakan sebagai dasar untuk interpretasi hukum Islam yang lebih adil dan inklusif. Misalnya, ide tentang keadilan dan perlakuan yang sama terhadap semua individu, terlepas dari agama atau status sosial, telah menjadi dasar bagi banyak argumen tentang hak-hak minoritas dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan dalam masyarakat Muslim.

Misalnya, di banyak negara Muslim, surat ini digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati.[51] Dalam konteks yang lebih luas, surat ini juga memberikan wawasan berharga tentang bagaimana pemimpin dapat menghadapi tantangan moral dan etika dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Dalam tradisi hukum Islam, surat ini digunakan sebagai referensi dalam pembahasan tentang keadilan sosial, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang lemah. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam surat ini juga sering kali dikutip dalam konteks debat hukum mengenai hak-hak wanita, anak-anak, dan kelompok-kelompok minoritas lainnya dalam masyarakat Muslim. Ini menunjukkan bahwa surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar memiliki pengaruh yang melampaui batas waktu dan tempat, menjadikannya sebagai salah satu dokumen paling penting dalam tradisi Islam.[52]

Surat ini juga mempengaruhi perkembangan konsep-konsep etika dalam Islam. Pemikiran tentang keadilan, tanggung jawab moral, dan perlakuan yang adil terhadap semua individu, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat ini, telah menjadi landasan bagi banyak teori etika dalam tradisi Islam.[53] Konsep-konsep ini tidak hanya relevan dalam konteks pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi dan sosial, memberikan panduan tentang bagaimana individu harus bertindak dalam hubungannya dengan orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Secara keseluruhan, surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar adalah sebuah dokumen yang memiliki dampak yang luar biasa dalam sejarah Islam. Pengaruhnya terasa dalam berbagai bidang, mulai dari pemerintahan dan hukum hingga etika dan kehidupan sosial. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam surat ini terus menjadi sumber inspirasi bagi generasi pemimpin Muslim dan pemikir yang mencari panduan tentang bagaimana menjalankan kekuasaan dengan adil dan bertanggung jawab.

---

[50] Sayyid Abu al-A‘la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution* (Lahore: Islamic Publications, 1997 M.), h. 22.

[51] Ali al-Salus, *Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan Syar’i* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997 M.), h. 44-45.

[52] Jimli al-Siddiqi, *Islam dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995 M.), h. 38.

[53] Mehdi Muzaffari, *Kekuasaan dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994 M.), h. 38.

Surat ini tidak hanya relevan dalam konteks masa lalu, tetapi juga menawarkan wawasan yang berharga bagi dunia modern dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis.

C. Garis Besar Kandungan Surat Politik ‘Alī bin Abī Ṭālib Kepada Mālik al-Ashtar

Surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar adalah sebuah panduan lengkap yang mencerminkan nilai-nilai luhur dalam Islam, terutama dalam konteks kepemimpinan dan pemerintahan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam surat ini tidak hanya relevan pada masa hidup ‘Alī bin Abī Ṭālib, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi generasi pemimpin Islam berikutnya dalam menegakkan keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan menjalankan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Surat ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tema utama yang mencakup aspek-aspek penting dari administrasi dan manajemen negara yang ideal menurut ajaran Islam. Pertama, surat ini menekankan pentingnya keadilan sebagai landasan utama dalam pemerintahan. ‘Alī bin Abī Ṭālib menegaskan bahwa seorang pemimpin harus selalu berlaku adil, tidak memihak, dan tidak membiarkan keinginan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu mempengaruhi keputusan yang diambil. Keadilan dalam surat ini tidak hanya terbatas pada hubungan antara pemimpin dan rakyat, tetapi juga mencakup perlakuan yang sama terhadap semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, agama, atau etnisitas. ‘Alī bin Abī Ṭālib juga menekankan bahwa keadilan adalah fondasi utama yang akan memastikan keberlangsungan dan stabilitas pemerintahan.[54]

Kedua, surat ini memberikan arahan yang jelas mengenai pentingnya kebijaksanaan dan konsultasi dalam pengambilan keputusan. ‘Alī bin Abī Ṭālib menasihati Mālik al-Ashtar untuk selalu berkonsultasi dengan para penasihat yang bijaksana dan ahli di bidangnya sebelum mengambil keputusan penting. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya proses musyawarah dalam pemerintahan Islam, di mana keputusan yang diambil bukan hasil dari satu individu saja, tetapi hasil dari diskusi dan pertimbangan kolektif. Konsultasi ini juga dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi kesejahteraan rakyat.

Ketiga, surat ini mengajarkan tentang perlunya belas kasih dan kebaikan hati dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat welas asih dan empati terhadap rakyatnya. Ia harus memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan mereka, terutama mereka yang

---

[54] Muhadi Zainudin dan Abd Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam*, (Bandung:Putra Mediatama Press), 2008, h. 70.

lemah dan tertindas. ‘Alī bin Abī Ṭālib mengingatkan Mālik al-Ashtar untuk tidak pernah mengabaikan hak-hak rakyat kecil dan selalu memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan hormat dan martabat. Ini mencerminkan ajaran Islam yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap yang lemah dan perlakuan yang adil terhadap semua orang.

Keempat, ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam administrasi pemerintahan. Ia mengingatkan Mālik al-Ashtar untuk memilih pejabat dan pemimpin yang memiliki integritas, yang jujur, dan yang tidak korup. Surat ini menggarisbawahi bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang tidak mencari keuntungan pribadi dari posisi mereka dan yang selalu bertindak dengan penuh tanggung jawab. ‘Alī bin Abī Ṭālib juga memperingatkan bahaya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat merusak tatanan masyarakat dan menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Kelima, surat ini juga memuat panduan tentang bagaimana seorang pemimpin harus berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk pedagang, petani, tentara, dan ulama. ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan bahwa setiap kelompok memiliki peran penting dalam masyarakat, dan seorang pemimpin harus memperlakukan mereka dengan adil dan memberikan perhatian yang sesuai dengan peran mereka. Misalnya, para pedagang harus dilindungi dari penindasan, para petani harus diberikan dukungan agar mereka dapat memproduksi makanan yang cukup untuk masyarakat, dan tentara harus diperlakukan dengan hormat dan diberikan hak-hak mereka dengan adil.

Terakhir, surat ini mencerminkan visi ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia menekankan bahwa tujuan utama pemerintahan adalah untuk memastikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pemimpin harus selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam surat ini, ‘Alī bin Abī Ṭālib juga berbicara tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab, di mana seorang pemimpin tidak boleh memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, tetapi harus selalu ingat bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan dan kepada rakyat.[55]

Berikut adalah garis besar kandungan surat tersebut:

1. Kepemimpinan yang Berbasis Keadilan

نْصِفِ اللهَ وَأَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِک، وَمِنْ خَاصَّةِ أَهْلِک، وَمَنْ لَک فِيهِ هَوًى مِنْ رَعِيتِک،

فَإِنَّک إِلاَّ تَفْعَلْ تَظْلِمْ! وَمَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللهِ كانَ اللهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ، وَمَنْ خَاصَمَهُ اللهُ أَدْحَضَ

[55] Masduki, *Khalifah Ali Bin Abi Tahlib; Awal Tragedi Perang Saudara dalam Sejarah Islam*, al-fath, Volume 02 Nomor 02 (Juli-Desember) 2008, h. 162

حُجَّتَهُ، وَكانَ لِلَّهِ حَرْباً حَتَّى ينْزِعَ أَوْ يتُوبَ. وَلَيسَ شَىءٌ أَدْعَى إِلَى تَغْيِيرِ نِعْمَةِ اللهِ وَتَعْجِيلِ نِقْمَتِهِ مِنْ إِقَامَة عَلَى ظُلْم، فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ دَعْوَةَ الْمُضْطَهَدِينَ وَهُوَ لِلظَّالِمِينَ بِالْمِرْصَادِ.

Artinya: "*Berlakulah adil terhadap hak Allah dan hak rakyat atas dirimu sendiri, keluarga terdekatmu dan orang-orang yang kaucintai. Jika tidak, maka engkau telah berbuat zalim; sedangkan siapa saja yang zalim terhadap hamba-hamba Allah, maka dia telah memerangi Allah, dan bukan hamba-hamba tersebut. Dan siapa saja yang memerangi Allah, niscaya Dia akan menggugurkan hujjahnya dan memeranginya sampai dia berhenti dan bertobat. Ketahuilah, tiada yang lebih cepat meruntuhkan karunia Allah dan menyegerakan bencana-Nya daripada tindakan zalim. Sungguh Allah swt Maha Mendengar doa orang-orang yang tertindas dan Dia selalu siap menghukum kaum yang zalim*".[56]

'Alī bin Abī Ṭālib menekankan bahwa seorang pemimpin harus memprioritaskan keadilan dalam segala tindakan dan keputusan. Keadilan adalah fondasi utama dalam pemerintahan, dan seorang pemimpin harus senantiasa adil terhadap semua rakyat, tanpa membedakan status sosial, agama, atau afiliasi politik mereka. 'Alī bin Abī Ṭālib memperingatkan Mālik al-Ashtar agar tidak membiarkan kekuasaan membuatnya lalai atau arogan, melainkan harus selalu ingat bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus digunakan untuk menegakkan keadilan.

2. Tanggung Jawab Sosial dan Perhatian terhadap Rakyat.

وَأَشْعِرْ قَلْبَک الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيةِ، وَالْمَحَبَّةَ لَهُمْ، وَاللُّطْفَ بِهِمْ، وَلاَ تَكونَنَّ عَلَيهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَک فِى الدِّينِ، وَإِمَّا نَظِيرٌ لَک فِى الْخَلْقِ، يفْرُطُ مِنْهُمُ الزَّلَلُ، وَتَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ، وَيؤْتَى عَلَى أَيدِيهِمْ فِى الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ، فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِک وَصَفْحِک مِثْلِ الَّذِى تُحِبُّ وَتَرْضَى أَنْ يعْطِيک اللهُ مِنْ عَفْوِهِ وَصَفْحِهِ، فَإِنَّک فَوْقَهُمْ، وَوَالِى الْاَمْرِ عَلَيک فَوْقَک، وَاللهُ فَوْقَ مَنْ وَلاَّک! وَقَدِ اسْتَكْفَاک أَمْرَهُمْ، وَابْتَلاَک بِهِمْ.

Artinya: "*Tanamkan dalam hatimu rasa kasih sayang, cinta dan kelembutan budi pekerti pada rakyat. Jangan sampai kaujadikan dirimu laksana binatang buas yang bersiap memangsa mereka. Mereka itu sesungguhnya hanya satu di antara dua: saudaramu dalam seagama atau serupamu sebagai sesama makhluk. Kadang-kadang mereka tergelincir dalam kesalahan dan tergoda oleh pelanggaran, sehingga timbul*

[56] Al-Islam, *Imam Ali's Letter to Mālik al-Ashtar: The Richest Treasure*, The Research Treasure, https://www.al-islam.org/richest-treasure-imam-ali/imam-alis-letter-malik-al-ashtar-richest-treasure diakses pada tanggal 25 Agustus 2024.

akibat perbuatan tangan mereka, baik sengaja atau tidak, (suatu kejahatan). Oleh sebab itu, berilah maaf dan ampunanmu pada mereka sedapat mungkin, sebagaimana juga engkau mengharapkannya dari Tuhanmu. Engkau berada di atas mereka; pemimpin yang mengangkatmu berada diatasmu; dan Allah swt berada di atas orang yang telah mengangkatmu! Sungguh, Allah telah menugaskan kepadamu penyelesaian urusan mereka, dan Dia mengujimu dengan mereka".[57]

Surat ini menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk memperhatikan kebutuhan rakyatnya, terutama mereka yang kurang mampu atau terpinggirkan. ʻAlī bin Abī Ṭālib menginstruksikan Mālik al-Ashtar untuk menjaga kesejahteraan rakyat, menghindari penindasan, dan selalu berusaha untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. ʻAlī bin Abī Ṭālib juga mengingatkan bahwa kesejahteraan dan keamanan rakyat adalah tanggung jawab utama seorang pemimpin.

3. Perlakuan yang Adil terhadap Semua Orang.

ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَذَوِى الصِّنَاعَاتِ، وَأَوْصِ بِهِمْ خَيراً: الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ، وَالْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ، وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ وَجُلاَّبُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَالْمَطَارِحِ، فِى بَرِّک وَبَحْرِک، وَسَهْلِک وَجَبَلِک، وَحَيثُ لايلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا، وَلاَ يجْتَرِءُونَ عَلَيهَا، فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لاتُخَافُ بَائِقَتُهُ، وَصُلْحٌ لاتُخْشَى غَائِلَتُهُ. وَتَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِک وَفِى حَوَاشِى بِلاَدِک

Artinya: "*Perhatikan dan perlakukan dengan baik para pedagang dan ahli pertukangan. Yaitu mereka yang tetap berusaha di tempatnya atau yang berpindah-pindah dengan hartanya, ataupun yang berpenghasilan dengan tenaganya. Dengan merekalah tersedia bahan-bahan kebutuhan rakyat dan barang-barang keperluan sehari-hari. Dan merekalah yang menghadirkannya dari tempat-tempat jauh dan pusat-pusatnya di darat, di laut, di kota dn di pegunungan, yang kebanyakan rakyat tidak dapat mencapainya ataupun tidak berani pergi ke sana*".[58]

ʻAlī bin Abī Ṭālib menggarisbawahi pentingnya memperlakukan semua orang dengan adil, tanpa memandang agama, suku, atau status sosial. Seorang pemimpin harus menghormati hak-hak setiap individu dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. ʻAlī bin Abī Ṭālib juga menekankan pentingnya memperlakukan para bawahan dengan baik dan memberikan mereka hak-hak yang layak.

---

[57] Al-Islam, *Imam Ali's Letter to Mālik al-Ashtar: The Richest Treasure*, The Research Treasure, https://www.al-islam.org/richest-treasure-imam-ali/imam-alis-letter-malik-al-ashtar-richest-treasure diakses pada tanggal 25 Agustus 2024.

[58] Al-Islam, *Imam Ali's Letter to Mālik al-Ashtar: The Richest Treasure*, The Research Treasure, https://www.al-islam.org/richest-treasure-imam-ali/imam-alis-letter-malik-al-ashtar-richest-treasure diakses pada tanggal 25 Agustus 2024.

4. Kewajiban terhadap Allah dan Akhirat

اللهَ اللهَ فِى الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لاحِيلَةَ لَهُمْ، مِنَ الْمَسَاكِينِ وَالْمُحْتَاجِينَ وَأَهْلِ الْبُؤْسَى وَالزَّمْنَى، فَإِنَّ فِى هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعاً وَمُعْتَرّاً، وَاحْفَظِ لِلَّهِ مَا اسْتَحْفَظَکَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ، وَاجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيتِ مَالِک، وَقِسْماً مِنْ غَلاَّتِ صَوَافِى الْاِسْلاَمِ فِى كلِّ بَلَد، فَإِنَّ لِلْاَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِى لِلْاَدْنَى، وَكلٌّ قَدِ اسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ; وَلاَ يشْغَلَنَّک عَنْهُمْ بَطَرٌ، فَإِنَّک لاتُعْذَرُ بِتَضْيِيعِک التَّافِهَ لِاِحْكَامِک الْكثِيرَ الْمُهِمَّ. فَلاَ تُشْخِصْ هَمَّک عَنْهُمْ، وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّک لَهُمْ، وَتَفَقَّدْ أُمُورَ مَنْ لايصِلُ إِلَيک مِنْهُمْ مِمَّنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُيونُ، وَتَحْقِرُهُ الرِّجَالُ; فَفَرِّغْ لاُِولَئِک ثِقَتَک مِنْ أَهْلِ الْخَشْيةِ وَالتَّوَاضُعِ، فَلْيرْفَعْ إِلَيک أُمُورَهُمْ، ثُمَّ اعْمَلْ فِيهِمْ بِالْاِعْذَارِ إِلَى اللهِ يوْمَ تَلْقَاهُ، فَإِنَّ هَؤُلاَءِ مِنْ بَينِ الرَّعِيةِ أَحْوَجُ إِلَى الْاِنْصَافِ مِنْ غَيرِهِمْ. وَكلٌّ فَأَعْذِرْ إِلَى اللهِ فِى تَأْدِيةِ حَقِّهِ إِلَيهِ. وَتَعَهَّدْ أَهْلَ الْيتْمِ وَذَوِى الرِّقَّةِ فِى السِّنِّ مِمَّنْ لاحِيلَةَ لَهُ وَلاَ ينْصِبُ لِلْمَسْأَلَةِ نَفْسَهُ، وَذَلِک عَلَى الْوُلاَةِ ثَقِيلٌ، وَالْحَقُّ كلُّهُ ثَقِيلٌ; وَقَدْ يخَفِّفُهُ اللهُ عَلَى أَقْوَام طَلَبُوا الْعَاقِبَةَ فَصَبَّرُوا أَنْفُسَهُمْ، وَوَثِقُوا بِصِدْقِ مَوْعُودِ اللهِ لَهُمْ.

Artinya: " *Ingatlah Allah dan ingatlah Allah selalu dalam perlakuanmu terhadap rakyatmu yang berada di tingkat terbawah. Terutama mereka yang lemah tak berdaya, kau fakir-miskin dan mereka yang dipaksa oleh kebutuhan, orang-orang sengsara dan penderita cacat. Termasuk dalam kelompok ini, mereka yang meminta-minta dan yang selalu mengharapkan pemberian. Ingatlah Allah dan ingatlah selalu orang-orang seperti itu yang dititipkan-Nya kepadamu! Berilah mereka bagian dari Bayt Al-Mal serta bagian dari rampasan perang dan hasil tanah di seluruh penjuru negeri. Semua mereka, yang dekat maupun yang jauh, telah ditetapkan untuknya bagiannya dan diperhatikan kepentingannya. Jangan sekali-kali kau disibukkan oleh kemewahan sehingga melalaikan mereka. Dan jangan beranggapan bahwa kau tidak akan dituntut akibat melalaikan yang remeh semata-mata disebabkan kau telah menyempurnakan berbagai urusan yang besar lagi penting. Curahkanlah perhatianmu kepada mereka dan jangan sekali-kali kau palingkan wajah-mu dari mereka. Telitilah juga hal-ihwal orang-orang yang tidak dapat mencapaimu disebabkan kehinaan mereka di mata orang banyak. Tugaskanlah beberapa orang kepercayaanmu –yang bersahaja dan tawadhu'–untuk meneliti keadaan orang-orang itu. Kemudian penuhilah kewajibanmu terhadap mereka sehingga kau dapat mempertanggungjawabkannya kelak, pada saat perjumpaanmu dengan Allaw swt. Mereka itu adalah bagian dari rakyatmu yang paling mendambakan kesadaranmu untuk kau penuhi haknya lebih dari yang lain. Betapapun juga, bebaskanlah dirimu*

dari tuntutan Allah dengan memberikan kepada setiap orang haknya yang ditetapkan Allah baginya. Perhatikan baik-baik semua anak yatim dan orang lanjut usia, serta orang-orang lemah yang tak berdaya sementara hatinya tidak mengizinkannya untuk mengemis meminta-minta. Tugas seperti ini adalah sesuatu yang berat bagi para penguasa, namun kebenaran memang berat semuanya. Meskipun Allah akan meringankannya juga bagi mereka yang mencari keuntungan di Hari Akhir lalu mereka menyabarkan diri mereka sendiri, dan yakin akan kebenaran janji Allah bagi mereka".[59]

'Alī bin Abī Ṭālib mengingatkan Mālik al-Ashtar bahwa semua tindakan seorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip keagamaan dalam menjalankan tugas-tugasnya. 'Alī bin Abī Ṭālib menekankan bahwa seorang pemimpin tidak boleh mengabaikan kewajiban agamanya atau membiarkan kesenangan duniawi mengalihkan perhatiannya dari tanggung jawab yang lebih besar terhadap akhirat.

5. Pengelolaan Administrasi dan Keadilan dalam Penunjukan Pejabat

مَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَينَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيتِک فِی نَفْسِک، مِمَّنْ لاتَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ، وَلاَ تُمَحِّكهُ الْخُصُومُ، وَلاَ يتَمَادَى فِی الزَّلَّةِ، وَلاَ يحْصَرُ مِنَ الْفَیءِ إِلَی الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ، وَلاَ تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَی طَمَع، وَلاَ يكْتَفِی بِأَدْنَی فَهْم دُونَ أَقْصَاهُ; وَأَوْقَفَهُمْ فِی الشُّبُهَاتِ، وَآخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ، وَأَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ، وَأَصْبَرَهُمْ عَلَی تَكشُّفِ الْأُمُورِ، وَأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ، مِمَّنْ لايزْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ. وَلاَ يسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ وَأُولَئِک قَلِيلٌ، ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ، وَافْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ مَا يزِيلُ عِلَّتَهُ، وَتَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَی النَّاسِ. وَأَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيک مَا لايطْمَعُ فِيهِ غَيرُهُ مِنْ خَاصَّتِک، لِيأْمَنَ بِذَلِک اغْتِيالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَک. فَانْظُرْ فِی ذَلِک نَظَراً بَلِيغاً، فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كانَ أَسِيراً فِی أَيدِی الْأَشْرَارِ، يعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَی، وَتُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيا.

Artinya: *Kemudian pilihlah untuk jabatan sebagai hakim orang-orang yang paling utama di antara rakyatmu, yang luas pengetahuannya dan tidak mudah dibangkitkan emosinya oleh lawannya. Tidak berkeras kepala dalam kekeliruan dan tidak segan kembali kepada kebenaran bila telah mengetahuinya. Tidak tergiur hatinya ketamakan. Tidak merasa cukup dengan pemahaman yang hanya di permukaan saja,*

[59] Al-Islam, *Imam Ali's Letter to Mālik al-Ashtar: The Richest Treasure*, The Research Treasure, https://www.al-islam.org/richest-treasure-imam-ali/imam-alis-letter-malik-al-ashtar-richest-treasure diakses pada tanggal 25 Agustus 2024.

tetapi ia berusaha memahami sesuatu sedalam-dalamnya. Mereka yang paling segera berhenti, karena berhati-hati, bila berhadapan dengan keraguan. Yang paling bersedia menerima argumen-argumen yang benar dan yang paling sedikit rasa kesalnya bila didebat oleh lawan. Yang paling sabar menyelidiki semua urusan dan yang paling tegas setelah beroleh kejelasan tentang penyelesaiannya. Yang tidak menjadi congkak bila dipuji dan tidak terpengaruh oleh segala macam bujuk rayu. Sungguh orang seperti itu amat sedikit jumlahnya. Oleh sebab itu, sering-seringlah mengikuti serta menyelidiki keputusan-keputusan yang dibuatnya. Berilah ia kecukupan penghasilan sehingga meliputi keperluan hidupnya dan hanya sedikit saja kebutuhannya pada manusia lainnya. Berilah ia kedudukan terhormat di sisimu sehingga mencegah siapa saja di antara orang-orang yang dekat kepadamu daripada bersikap tidak wajar kepadanya, dan agar ia merasa aman bahwa tidak seorang pun akan berhasil memfitnahnya di hadapanmu. Perhatikan hal ini dengan saksama, sebab agama ini, beberapa waktu yang lalu, telah menjadi tawanan sekelompok orang-orang jahat, digunakan sebagai pelampias hawa nafsu dan diperalat guna mencapai keuntungan duniawi.[60]

'Alī bin Abī Ṭālib memberikan panduan tentang bagaimana seorang pemimpin harus memilih dan menugaskan pejabat-pejabat di bawahnya. Dia menekankan pentingnya memilih orang-orang yang kompeten, jujur, dan adil untuk mengisi posisi-posisi penting dalam pemerintahan. 'Alī bin Abī Ṭālib juga mengingatkan bahwa pejabat-pejabat yang tidak kompeten atau korup akan merusak pemerintahan dan menyebabkan ketidakadilan serta ketidakstabilan.

6. Hubungan dengan Kaum Muslim dan Non-Muslim

وَلاَ تَنْصِبَنَّ نَفْسَک، لِحَرْبِ اللهِ فَإِنَّهُ لايدَ لَک بِنِقْمَتِهِ، وَلاَ غِنَى بِک عَنْ عَفْوِهِ وَرَحْمَتِهِ.

Artinya: "*Maka jangan kau angkat dirimu sebagai musuh yang memerangi-Nya. Sebab kau tak memiliki sedikit pun kekuatan menangkal siksa-Nya, dan kau pun pasti membutuhkan ampunan dan rahmat-Nya.*"[61]

'Alī bin Abī Ṭālib menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan semua anggota masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim. Dia menginstruksikan Mālik al-Ashtar untuk menghormati hak-hak mereka, memastikan perlindungan bagi mereka, dan memberikan mereka kebebasan untuk menjalankan

[60] Al-Islam, *Imam Ali's Letter to Mālik al-Ashtar: The Richest Treasure*, The Research Treasure, https://www.al-islam.org/richest-treasure-imam-ali/imam-alis-letter-malik-al-ashtar-richest-treasure diakses pada tanggal 25 Agustus 2024.

[61] Al-Islam, *Imam Ali's Letter to Mālik al-Ashtar: The Richest Treasure*, The Research Treasure, https://www.al-islam.org/richest-treasure-imam-ali/imam-alis-letter-malik-al-ashtar-richest-treasure diakses pada tanggal 25 Agustus 2024.

keyakinan agama mereka. ‘Alī bin Abī Ṭālib juga memperingatkan Mālik al-Ashtar agar tidak membiarkan prasangka atau diskriminasi merusak hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Secara keseluruhan, kandungan surat politik ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar menggambarkan pandangan yang sangat komprehensif tentang bagaimana pemerintahan yang ideal seharusnya dijalankan dalam Islam. Surat ini tidak hanya menekankan pentingnya keadilan, kebijaksanaan, dan belas kasih dalam kepemimpinan, tetapi juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana seorang pemimpin harus berinteraksi dengan rakyatnya, menjaga integritas, dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan penuh tanggung jawab. Surat ini tetap menjadi salah satu dokumen paling penting dalam sejarah politik Islam dan terus menjadi sumber inspirasi bagi banyak pemimpin dan cendekiawan Muslim di seluruh dunia.

BAB III
PANDANGAN POLITIK ‘ALĪ BIN ABĪ ṬĀLIB TERKAIT KEKUASAAN, KEBEBASAN, DAN KEADILAN

‘Alī bin Abī Ṭālib merupakan tokoh besar Islam, jasanya terhadap agama tidak dapat disangkal oleh siapapun, dialah yang telah melindungi Nabi Muhammad dari maksud buruk orang-orang kafir Mekkah yang hendak membunuhnya, saat ia memutuskan untuk hijrah ke Madinah pada tahun ke-13 kenabian. ‘Alī bin Abī Ṭālib pulalah yang paling berjasa dibanding sahabat-sahabat lain dalam menghalau kafir Mekkah pada banyak peperangan terhadap kaum Muslim. Ia bahkan berhasil memimpin kaum Muslim mengalahkan orang-orang musyrik, dimana puncaknya adalah pembebasan Kota Mekkah.

Disisi lain, ‘Alī bin Abī Ṭālib adalah sahabat Nabi yang memiliki ilmu dan pengetahun yang sangat luas, bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālib adalah gerbang dari kota ilmu Nabi Muhammad. ‘Alī bin Abī Ṭālib juga adalah sosok yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad, dan dipilih oleh Nabi sebagai menantu dengan menikahkannya pada putrinya, Fatimah Az-Zahra. Kedudukan yang mulia dan tinggi ini membuat kaum Muslimin dan khususnya para sahabat Nabi menaruh penghormatan yang sangat besar kepada Ali bi Abi Thalib. Di kalangan Syiah ‘Alī bin Abī Ṭālib bahkan diyakini sebagai orang yang dipilih Allah SWT sebagai pengganti Nabi, banyak hadis dan riwayat yang menyatakan hal tersebut. Namun karena terjadinya peristiwa Saqifah, beliau baru diangkat menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan terbunuh pada tahun 35 H.

Sebelum menjabat sebagai khalifah ke-4, ‘Alī bin Abī Ṭālib senantiasa dimintai pendapat dan saran terkait berbagai persoalan politik oleh ketiga khalifah sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālib adalah seorang yang piawai dalam persoalan politik. Dan ketika ‘Alī bin Abī Ṭālib memimpin khilafah dia berusaha melakukannya dengan sebaik-baiknya meskipun ia menyadari tantangan yang dihadapinya sangat berat. Ia harus berhadapan dengan situasi dan kondisi politik yang tidak stabil pasca terbunuhnya Utsman bin Affan. Namun demikian, Ali bi Abi Thalib dapat mengatasi berbagai tantangan, meski masih banyak masalah yang belum sempat diselesaikan.

Dalam kaitan ini penulis ingin membatasi pandangan-pandangan politik ‘Alī bin Abī Ṭālib pada 3 tema utama: kekuasaan, kebebasan, dan keadilan. Tema kekuasaan mencakup aspek-aspek dalam filsafat dan politiknya, di mana prinsip kebebasan dan keadilan menjadi dua elemen krusial dalam pelaksanaan dan penerapan kekuasaan.

A. ‘Alī bin Abī Ṭālib dan Kekuasaan

Untuk memahami pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang kekuasaan, selain merujuk kepada pernyataan-pernyataannya terkait politik, seseorang bisa menelusurinya melalui sikapnya terhadap masalah kekuasaan yang muncul sejak peristiwa politik pasca wafatnya Nabi Muhammad hingga akhir hayatnya. Namun, dalam tulisan ini, penulis akan membatasi pembahasan pada pandangan politik ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang kekuasaan sebagaimana tercermin dalam surat politiknya kepada Mālik al-Ashtar. Meski demikian, penulis tetap akan merujuk pada pandangan

atau sikap ‘Alī bin Abī Ṭālib terkait kekuasaan pada momen-momen tertentu yang relevan dengan tujuan penulisan ini.

Sikap ‘Alī bin Abī Ṭālib ini mencerminkan pandangannya bahwa kekuasaan adalah alat untuk melayani dan mengabdi kepada umat, bukan untuk kepentingan kekuasaan itu sendiri.[62] Pandangan ini sangat penting, karena cara seseorang memandang kekuasaan mencerminkan karakter pribadinya, sekaligus menunjukkan bagaimana ia akan mengelola dan menjalankan kekuasaan tersebut.

Bagi ‘Alī bin Abī Ṭālib, kekuasaan bukanlah sarana untuk mencari kemuliaan pribadi atau harta duniawi, melainkan sebuah amanah dari Allah yang harus dijalankan demi kepentingan umat. Ia memandang kekuasaan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, memperkuat prinsip-prinsip kebenaran, serta menjamin kesejahteraan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat. Dalam banyak khutbahnya, Ali menegaskan pentingnya mengelola kekuasaan dengan adil, transparan, dan penuh kasih sayang, sekaligus memperingatkan para pemimpin agar tidak menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. .[63]

Berdasarkan suratnya kepada Mālik al-Ashtar, ‘Alī bin Abī Ṭālib memberikan nasihat berharga kepada Mālik al-Ashtar yang akan memimpin wilayah Mesir. Ia menganjurkan Mālik al-Ashtar untuk belajar dari pengalaman para penguasa sebelumnya, dengan mengikuti teladan penguasa yang baik dan menghindari perilaku penguasa yang buruk. ‘Alī bin Abī Ṭālib menegaskan:

ثُمَّ اعْلَمْ يا مَالِک أَنِّی قَدْ وَجَّهْتُک إِلَی بِلاَد قَدْ جَرَتْ عَلَيهَا دُوَلٌ قَبْلَک، مِنْ عَدْل النَّاسَ يَنْظُرُونَ مِنْ أُمُورِک فِی مِثْلِ مَا كُنْتَ تَنْظُرُ فِيهِ مِنْ أُمُورِ الْوُلاَةِ قَبْلَک، وَجَوْر، وَأَنَّ وَيَقُولُونَ فِيک مَا كُنْتَ تَقُولُ فِيهِمْ، وَإِنَّمَا يسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحِينَ بِمَا يجْرِی اللهُ لَهُمْ عَلَى أَلْسُنِ عِبَادِهِ، فَلْيكُنْ أَحَبَّ الذَّخَائِرِ إِلَيک ذَخِيرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ،

Artinya: *“Ketahuilah wahai Mālik al-Ashtar, aku mengutusmu ke suatu negeri yang telah mengalami banyak pergantian pemerintahan, yang adil maupun yang zalim. Rakyat disana akan memandangmu sama seperti pandanganmu terhadap para penguasa sebelummu dan berbicara tentangmu seperti pembicaraanmu tentang mereka. Sesungguhnya bukti kebaikan orang-orang yang baik dapat disaksikan dari penilaian yang diucapkan oleh kebanyakan rakyat. Maka itu, hendaklah amal-amal saleh kau jadikan sebagai perbendaharaan yang paling kausukai.”*[64]

Dari pernyataan di atas, tampak bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālib menegaskan bahwa kekuasaan merupakan sarana yang memiliki potensi besar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya,

---

[62] Nilna Aldzakhiroh, dkk, *Political Dynamics of the Era of Ali Bin Abi Thalib (Contribution of the Political System in Islamic Civilization)*, Aldzakhiroh, Vol 7, No 2 (2024), hlm. 400-420.

[63] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 9-10.

[64] WikiShia, Teks:Surat Imam Ali kepada Mālik al-Ashtar, https://id.wikishia.net/view/Teks:Surat_Imam_Ali_kepada_Malik_al-Ashtar, diakses pada 31 Oktober 2024 Pukul 18:04 WIB

‘Alī bin Abī Ṭālib mengingatkan bahwa seorang penguasa harus menghindari penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Dalam surat politiknya, ‘Alī bin Abī Ṭālib menyatakan:

فَامْلِكْ هَوَاکَ، وَشُحَّ بِنَفْسِکَ عَمَّا لايَحِلُّ لَکَ، فَإِنَّ الشُّحَّ بِالنَّفْسِ الْإِنْصَافُ مِنْهَا فِيمَا أَحَبَّتْ أَوْ كرِهَتْ.

Artinya: *“Untuk itu, kuasailah hawa nafsumu dan tahan dirimu dari segala yang tidak dihalalkan bagimu. Menahan diri adalah bersikap adil pada diri sendiri, baik dalam hal yang kau sukai ataupun kau benci.”*[65]

‘Alī bin Abī Ṭālib memandang kekuasaan sebagai beban yang berat, dan ia tidak pernah mencarinya secara aktif. Bahkan, ketika umat Muslim di Madinah menawarkan kepadanya untuk menjadi khalifah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Ali awalnya enggan menerima jabatan tersebut dan menyarankan kepada masyarakat Madinah untuk memilih pemimpin lain. Namun, karena tidak ada alternatif yang tersedia, Ali akhirnya menerima tanggung jawab tersebut dengan tekad untuk menjalankan amanah itu sebaik-baiknya. Dalam pandangannya, kekuasaan adalah amanah dari Allah SWT yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Terkait dengan hal tersebut, ‘Alī bin Abī Ṭālib mengingatkan para penguasa agar tidak merasa sombong atau besar diri, karena kebesaran sejati hanya milik Allah SWT. Seorang penguasa harus bersikap rendah hati. ‘Alī bin Abī Ṭālib menegaskan:

وَإِذَا أَحْدَثَ لَکَ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ سُلْطَانِکَ أُبَّهَةً أَوْ مَخِيلَةً، فَانْظُرْ إِلَى عِظَمِ مُلْکِ اللهِ فَوْقَکَ، وَقُدْرَتِهِ مِنْکَ عَلَى مَا لاتَقْدِرُ عَلَيهِ مِنْ نَفْسِکَ، فَإِنَّ ذَلِکَ يطَامِنُ إِلَيکَ مِنْ طِمَاحِکَ، وَيکفُّ عَنْکَ مِنْ غَرْبِکَ، وَيفِيءُ إِلَيکَ بِمَا عَزَبَ عَنْکَ مِنْ عَقْلِکَ! إِياکَ وَمُسَامَاةَ اللهِ فِی عَظَمَتِهِ، وَالتَّشَبُّهَ بِهِ فِی جَبَرُوتِهِ، فَإِنَّ اللهَ يذِلُّ كلَّ جَبَّارٍ، وَيهِينُ كلَّ مُخْتَالٍ.

Artinya: *“Bila kekuasaanmu menyebabkan tumbuhnya keangkuhan dan kebanggaan diri, maka alihkanlah pikiranmu ke arah agungnya kerajaan Allah di atasmu dan kuasa-Nya terhadap dirimu sendiri. Cara itu dapat mengurangi kepongahanmu, menahan kekasaran hatimu dan mengembalikan akal sehat yang nyaris menjauhimu. Awas, jangan coba-coba menyaingi Allah dalam keagungan-Nya atau menyerupai-Nya dalam keperkasaan-Nya. Karena Allah swt niscaya menghinakan siapa saja yang congkak dan meremehkan siapa saja yang bangga diri.”*[66]

‘Alī bin Abī Ṭālib mempertegas pandangannya tentang etika kepemimpinan dalam Islam dengan memberikan panduan yang sangat rinci kepada Mālik al-Ashtar,

---

[65] WikiShia, Teks: Surat Imam Ali kepada Mālik al-Ashtar, https://id.wikishia.net/view/Teks:Surat_Imam_Ali_kepada_Malik_al-Ashtar, diakses pada 31 Oktober 2024 Pukul 18:04 WIB

[66] WikiShia, Teks: Surat Imam Ali kepada Ma<lik al-Ashtar, https://id.wikishia.net/view/Teks:Surat_Imam_Ali_kepada_Malik_al-Ashtar, diakses pada 31 Oktober 2024 Pukul 18:04 WIB

yang menggambarkan visinya tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya menjalankan kekuasaannya. Kekuasaan harus digunakan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, menegakkan keadilan tanpa memandang status sosial, dan memperlakukan semua orang dengan martabat yang sama. Selain itu, Ali memberikan instruksi jelas mengenai pentingnya memprioritaskan rakyat kecil dan memastikan mereka tidak tertindas oleh kaum elit atau individuyang berada dalam posisi berkuasa. Ia juga menekankan bahwa seorang pemimpin harus bersikap adil, tidak mudah tergoda oleh kekayaan, dan selalu siap mendengarkan keluhan rakyat.[67]

Selain itu, terdapat banyak nasihat moral dalam surat tersebut yang sangat relevan bagi setiap pemimpin, seperti peringatan Ali agar Mālik al-Ashtar tidak merasa lebih unggul dari rakyat yang dipimpinnya, meskipun ia memegang kekuasaan yang besar. Ali juga menekankan pentingnya membangun rasa empati dan pemahaman terhadap kebutuhan rakyat, serta menjadikan keadilan sebagai pedoman utama dalam setiap keputusan. Ia memberikan instruksi agar Mālik al-Ashtar menjaga kebebasan beragama dan melindungi kelompok minoritas, menunjukkan betapa inklusif dan humanisnya pandangan politik Ali.

Menurut Ali, seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, menghormati hak-hak orang lain, dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Ia memperingatkan Mālik al-Ashtar agar tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau harta benda, menekankan bahwa kekuasaan adalah ujian dari Allah, dan pemimpin harus waspada terhadap godaan untuk menyalahgunakannya. Ali juga mengingatkan bahwa kematian adalah kepastian yang tidak dapat dihindari, dan semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya di hadapan Allah pada hari kiamat. Baginya, pemerintahan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.[68]

Salah satu contoh nyata bagaimana ʻAlī bin Abī Ṭālib menjalankan pemerintahannya sesuai dengan pandangan politiknya dapat dilihat dalam peristiwa ketika ia mengambil alih kekhalifahan. Setelah memegang tampuk kekuasaan, Ali menghadapi situasi yang sangat sulit, termasuk adanya pemberontakan dan perpecahan di kalangan umat Muslim. Meskipun demikian, Ali tetap konsisten dengan prinsip-prinsip keadilannya. Ketika banyak elit politik dan keluarga besar Utsman menuntut pembalasan terhadap mereka yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, Ali menolak untuk bertindak secara emosional atau membabi buta. Ia menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan melalui proses hukum yang adil, bukan berdasarkan balas dendam atau tekanan politik.[69]

1. Reformasi dan Pembangunan

---

[67] Muhammad Anis, M. (2016). Perkembangan Politik Masa Al-Khulafa Al-Rasyidun. Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan, 8(1), 52–72. https://doi.org/10.47435/al-qalam.v8i1.204

[68] Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Gaya Media Pratama), 2007, h. 22.

[69] Muhammad Anis, M. (2016). Perkembangan Politik Masa Al-Khulafa Al-Rasyidun. Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan, 8(1), 52–72. https://doi.org/10.47435/al-qalam.v8i1.204. h.99.

‘Alī bin Abī Ṭālib sangat memahami bahwa pemerintahan yang efektif harus selalu berorientasi pada reformasi dan pembangunan. Ia mendorong Mālik al-Ashtar untuk terus melakukan perbaikan dalam segala aspek pemerintahan, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik, dalam suratnya ia berwasiat:

وَلْيكنْ نَظرُك فِى عِمَارَةِ الْاَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظرِك فِى اسْتِجْلاَبِ الْخَرَاجِ، لاَنَّ ذَلِک لايدْرَک إِلاَّ بِالْعِمَارَةِ

Artinya: " *Hendaknya usahamu dalam memajukan pertanian lebih besar daripada usahamu dalam menambah kharaj. Sebab, penambahan pendapatan negara tak akan tercapai kecuali dengan pembangunan pertanian".* Dalam hal pembangunan ekonomi, ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan pentingnya mengembangkan sektor pertanian dan memastikan bahwa petani mendapatkan perlindungan dan dukungan dari pemerintah. Ia juga mendorong pengembangan industri dan perdagangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. ‘Alī bin Abī Ṭālib percaya bahwa kesejahteraan ekonomi adalah salah satu faktor utama yang menentukan stabilitas dan efektivitas pemerintahan.[70]

2. Kepemimpinan yang Berakhlak

‘Alī bin Abī Ṭālib mengakhiri suratnya dengan menekankan pentingnya kepemimpinan yang berakhlak. Ia mengingatkan Mālik al-Ashtar bahwa seorang pemimpin harus selalumenjaga integritas dan moralitas dalam setiap tindakannya. ‘Alī bin Abī Ṭālib menulis sebagai berikut:

وَلاَ تَنْدَمَنَّ عَلَى عَفْو، وَلاَ تَبْجَحَنَّ بِعُقُوبَة، وَلاَ تُسْرِعَنَّ إِلَى بَادِرَة وَجَدْتَ مِنْهَا مَنْدُوحَةً، وَلاَ تَقُولَنَّ: إِنِّى مُؤَمَّرٌ آمُرُ فَأُطَاعُ، فَإِنَّ ذَلِک إِدْغَالٌ فِى الْقَلْبِ، وَمَنْهَكَةٌ لِلدِّينِ، وَتَقَرُّبٌ مِنَ الْغِيرِ. وَإِذَا أَحْدَثَ لَک مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ سُلْطَانِک أُبَّهَةً أَوْ مَخِيلَةً، فَانْظُرْ إِلَى عِظَمِ مُلْک اللهِ فَوْقَک، وَقُدْرَتِهِ مِنْک عَلَى مَا لاتَقْدِرُ عَلَيهِ مِنْ نَفْسِک، فَإِنَّ ذَلِک يطَامِنُ إِلَيک مِنْ طِمَاحِک، وَيکفُّ عَنْک مِنْ غَرْبِک، وَيفِيءُ إِلَيک بِمَا عَزَبَ عَنْک مِنْ عَقْلِک!

Artinya: " *Jangan menyesali ampunan yang kauberikan, dan jangan girang menjatuhkan hukuman. Jangan bergegas marah selagi masih ada jalah keluar yang lapang. Jangan berkata: "Aku telah memberi perintah, maka taatilah aku."Sebab, hal itu merusak hati, melemahkan agama dan menghancurkan pemerintahan. Bila kekuasaanmu menyebabkan tumbuhnya keangkuhan dan kebanggaan diri, maka alihkanlah pikiranmu ke arah agungnya kerajaan Allah di atasmu dan kuasa-Nya terhadap dirimu sendiri. Cara itu dapat mengurangi kepongahanmu, menahan*

[70] Sjechul Hadi Purnomo. *Islam dalam Lintas Sejarah Perpolitikan. (teori dan praktik).* (CV. Aulia. Surabaya). 2004. H.1

kekasaran hatimu dan mengembalikan akal sehat yang nyaris menjauhimu."[71] ‘Alī bin Abī Ṭālib juga menegaskan kembali bahwa seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi rakyatnya. Ia harus menunjukkan sifat-sifat yang terpuji, seperti kejujuran, kesederhanaan, dan kebijaksanaan. ‘Alī bin Abī Ṭālib percaya bahwa seorang pemimpin yang berakhlak akan mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari rakyatnya, yang pada akhirnya akan menghasilkan pemerintahan yang efektif dan stabil.

Pencerminan kebaikan akhlak pada masa kepemimpinan ‘Alī bin Abī Ṭālib ini juga tercermin pada himbauannya untuk menjauhi rasa dengki dan mencari-cari kekurangan rakyat, sebagaimana didalam suratnya kepada Imam Mālik al-Ashtar yang berbunyi:

وَلْيكنْ أَبْعَدَ رَعِيتِک مِنْک، وَأَشْنَأَهُمْ عِنْدک، أَطْلَبُهُمْ لِمَعَائِبِ النَّاسِ; فَإِنَّ فِی النَّاسِ عُيوباً، الْوَالِی أَحَقُّ مَنْ سَتَرَهَا، فَلاَ تَكْشِفَنَّ عَمَّا غَابَ عَنْک مِنْهَا، فَإِنَّمَا عَلَيک تَطْهِيرُ مَا ظَهَرَ لَک، وَاللهُ يحْكمُ عَلَی مَا غَابَ عَنْک، فَاسْتُرِ الْعَوْرَةَ مَا اسْتَطَعْتَ يسْتُرِ اللهُ مِنْک مَا تُحِبُّ سَتْرَهُ مِنْ رَعِيتِک. أَطْلِقْ عَنِ النَّاسِ عُقْدَةَ كلِّ حِقْد، وَاقْطَعْ عَنْک سَبَبَ كلِّ وِتْر، وَتَغَابَ عَنْ كلِّ مَا لايضِحُ لَک، وَلاَ تَعْجَلَنَّ إِلَی تَصْدِيقِ سَاع فَإِنَّ السَّاعِی غَاشٌّ، وَإِنْ تَشَبَّهَ بِالنَّاصِحِينَ.

Artinya: “*Adapun kelompok yang seharusnya paling kaujauhi dan kaubenci adalah orang-orang yang paling suka mengamati kekurangan-kekurangan rakyat. Seorang wali lebih patut menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada rakyatnya. Maka jangan pernah membongkar apa yang tidak tampak bagimu, bahkan seharusnya kau putihkan yang sudah jelas tampak bagimu. Allah kelak yang akan memutuskan apa yang tidak tampak bagimu. Maka rahasiakanlah aurat publik (orang lain) sedapat mungkin, niscaya Allah juga akan menutup aurat yang kau tidak ingin diketahui oleh rakyatmu. Bebaskan publik dari penyakit kedengkian dan pangkaslah pemicu permusuhan dari mereka (dengan bergaul sedekat mungkin dengan mereka). Cemehkan hal yang tidak terlihat olehmu, dan jangan tergesa-gesa mempercayai penuduh, sebab orang seperti itu adalah penipu meskipun ia berpura-pura sebagai penasihat yang tulus*”.[72]

3. Penentuan Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan

Nasihat yang disampaikan ‘Alī bin Abī Ṭālib juga mencerminkan panduan atau nasihat moral untuk memilih hakim yang ideal dalam menjalankan tugas peradilan. Surat tersebut menggambarkan kualitas pribadi, intelektual, dan moral yang harus dimiliki seorang hakim untuk memastikan keadilan ditegakkan secara adil dan bebas dari pengaruh buruk. Beberapa poin utama yang dicerminkan adalah:

---

[71] Fera, R. D., *Ketentuan Fiqh Siyāsah Terhadap Perbuatan Tercela Sebagai Syarat Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daera*h. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020, hlm. 88.

[72] Fera, R. D., *Ketentuan Fiqh… Ibid.*, hlm. 90.

a. Karakter dan Integritas. Hakim harus memiliki integritas tinggi, tidak mudah terpengaruh emosi, tidak tamak, dan tidak keras kepala. Mampu kembali pada kebenaran jika terbukti salah dan berhati-hati dalam mengambil keputusan;
b. Kapasitas Intelektual. Hakim harus memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan untuk memahami persoalan secara mendalam. Tidak puas dengan pemahaman yang dangkal dan terbuka terhadap argumen yang benar;
c. Sikap Profesional. Mampu bersikap sabar dalam menyelidiki kasus dan mengambil keputusan dengan tegas setelah memperoleh kejelasan. Tidak mudah tergoda oleh pujian atau bujuk rayu;
d. Kebutuhan Material dan Kedudukan. Hakim perlu diberikan penghasilan yang mencukupi agar tidak tergoda oleh tekanan ekonomi. Diberikan penghormatan dan perlindungan dari fitnah atau pengaruh buruk pihak luar;
e. Perlindungan Terhadap Sistem Hukum. Menunjukkan keprihatinan bahwa agama dan hukum pernah disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tidak bermoral untuk kepentingan pribadi, sehingga diperlukan hakim yang benar-benar adil untuk mencegah hal ini.

Sebagaimana yang diuraikan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib didalam suratnya yang menyatakan bahwa:

ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيتِک فِی نَفْسِک، مِمَّنْ لاتَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ، وَلاَ تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ، وَلاَ يتَمَادَى فِی الزَّلَّةِ، وَلاَ يحْصَرُ مِنَ الْفَیءِ إِلَی الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ، وَلاَ تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَی طَمَع، وَلاَ يكْتَفِی بِأَدْنَی فَهْم دُونَ أَقْصَاهُ; وَأَوْقَفَهُمْ فِی الشُّبُهَاتِ، وَآخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ، وَأَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ، وَأَصْبَرَهُمْ عَلَی تَكشُّفِ الْأُمُورِ، وَأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ، مِمَّنْ لايزْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ. وَلاَ يسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ وَأُولَئِک قَلِيلٌ، ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ، وَافْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ مَا يزِيلُ عِلَّتَهُ، وَتَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَی النَّاسِ. وَأَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيک مَا لايطْمَعُ فِيهِ غَيرُهُ مِنْ خَاصَّتِک، لِيأْمَنَ بِذَلِک اغْتِيالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَک. فَانْظُرْ فِی ذَلِک نَظَراً بَلِيغاً، فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كانَ أَسِيراً فِی أَيدِی الْأَشْرَارِ، يعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَی، وَتُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيا.

Artinya:”*Kemudian pilihlah untuk jabatan sebagai hakim orang-orang yang paling utama di antara rakyatmu, yang luas pengetahuannya dan tidak mudah dibangkitkan emosinya oleh lawannya. Tidak berkeras kepala dalam kekeliruan dan tidak segan kembali kepada kebenaran bila telah mengetahuinya. Tidak tergiur hatinya ketamakan. Tidak merasa cukup dengan pemahaman yang hanya di permukaan saja, tetapi ia berusaha memahami sesuatu sedalam-dalamnya. Mereka yang paling segera berhenti, karena berhati-hati, bila berhadapan dengan keraguan. Yang paling bersedia menerima argumen-argumen yang benar dan yang paling sedikit rasa kesalnya bila didebat oleh lawan. Yang paling sabar menyelidiki semua urusan dan yang paling tegas setelah beroleh kejelasan tentang penyelesaiannya. Yang tidak menjadi congkak bila dipuji dan tidak terpengaruh*

oleh segala macam bujuk rayu. Sungguh orang seperti itu amat sedikit jumlahnya. Oleh sebab itu, sering-seringlah mengikuti serta menyelidiki keputusan-keputusan yang dibuatnya. Berilah ia kecukupan penghasilan sehingga meliputi keperluan hidupnya dan hanya sedikit saja kebutuhannya pada manusia lainnya. Berilah ia kedudukan terhormat di sisimu sehingga mencegah siapa saja di antara orang-orang yang dekat kepadamu daripada bersikap tidak wajar kepadanya, dan agar ia merasa aman bahwa tidak seorang pun akan berhasil memfitnahnya di hadapanmu. Perhatikan hal ini dengan saksama, sebab agama ini, beberapa waktu yang lalu, telah menjadi tawanan sekelompok orang-orang jahat, digunakan sebagai pelampias hawa nafsu dan diperalat guna mencapai keuntungan duniawi."[73]

4. Penegakkan Prinsip Selektivitas serta Kehati-hatian dalam Kekuasaan

'Alī bin Abī Ṭālib juga memandang bahwa kekuasaan pemimpin juga harus didukung dengan parlemen yang sehat untuk itu, Sebelum mempercayakan suatu jabatan, seseorang harus diuji kemampuannya, kredibilitasnya, dan kejujurannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang dipilih benar-benar layak dan mampu menjalankan tanggung jawabnya.

Jabatan tidak boleh diberikan hanya untuk menyenangkan hati individu tertentu atau untuk memenuhi kepentingan pribadi. Penunjukan semacam ini tidak berdasarkan kelayakan, tetapi pada hubungan pribadi, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam kekuasaan pemerintah yang cenderung mengintervensi. Jika jabatan diisi oleh orang yang tidak cakap atau tidak layak, hal ini akan membuka peluang terjadinya kezaliman (penyalahgunaan wewenang) dan pengkhianatan terhadap tanggung jawab yang diamanahkan. Pesan yang disampaikan oleh 'Alī bin Abī Ṭālib ini mencerminkan prinsip *good governance* yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan meritokrasi dalam sistem manajemen atau pemerintahan. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, adil, dan bebas dari korupsi.

Adapu bunyi nasihat tersebut yang disampaikan 'Alī bin Abī Ṭālib kepada Imam Mālik al-Ashtar sebagai berikut:

ثُمَّ انْظُرْ فِى أُمُورِ عُمَّالِک فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً، وَلاَ تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً وَأَثَرَةً، فَإِنَّهُمَا جِمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ وَالْخِيانَةِ

Artinya: "*Perhatikan para pegawaimu; jangan mempercayakan suatu jabatan sebelum mereka kau uji. Jangan mengangkat mereka karena ingin mengambil hati mereka ataupun demi kepentingan dirimu semata-mata. Sebab yang demikian itu adalah sumber kezaliman dan pengkhianatan*".[74]

---

[73] WikiShia, Teks: *Surat Imam Ali kepada Ma<lik al-Ashtar,* https://id.wikishia.net/view/Teks:Surat_Imam_Ali_kepada_Malik_al-Ashtar, diakses pada 21 Januari 2025 Pukul 18:04 WIB

[74] WikiShia, Teks: *Surat Imam Ali kepada Ma<lik al-Ashtar,* https://id.wikishia.net/view/Teks:Surat_Imam_Ali_kepada_Malik_al-Ashtar, diakses pada 21 Januari 2025 Pukul 20.00 WIB

Dari beberapa uraian diatas dapat terlihat betapa ‘Alī bin Abī Ṭālib sangat menekankan etika kekuasaan, yaitu bahwa kekuasaan harus dijalankan berdasarkan etika dan nilai-nilai kebaikan karena suaatu kekuasaan yang dijalankan tanpa etika dan nilai-nilai kebaikan maka sang penguasa akan membawa kekuasaan sebagai alat bagi kepentingan dirinya akan tetapi penguasa yang menjalankan kekuasaan didasarkan pada etika dan nilai-nilai maka dia akan mebawa kekuasaan itu berdampak positif bagi negara dan rakyat. Prinsip ‘Alī bin Abī Ṭālib ini sangat penting dan mendasar bukan hanya untuk masa lalu saja tetapi juga untuk penguasa-penguasa di era modern ini. Meskipun ngeara-negara modern banyak berbasis pada demokrasi akan tetapi demokrasi tanpa etika justru akan membawa kekuasaan menjadi alat atau bahkan tujuan yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan Masyarakat.

Selanjutnya, saat ‘Alī bin Abī Ṭālib menjadi khalifah, ia melaksanakan reformasi besar-besaran dalam sistem pemerintahan dan administrasi keuangan. Salah satu tindakan paling terkenal adalah kebijakannya untuk mendistribusikan kekayaan negara secara merata kepada rakyat, tanpa memandang status sosial atau hubungan politik. Kebijakan ini sangat kontras dengan pemerintahan sebelumnya, di mana kekayaan negara sering kali diberikan secara tidak adil kepada kelompok elit. ‘Alī bin Abī Ṭālib juga menekankan pentingnya transparansi dalam administrasi publik dan tidak ragu untuk memecat pejabat yang terbukti korup atau menyalahgunakan wewenang. Salah satu contoh yang mencerminkan integritasnya adalah ketika ia memecat seorang gubernur, yang merupakan sepupunya sendiri, karena terbukti melakukan penyimpangan.

‘Alī bin Abī Ṭālib menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab terhadap administrasi pemerintahan, tetapi juga harus menjadi pelindung bagi rakyatnya. Ia harus memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak-haknya secara adil, tanpa memandang status sosial, agama, atau latar belakang mereka. ‘Alī bin Abī Ṭālib menulis, "*Ketahuilah bahwa rakyat adalah sumber kekuasaanmu dan pilar penyangga keberhasilanmu; oleh karena itu, perlakukan mereka dengan baik dan pastikan hak-hak mereka dilindungi*."[75]

‘Alī bin Abī Ṭālib memahami bahwa tanpa perlindungan hak dan kesejahteraan rakyat, pemerintahan akan kehilangan legitimasi dan kesulitan dalam mencapai stabilitas. Oleh karena itu, ia sangat memperhatikan pentingnya membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi di bawah pemerintahan yang adil.

Untuk itu ‘Alī bin Abī Ṭālib memperingatkan Mālik al-Ashtar untuk tidak membiarkan kekuasaan atau kedudukan mempengaruhi penegakan hukum. Ia menyatakan bahwa hukum harus ditegakkan secara merata tanpa memandang status seseorang. ‘Alī bin Abī Ṭālib menulis,

---

[75] Al-Islam, *Imam Ali’s Letter to Mālik al-Ashtar: The Richest Treasure*, The Research Treasure, https://www.al-islam.org/richest-treasure-imam-ali/imam-alis-letter-malik-al-Ashtar-richest-treasure diakses pada tanggal 27 Agustus 2024.

وَإِيَّاكَ وَالاِسْتِئْثَارَ بِمَا النَّاسُ فِيهِ أُسْوَةٌ، وَالتَّغَافُلَ عَمَّا قَدْ وَضَحَ لِلْعُيُونِ، فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْكَ لِغَيْرِكَ، وَسَتَكْشِفُ عَنْهُ الْأَغْطِيَةُ

"Jauhilah sikap mementingkan diri sendiri dalam hal-hal yang menjadi hak bersama, dan janganlah engkau lalai terhadap sesuatu yang telah jelas di mata. Karena sesungguhnya hal itu akan diambil darimu untuk diberikan kepada orang lain, dan kelak akan tersingkaplah segala yang tertutupi."[76] Prinsip ini sangat relevan dalam konteks pemerintahan modern, di mana penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera.[77]

Selain perlindungan hak-hak rakyat, ‘Alī bin Abī Ṭālib juga menekankan pentingnya mmperjuangkan kesejahteraan rakyat. Diantaranya kesejahteraan rakyat dalam bidang ekonomi. ‘Alī bin Abī Ṭālib memahami bahwa kesejahteraan ekonomi adalah salah satu faktor utama yang menentukan stabilitas dan keberhasilan pemerintahan. Oleh karena itu, ia mendorong Mālik al-Ashtar untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka. ‘Alī bin Abī Ṭālib mengatakan,

وَاعْلَمْ يَا مَالِكُ أَنَّ فِي النَّاسِ مَنْ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ مَا يَحْتَاجُهُ مِنْ أَطْعِمَةٍ وَأَمْوَالٍ وَأَشْيَاءِ تَجْدِيهِ فِي قُرُوهِهِ فَيُدْنِي اللَّهُ لَكَ فَتُدْنِي قُدَمَكِ إِلَيْهِ وَتُسَاعِدُهُ فِي أُمُورِهِ.

Artinya: *"Ketahuilah, wahai Malik, bahwa di antara rakyatmu ada yang tidak memiliki akses terhadap makanan, harta, dan barang-barang yang mereka butuhkan. Maka, dekatkanlah mereka dengan bantuan, dan bantu mereka dalam urusan mereka.*
‘Alī bin Abī Ṭālib juga menambahkan,

يَا مَالِكُ أَنَّ النَّاسَ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ أَوْ نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ، فَجَعَلْتَ أَمَامَكُمْ وَاعْلَمْ فِي رَجُلٍ فَاتَّبِعْهُ فِي الْمَعَارِفِ وَالشُّؤُونِ، وَيُحَسِّنُ مَرَافِقَكُمْ وَيُصَحِّحُ فِي أُمُورِهِمْ وَيُحَقِّقُ فِي أَقْوَالِهِمْ وَيُحَسِّنُ فِيهِمْ فِي كُلِّ مَا يَفْعَلُهُ

Artinya: *"Dan ketahuilah, wahai Malik, bahwa manusia itu bisa jadi saudaramu dalam agama, atau sesama makhluk ciptaan Allah. Maka, jadikan mereka sebagai amanahmu, dan layanilah mereka dengan sebaik-baiknya dalam setiap urusan mereka. Perbaiki keadaan mereka, dan luruskan kata-kata mereka, serta berbuat baiklah kepada mereka dalam setiap hal yang kamu lakukan. Selain perlindungan hak-hak rakyat, ‘Alī bin Abī Ṭālib juga menekankan pentingnya mmperjuangkan kesejahteraan rakyat. ‘Alī bin Abī Ṭālib menu”*

---

[76] Al-Islam, *Imam Ali’s Letter to Mālik al-Ashtar: The Richest Treasure*, The Research Treasure, https://www.al-islam.org/richest-treasure-imam-ali/imam-alis-letter-malik-al-Ashtar-richest-treasure diakses pada tanggal 1 Januari 2024

[77] Masduki, *Khalifah Ali Bin Abi Tahlib; Awal Tragedi Perang Saudara dalam Sejarah Islam*, al-fath, Volume 02 Nomor 02 (Juli-Desember) 2008, h. 165

B. Kebebasan dalam Pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib

‘Alī bin Abī Ṭālib menganggap kebebasan sebagai hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara. Ia menolak semua bentuk penindasan yang menghalangi kebebasan individu, termasuk dalam hal menyampaikan pendapat dan menjalankan keyakinan. Menurutnya, kebebasan berpendapat adalah inti dari eksistensi manusia, dan seorang pemimpin yang bijaksana seharusnya mendorong adanya dialog dan kritik yang konstruktif untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Kebebasan ini, menurut ‘Alī bin Abī Ṭālib, harus dilindungi, selama tidak mengganggu hak-hak orang lain dan tidak merusak tatanan sosial.[78]

‘Alī bin Abī Ṭālib memiliki pemikiran yang mendalam dan filosofis mengenai kebebasan, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan moralitas dalam Islam. Ia menganggap kebebasan sebagai hak yang melekat pada setiap individu, yang bukan hanya diberikan oleh sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan bagian dari fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Bagi ‘Alī bin Abī Ṭālib, kebebasan yang sejati bukanlah kebebasan mutlak yang memungkinkan seseorang bertindak tanpa batasan, melainkan kebebasan yang diatur oleh nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam pandangan ini, kebebasan individu tidak boleh merugikan orang lain, dan negara harus berperan dalam melindungi hak serta kebebasan warganya sambil memastikan penegakan keadilan.

Menurut ‘Alī bin Abī Ṭālib, kebebasan tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab moral. Manusia yang benar-benar bebas adalah mereka yang memiliki kebebasan untuk berpikir, berpendapat, dan bertindak, namun semuanya harus berada dalam batasan moralitas yang ditetapkan oleh ajaran agama. Penyalahgunaan kebebasan, seperti hak untuk menindas atau melanggar hak orang lain, akan merusak tatanan sosial dan mengakibatkan ketidakadilan. ‘Alī bin Abī Ṭālib sering menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu, termasuk hak untuk hidup dengan martabat, hak untuk bersuara, dan hak untuk menentukan jalan hidup mereka tanpa paksaan dari pihak luar, selama tindakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Berikut adalah beberapa poin penting yang disampaikan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang kebebasan:

1. Jangan Menindas Kebebasan.

   Seorang pemimpin harus senantiasa bersikap adil dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan, karena meskipun dipimpin oleh seorang penguasa, rakyat tetap memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Salah satu poin penting dalam surat tersebut menegaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang bebas dan memiliki martabat. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus berlaku adil dan tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, baik itu kaum Muslim maupun non-Muslim. Rakyat tidak boleh diperlakukan seperti budak, melainkan sebagai

[78] Yayan Muhammad Royani. Ujaran Kebencian Masa Kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib Dan Relevansinya Dengan Regulasi Di Indonesia: Sebuah Kajian Sejarah Hukum Islam, (Disertasi: Pascasarjana Uin Walisongo Semarang), 2021, h. 100

saudara seiman atau setidaknya sebagai sesama manusia yang berhak atas keadilan.

وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ، وَالْمَحَبَّةَ لَهُمْ، وَاللُّطْفَ بِهِمْ، وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ، وَإِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ

" Tanamkanlah di hatimu rasa kasih sayang kepada rakyat, cinta kepada mereka, dan kelembutan terhadap mereka. Janganlah engkau menjadi binatang buas yang memangsa mereka, karena mereka itu ada dua golongan: pertama, saudaramu dalam agama, dan kedua, sesama manusia ciptaan Tuhan."

'Alī bin Abī Ṭālib menekankan pentingnya kasih sayang, cinta, dan kelembutan dalam memperlakukan rakyat. Ini bertentangan dengan sifat "binatang buas" yang kejam dan tanpa belas kasihan dan juga mengingatkan bahwa segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan kelak akan terungkap segala yang tersembunyi. Ini merupakan peringatan keras bagi para pemimpin untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan dan menindas rakyat.

2. Kebebasan dalam pengambilan keputusan politik.

'Alī bin Abī Ṭālib mendorong Mālik al-Ashtar untuk tidak hanya mendengarkan pandangan dari kalangan elit atau penguasa, tetapi juga mempertimbangkan suara dari rakyat biasa, termasuk kaum lemah dan minoritas. Dalam suratnya, 'Alī bin Abī Ṭālib mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus bersikap terbuka terhadap kritik dan nasihat, bahkan jika datang dari rakyat yang paling rendah. Ini menjadi salah satu manifestasi kebebasan berpendapat yang dianggap sangat krusial dalam pemerintahan yang adil,

أَطْلِقْ عَنِ النَّاسِ عُقْدَةَ كلِّ حِقْد، وَاقْطَعْ عَنْک سَبَبَ كلِّ وِتْر، وَتَغَابَ عَنْ كلِّ مَا لايضِحُ لک، وَلاَ تَعْجَلَنَّ إِلَى تَصْدِيقِ سَاع فَإِنَّ السَّاعِى غَاشٌّ، وَإِنْ تَشَبَّهَ بِالنَّاصِحِينَ

Artinya: "*Bebaskan publik dari penyakit kedengkian dan pangkaslah pemicu permusuhan dari mereka (dengan bergaul sedekat mungkin dengan mereka). Cemehkan hal yang tidak terlihat olehmu, dan jangan tergesa-gesa mempercayai penuduh, sebab orang seperti itu adalah penipu meskipun ia berpura-pura sebagai penasihat yang tulus*".[79]

Nasihat tersebut sejalan dengan Firmann Allah SWT didalam surah an-Nisa ayat 32 mengenai larangan iri dengki yang berbunyi sebagai berikut:

۞وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi*

[79] Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Islah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* (RiyaD: al-Maktabah al-Salafiyah wa Maktabatuha, 1387 H.), h. 99.

orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu,".

Kebebasan ini kemudian akan menciptakan *ukhuwah islamiyah* antara kaum muslimin juga kerukunan dan saling bahu membahu serta membantu satu sama lainnya. Hal ini mencerminkan pola kebijakan politik Rasulullah SAW. Kala itu, Rasullullah SAW menciptakan kohesi sosial melalui proses persaudaraan antarkomunitas yang tidak memiliki pertalian darah tapi menyatu sebagai komunitas agama, antara komunitas Islam Makkah yang baru berhijrah dan penduduk Madinah menjadi kaum Muhajirin dan Anshar. Menurut Abu al-Hasan al-Nadwi dalam al-Sîrah al-Nabawiyyah, kebijakan ini bertujuan untuk menanamkan prinsip ukhuwah Islamiyah dan membentuk ikatan baru yang berlandaskan iman, persaudaraan dan gotong royong.[80]

Nasihat tersebut berlaku untuk semua, baik Muslim maupun non-Muslim, yang harus diperlakukan dengan adil dan penuh penghormatan. Kebebasan setiap individu diakui, tidak hanya dalam konteks agama, tetapi juga dalam hak-hak kemanusiaan. Seorang pemimpin harus bersikap adil kepada seluruh rakyatnya, tanpa memandang perbedaan keyakinan atau status sosial, karena kebebasan setiap individu sebagai manusia adalah fondasi dari pemerintahan yang adil.

3. Kebebasan berpendapat dan mendengar nasihat, bahkan dari rakyat kecil.

   Hal ini juga sangat diperhatikan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib dengan mengatakan: "*Janganlah sekali-kali engkau menutup diri dari rakyatmu, karena keterasingan seorang penguasa dari rakyatnya merupakan sejenis kekerasan terhadap mereka dan menjadi sebab terbatasnya pengetahuan mengenai keadaan mereka*".[81] Pentingnya seorang pemimpin mendengarkan aspirasi dan suara rakyat tanpa mempertimbangkan status sosial mereka. Keterbukaan pemimpin terhadap masyarakat mencerminkan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dan hak untuk didengar, yang merupakan elemen krusial dalam pemerintahan yang adil dan demokratis.

   Salah satu contoh nyata bagaimana ‘Alī bin Abī Ṭālib menjalankan pemerintahannya sesuai dengan pandangannya tentang kebebasan dapat dilihat dari momen ketika ia menjabat sebagai khalifah. ‘Alī bin Abī Ṭālib dikenal karena keadilannya dan komitmennya dalam menegakkan prinsip-prinsip kebebasan dan keadilan. Salah satu insiden terkenal adalah ketika ia dihadapkan dengan gugatan seorang Yahudi terkait baju perang yang hilang. Meskipun ‘Alī bin Abī Ṭālib merupakan khalifah yang memiliki kekuasaan, ia dengan rendah hati mendatangi pengadilan dan menghadapi orang Yahudi tersebut sebagai seorang warga biasa. Dalam proses pengadilan, hakim memutuskan bahwa baju perang itu milik orang

---

[80] NU.Online, *Kebijakan Politik Nabi Muhammad SAW*, https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/kebijakan-politik-nabi-muhammad-saw-ZPtFu, dia,sesuai pada 8 Desember 2024 pukul 12.00 WIB.

[81] Masduki, *Khalifah Ali Bin Abi Tahlib; Awal Tragedi Perang Saudara dalam Sejarah Islam*, al-fath, Volume 02 Nomor 02 (Juli-Desember) 2008, h. 169.

Yahudi tersebut, karena ‘Alī bin Abī Ṭālib tidak dapat memberikan bukti yang cukup untuk mengklaim kepemilikannya. ‘Alī bin Abī Ṭālib menerima keputusan pengadilan tersebut dengan penuh lapang dada, meskipun ia adalah seorang pemimpin. Peristiwa ini menunjukkan bahwa dalam pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib, tidak ada yang kebal terhadap hukum, dan setiap individu, baik rakyat biasa maupun pemimpin, memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Ini adalah contoh konkret bagaimana ‘Alī bin Abī Ṭālib menghormati kebebasan dan hak setiap individu dalam kerangka keadilan.[82]

Kebijakan ‘Alī bin Abī Ṭālib dalam memperlakukan kelompok-kelompok minoritas juga mencerminkan komitmennya terhadap kebebasan beragama dan hak-hak individu. Di bawah kepemimpinannya, minoritas non-Muslim seperti Kristen, Yahudi, dan Zoroastrian diberikan kebebasan untuk menjalankan agama mereka tanpa adanya gangguan. ‘Alī bin Abī Ṭālib secara tegas memerintahkan para gubernurnya untuk tidak memaksa orang-orang non-Muslim untuk masuk Islam dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil, selama mereka mematuhi peraturan negara. Dengan pendekatan ini, ‘Alī bin Abī Ṭālib menegaskan bahwa toleransi dan penghormatan terhadap keragaman agama adalah elemen krusial dalam pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Dalam pandangannya, kebebasan harus beroperasi dalam kerangka tanggung jawab sosial. Kebebasan individu tidak seharusnya mengabaikan kepentingan bersama. Ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyat, terlepas dari latar belakang agama atau status sosial mereka. Dalam pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib, kebebasan merupakan pilar penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, dan kebebasan yang sesungguhnya hanya dapat terwujud ketika berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, moralitas, dan tanggung jawab sosial.

4. HAM (Hak Asasi Manusia) proyeksi kebebasan pertama yang di prakarsai oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib.

Periode singkat pemerintahan ‘Alī bin Abī Ṭālib dan sistem pemerintahan yang beliau terapkan dapat dijadikan sebagai model praktis bagi penerapan HAM. Sebab, di masa pemerintahan beliau, masyarakat sangat majemuk dan terdiri dari berbagai etnis, bahasa, warna kulit dan agama. Namun beliau mampu mengendalikan pemerintahan dengan adil tanpa adanya pelanggaran HAM. Pada dasarnya, cara praktis yang diterapkan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib sebagaimana tersebut telah menggambarkan Piagam HAM yang sebenarnya.[83]

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam surat Ali bin Thalib kepada Mālik al-Ashtar sangat relevan dengan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dang disahkan oleh PBB pada tahun 1948. Meskipun surat Ali ditulis

---

[82] Agus Hasan Bashori dan Ulil Amri Syafri, *Studi Kritis Konsep Sanad Kitab Nahj Al-Balaghah Sebagai Upaya Membangun Budaya Tabayyun Dalam Keilmuan Islam* (el Harakah Volme 18 Nomor 2 Tahun 2016), h. 166.

[83] Ahlul Bait Indonesia, *HAM dalam Pemerintahan Islam Imam Ali as*, https://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/s13-berita/ham-dan-pemerintahan-ala-imam-ali-as/, diakses pada 9 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

berabada-abad sebelum DUHAM, prinsip-prinsip yang dikandungnya menunjukkan bahwa gagasan tentang hak asasi manusia telah ada jauh sebelum era modern. Surat ini juga merupakan bukti bahwa Islam memiliki perhatian yang besar terhadap perlindungan hak dasar manusia dan penegakan keadilan.

C. Keadilan dalam Pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib

Dalam pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib, keadilan adalah prinsip fundamental yang sangat mendalam. Sebagai seorang pemimpin dan sahabat Nabi Muhammad, ia menganggap keadilan sebagai dasar utama dalam kehidupan pribadi, sosial, dan politik. Menurut ‘Alī bin Abī Ṭālib, keadilan tidak hanya berarti memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga memastikan segala sesuatu berada pada tempatnya. Ia percaya bahwa seorang pemimpin yang adil harus bersikap transparan, menghindari semua bentuk ketidakadilan, dan memperlakukan semua orang—baik teman maupun musuh—dengan adil. Keadilan, bagi ‘Alī bin Abī Ṭālib, adalah kunci stabilitas masyarakat dan kebahagiaan individu, karena ketidakadilan hanya akan mengarah pada kekacauan dan kehancuran. Ia sering menekankan bahwa seorang pemimpin yang zalim tidak akan memiliki legitimasi moral, meskipun ia memiliki kekuasaan. Bagi ‘Alī bin Abī Ṭālib, keadilan adalah suatu kewajiban ilahi yang tidak bisa ditawar dan harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan.

Keadilan merupakan pilar utama dalam pemerintahan yang baik. ‘Alī bin Abī Ṭālib selalu menekankan pentingnya menegakkan keadilan tanpa memandang bulu, baik kepada teman maupun lawan, serta antara orang kaya dan miskin, bagi ‘Alī bin Abī Ṭālib, keadilan tidak hanya merupakan aturan hukum, tetapi juga merupakan nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan politik.[84]

Seorang pemimpin harus menjadikan keadilan sebagai pedoman utama dalam pemerintahannya, karena kekuasaan hanya dapat dianggap sah jika digunakan untuk menegakkan keadilan dan melindungi kebebasan rakyat. Surat ini mencerminkan kedalaman pemikiran politik ‘Alī bin Abī Ṭālib, yang menggabungkan nilai-nilai moral dan keagamaan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang adil. Pandangan politik ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang kekuasaan, kebebasan, dan keadilan tetap relevan hingga saat ini, memberikan inspirasi bagi pemimpin dan masyarakat yang menginginkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, surat yang ditulis oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi Mālik al-Ashtar, tetapi juga sebagai manifestasi tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya bertindak dalam menghadapi tantangan pemerintahan, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Keadilan sebagai Landasan Pemerintahan

   Salah satu tema sentral dalam surat tersebut adalah keadilan. ‘Alī bin Abī Ṭālib menegaskan bahwa keadilan merupakan fondasi bagi setiap pemerintahan yang efektif. Ia menggarisbawahi pentingnya seorang pemimpin untuk bersikap

[84] Ibnu Taimiyah. Tugas Negara menurut Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2004, h. 35

adil dalam setiap keputusan yang diambil, baik dalam hubungan dengan rakyat maupun dalam penilaian terhadap diri sendiri. ‘Alī bin Abī Ṭālib menulis, "*Hendaklah yang paling kau cintai di antara urusan-urusanmu adalah yang paling adil di dalam kebenaran, yang paling menyeluruh dalam keadilan, dan yang paling luas dalam keridhaan rakyat.*" Dalam konteks ini, ‘Alī bin Abī Ṭālib tidak hanya berbicara tentang keadilan dalam hal hukum, tetapi juga keadilan dalam alokasi sumber daya, perlakuan terhadap pegawai pemerintahan, dan hubungan antar-warga negara.[85] Sebagaimana didalam firman Allah SWT didalam surah an-Nisa' ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*"

Keadilan ini juga melibatkan perlindungan hak-hak minoritas dan individu yang rentan. Bagi ‘Alī bin Abī Ṭālib, seorang pemimpin harus mampu menjaga keseimbangan antara berbagai kelompok dalam masyarakat, tanpa berpihak atau melakukan diskriminasi. Ia juga mengingatkan Mālik al-Ashtar untuk tidak terpengaruh oleh tekanan dari kelompok tertentu atau memberikan hak istimewa kepada golongan yang kaya atau berkuasa.

2. Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya

Pentingnya pengelolaan sumber daya yang bijaksana dalam pemerintahan. Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin harus memastikan bahwa sumber daya negara digunakan untuk kepentingan umum dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,

وَلْيَكُنْ أَحَبَّ الأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ، وَأَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ، وَأَجْمَعُهَا لِرِضَا الرَّعِيَّةِ، فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَا الْخَاصَّةِ، وَإِنَّ سَخْطَ الْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَا الْعَامَّةِ

Artinya: "*Dan hendaklah hal yang paling kau cintai adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah (tidak melampaui batas) dalam kebenaran, yang paling umum dalam keadilan, dan yang paling merangkul keridaan rakyat. Sebab, kemarahan*

[85] R. Eep Saifullah Fatah, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia, (Jakarta, Ghalia Indonesia,) 994, h. 34.

rakyat secara umum akan mengalahkan keridaan golongan tertentu, sementara kemarahan golongan tertentu dapat dimaafkan selama rakyat umum meridai.[86]

'Alī bin Abī Ṭālib juga menekankan pentingnya transparansi dalam administrasi pemerintahan. Ia menyarankan Mālik al-Ashtar untuk secara rutin memeriksa kondisi keuangan negara dan memastikan bahwa semua pengeluaran dan pendapatan tercatat dengan jelas dan akurat. Ini merupakan awal mula dari konsep akuntabilitas dalam pemerintahan modern, di mana setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

3. Hubungan dengan Rakyat

'Alī bin Abī Ṭālib mengingatkan Mālik al-Ashtar bahwa seorang pemimpin adalah pelayan rakyat, dan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah amanah dari Allah yang harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk itu 'Alī bin Abī Ṭālib berwasiat "*Jadikanlah kasih sayang, kerendahan hati, dan ketulusan hatimu sebagai dasar dalam berurusan dengan rakyatmu.*". Dengan mendengarkan keluhan rakyat dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan pendapat, 'Alī bin Abī Ṭālib menyarankan Mālik al-Ashtar untuk membangun saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini penting agar setiap masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan adil. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman 'Alī bin Abī Ṭālib bahwa pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang dekat dengan rakyatnya dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

4. Pengelolaan Konflik dan Penegakan Hukum

'Alī bin Abī Ṭālib memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang bagaimana menangani konflik dan menegakkan hukum dalam pemerintahan. Ia menekankan pentingnya menegakkan hukum secara konsisten tanpa memandang status sosial atau kekayaan seseorang, "*Janganlah engkau tunduk kepada orang-orang yang menyukai kemewahan dan melampaui batas, mereka yang sering meminta lebih dari yang mereka butuhkan, dan janganlah engkau menyerahkan kekuasaan kepada mereka yang mencari keuntungan dengan memperalat kekuasaan.*".[87]

'Alī bin Abī Ṭālib juga mengingatkan Mālik al-Ashtar untuk selalu mencari jalan damai dalam menyelesaikan konflik. Ia menyarankan agar Mālik al-Ashtar lebih memilih mediasi dan negosiasi daripada menggunakan kekerasan. Namun, ketika kekerasan tidak dapat dihindari, 'Alī bin Abī Ṭālib menekankan bahwa hal itu harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan hanya sebagai upaya terakhir.[88] Pendekatan ini menunjukkan komitmen 'Alī bin Abī Ṭālib terhadap prinsip-prinsip perdamaian dan keadilan, serta pentingnya menghindari kekerasan yang dapat merusak tatanan sosial.

---

[86] Harold J. Laski, *The State In Theory and Practice,* (The Viking Press: New York), 1974, h. 8-9

[87] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti) 1995, h.99.

[88] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti) 1995, h.100.

5. Peran pemerintah dalam melindungi rakyat dari penindasan.

‘Alī bin Abī Ṭālib juga memberikan perhatian besar pada perlindungan rakyat dari penindasan, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari individu atau kelompok yang berpengaruh. Ia menyadari bahwa penindasan adalah salah satu ancaman terbesar bagi kesejahteraan rakyat dan stabilitas pemerintahan. ‘Alī bin Abī Ṭālib menulis,

وَإِيَّاكَ وَالدِّمَاءَ وَسَفْكَهَا بِغَيْرِ حِلِّهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى لِنِقْمَةٍ، وَلَا أَعْظَمَ لِتَبِعَةٍ، وَلَا أَحْرَى بِزَوَالِ نِعْمَةٍ، وَانْقِطَاعِ مُدَّةٍ، مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقِّهَا

Artinya: "*Hindarilah penumpahan darah yang tidak dihalalkan, karena tidak ada sesuatu yang lebih mengundang kemurkaan (Allah), lebih besar akibatnya, dan lebih berpotensi menghilangkan nikmat serta memutuskan umur daripada penumpahan darah yang tidak dihalalkan.*"[89]

‘Alī bin Abī Ṭālib memperingatkan Mālik al-Ashtar untuk tidak membiarkan pejabat pemerintah menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menindas rakyat, seorang pemimpin harus mengawasi bawahannya dengan ketat dan memastikan bahwa mereka bertindak dengan adil dan bertanggung jawab. ‘Alī bin Abī Ṭālib menulis, "*Pastikan bahwa para pejabatmu tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka; awasi mereka dengan ketat dan jangan biarkan mereka menindas rakyat.*" Ini adalah cikal bakal dari konsep pengawasan dan akuntabilitas dalam pemerintahan modern, di mana setiap pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakannya.[90]

Bagi ‘Alī bin Abī Ṭālib sangat penting memberikan perlindungan hukum kepada rakyat, terutama mereka yang lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Ia menyarankan Mālik al-Ashtar untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan dan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil di pengadilan. ‘Alī bin Abī Ṭālib berpesan bahwa,

ثُمَّ اللَّهَ اللَّهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لَا حِيلَةَ لَهُمْ مِنَ الْمَسَاكِينِ وَالْمُحْتَاجِينَ وَأَهْلِ الْبُؤْسَى وَالزَّمْنَى، فَإِنَّ فِي هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعًا وَمُعْتَرًّا، وَاحْفَظْ لِلَّهِ مَا اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ، وَاجْعَلْ لَهُمْ قِسْمًا مِنْ بَيْتِ مَالِكَ، وَقِسْمًا مِنْ غَلَّاتِ صَوَافِي الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ، فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلْأَدْنَى، وَكُلٌّ قَدِ اسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ، فَلَا تَشْغَلَنَّكَ نَفْسُكَ عَنْهُمْ، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لَهُمْ تَكَبُّرًا عَلَيْهِمْ، وَتَغَافَلْ عَمَّا

[89] Al-Islam, *Imam Ali’s Letter to Mālik al-Ashtar: The Richest Treasure*, The Research Treasure, https://www.al-islam.org/richest-treasure-imam-ali/imam-alis-letter-malik-al-Ashtar-richest-treasure diakses pada tanggal 1 Januari 2024

[90] Muhadi Zainudin dan Abd Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam*, (Bandung:Putra Mediatama Press), 2008, h. 77.

تَحْرِيهِ الْأَدْنَى إِلَيْكَ مِنْهُمْ وَالْأَبْعَدِ مِنْهُمْ، وَابْعَثْ لَهُمْ مَنْ يَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابَ الْعَدْلِ، وَيُحَسِّنُ لَهُمُ الْخُلُقَ، وَيَتَوَاضَعُ لَهُمْ فِي مَجْلِسِكَ وَمَحْضَرِكَ، حَتَّى يَكُونَ أَحَدُهُمْ يَتَكَلَّمُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ، وَتَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ، وَتَقْضِي أَمْرَهُ، وَتُعْطِيهِ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي لَكَ وَلَهُ، وَتُعَلِّمُهُ مَا يَجْهَلُ مِنْ دِينِهِ، وَتُرْشِدُهُ إِلَى مَا يَصْلُحُهُ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ وَمَعَاشِهِ

Artinya: " *Kemudian, bertakwalah kepada Allah dalam urusan golongan bawah dari mereka yang tidak memiliki daya upaya, yaitu orang-orang miskin, yang membutuhkan, yang menderita, dan yang sakit. Dalam golongan ini terdapat orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang hidupnya pas-pasan. Peliharalah hak Allah yang telah Dia amanahkan kepadamu dalam urusan mereka. Tetapkanlah untuk mereka bagian dari baitul malmu dan bagian dari hasil panen tanah-tanah Islam di setiap negeri, karena yang jauh dari mereka memiliki hak yang sama dengan yang dekat. Semua telah diwajibkan atasmu untuk memelihara haknya.*"[91] Ini menunjukkan komitmen ‘Alī bin Abī Ṭālib terhadap prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap mereka yang rentan.

Selanjutnya ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan pentingnya membangun hubungan yang baik dengan rakyat karena hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan efektif. ‘Alī bin Abī Ṭālib berpesan kepada Mālik al-Ashtar , "*Jadikanlah rakyatmu sebagai sahabatmu, dan perlakukan mereka dengan kasih sayang dan perhatian.*" Untuk itu ‘Alī bin Abī Ṭālib mengingatkan Mālik al-Ashtar untuk mendekati rakyatnya dengan rendah hati dan mendengarkan keluhan mereka. Ia menekankan pentingnya mendengarkan suara rakyat dan memberikan mereka kesempatan untuk menyampaikan pendapat. ‘Alī bin Abī Ṭālib menulis,

وَأَفْسِحْ لَهُمْ فِي مَجْلِسِكَ، وَأَصْغِ إِلَيْهِمْ، وَتَوَاضَعْ فِيهِمْ، وَالِّينَ جَانِبَكَ، وَأَسْبِغْ عَلَيْهِمْ رِفْدَكَ وَمَعْرُوفَكَ، وَأَعْطِهِمْ مَا تَعْطِي نَفْسَكَ وَأَهْلَكَ، وَأَنْتَ فِي ذَلِكَ مَسْؤُولٌ عَمَّا وُلِّيتَ حِفْظَهُ، وَمُؤَاخَذٌ بِمَا تَكَلَّفْتَ رِعَايَتَهُ

Artinya: "*Berikanlah kepada mereka tempat duduk dalam majlismu, dengarkanlah mereka, bersikaplah rendah hati terhadap mereka, lembutkanlah sikapmu, limpahkanlah bantuan dan kebaikanmu kepada mereka, dan berikanlah kepada mereka apa yang engkau berikan kepada dirimu dan keluargamu. Engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah engkau emban untuk*

[91] Al-Islam, *Imam Ali’s Letter to Mālik al-Ashtar: The Richest Treasure*, The Research Treasure, https://www.al-islam.org/richest-treasure-imam-ali/imam-alis-letter-malik-al-Ashtar-richest-treasure diakses pada tanggal 1 Januari 2024

menjaganya, dan akan dituntut atas apa yang telah engkau tanggung untuk merawatnya."[92]

Ini menunjukkan bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālib memahami pentingnya partisipasi rakyat dalam proses pemerintahan dan bahwa pemerintah yang efektif adalah pemerintah yang terbuka terhadap aspirasi rakyatnya. Dengan berbuat baik kepada rakyat tentunya ini menumbuhkan kebaikan-kebaikan lainnya.

Dalam pada itu, ‘Alī bin Abī Ṭālib menggarisbawahi pentingnya sikap empati terhadap penderitaan rakyat, dengan mengingatkan Mālik al-Ashtar untuk selalu menyadari kondisi kehidupan masyarakatnya dan tidak bersikap acuh terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Ia menekankan bahwa seorang pemimpin harus peka terhadap kesulitan yang dialami oleh rakyat dan berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut, agar dapat menciptakan pemerintahan yang responsif dan peduli. ‘Alī bin Abī Ṭālib mewasiatkan, "*Janganlah engkau bersikap acuh tak acuh terhadap penderitaan rakyatmu; berempatilah terhadap mereka dan berusahalah untuk meringankan beban mereka*." Ini menunjukkan bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālib menganggap kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab utama seorang pemimpin, dan bahwa seorang pemimpin harus selalu peka terhadap kebutuhan dan masalah rakyatnya.[93]

6. Kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab.

‘Alī bin Abī Ṭālib menutup suratnya dengan penekanan terhadap pentingnya kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Ia mengingatkan Mālik al-Ashtar bahwa seorang pemimpin harus selalu bersikap adil dalam segala hal dan tidak membiarkan kekuasaan mengaburkan penilaiannya, ia menyebutkan

وَأَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ وَمِنْ خَاصَّةِ أَهْلِكَ وَمَنْ لَكَ فِيهِ هَوًى مِنْ رَعِيَّتِكَ، فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَظْلِمْ، وَمَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللَّهِ كَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ، وَمَنْ خَاصَمَهُ اللَّهُ أَدْحَضَ حُجَّتَهُ، وَكَانَ لِلَّهِ حَرْبًا حَتَّى يَنْزِعَ وَيَتُوبَ

Artinya: " *Berlakulah adil terhadap rakyatmu, terhadap keluargamu, dan terhadap dirimu sendiri. Jika tidak, engkau akan berbuat zalim. Dan barang siapa menzalimi hamba-hamba Allah, maka Allah akan menjadi lawannya. Dan siapa yang Allah menjadi lawannya, argumennya akan runtuh, dan dia akan berada dalam perang dengan Allah hingga dia berhenti dan bertobat*."[94]. Pentingnya integritas moral dalam kepemimpinan, Ia menyarankan Mālik al-Ashtar untuk selalu menjaga akhlak dan integritasnya, dan tidak terpengaruh oleh godaan

---

[92] Al-Islam, *Imam Ali's Letter to Mālik al-Ashtar: The Richest Treasure*, The Research Treasure, https://www.al-islam.org/richest-treasure-imam-ali/imam-alis-letter-malik-al-Ashtar-richest-treasure diakses pada tanggal 1 Januari 2024

[93] Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iya*h (RiyaD: al-Maktabah al-Salafiyah wa Maktabatuha, 1387 H.), h. 99.

[94] Al-Islam, *Imam Ali's Letter to Mālik al-Ashtar: The Richest Treasure*, The Research Treasure, https://www.al-islam.org/richest-treasure-imam-ali/imam-alis-letter-malik-al-Ashtar-richest-treasure diakses pada tanggal 11 September 2024.

kekuasaan atau harta. ‘Alī bin Abī Ṭālib menulis, "*Sesungguhnya, mereka yang sebelum engkau dihancurkan oleh panjangnya angan-angan mereka, pemborosan dalam harta, mengikuti hawa nafsu, dan kekaguman mereka terhadap pendapat mereka sendiri.*." Ini menunjukkan bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālib menganggap kepemimpinan sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan moralitas. ‘Alī bin Abī Ṭālib juga berasumsi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Ia menyarankan Mālik al-Ashtar untuk selalu bertindak secara terbuka dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil.[95]

Nilai-nilai yang diajarkan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib, seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan moralitas, adalah fondasi dari pemerintahan yang baik dan efektif. Surat ini juga mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus selalu peka terhadap kebutuhan rakyatnya dan berusaha untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Dalam konteks saat ini, prinsip-prinsip yang diuraikan dalam surat ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang pemerintahan, termasuk manajemen sumber daya, penegakan hukum, dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Lebih dari sekadar pedoman administratif, surat ini menekankan pentingnya kepemimpinan yang berakhlak, yang merupakan faktor kunci dalam menciptakan pemerintahan yang adil dan efektif. Dengan mengikuti pedoman yang diuraikan dalam surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar, pemimpin-pemimpin masa kini dapat belajar bagaimana membangun pemerintahan yang tidak hanya efektif, tetapi juga bermoral dan berkeadilan.

Surat ini, meskipun ditulis lebih dari 1.400 tahun yang lalu, tetap menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang berusaha untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik bagi rakyatnya. Dalam era yang penuh tantangan ini, nilai-nilai yang ditanamkan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib dapat menjadi panduan berharga dalam menghadapi isu-isu kompleks dan dalam menjalankan amanah kepemimpinan dengan integritas.

Pengkajian atas surat ini juga telah menjadi topik kajian akademis di berbagai lembaga pendidikan Islam dan studi sejarah. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam surat ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan diajarkan sebagai bagian dari kurikulum di berbagai universitas Islam di seluruh dunia. Surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar tidak hanya memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana menjalankan pemerintahan yang adil dan efektif, tetapi juga menyajikan pedoman praktis yang dapat diadaptasi dalam berbagai konteks pemerintahan modern. Ini menunjukkan betapa relevannya ajaran ‘Alī bin Abī Ṭālib dalam konteks manajemen pemerintahan dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

---

[95] Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar‘iyyah fi Islah al-Ra‘i wa al-Ra'iya*h (RiyaD: al-Maktabah al-Salafiyah wa Maktabatuha, 1387 H.), h. 100.

BAB IV
ANALISIS ATAS PANDANGAN ‘ALĪ BIN ABĪ ṬĀLIB TERKAIT KEKUASAAN, KEBEBASAN DAN KEADILAN

Sistem negara dan perpolitikan pada zaman *Khulafāurrashidīn* (Khalifah yang Empat) mengacu pada periode kepemimpinan empat khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Keempat khalifah tersebut adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan ‘Alī bin Abī Ṭālib yang mana masa ini berlangsung dari tahun 632 M hingga 661 M. Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dia dipilih melalui musyawarah dan *bay'ah* (sumpah setia) oleh para sahabat. Dalam hal kebijakan Politik pada masa pemerintahannya menangani berbagai pemberontakan internal yang dikenal sebagai Perang Riddah. Abu Bakar berhasil menyatukan kembali berbagai suku Arab yang sempat memisahkan diri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada sektor administrasi pemerintahan Abu Bakar berbasis pada Al-Qur’an dan sunah Nabi, dengan penekanan pada keadilan dan pemerintahan yang bersih.[90]

Setelah Abu Bakar wafat. Kekhalifahan di lanjutkan oleh Umar bin Khatab. Umar dipilih melalui musyawarah. Dia dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil dan tegas. Pola kebijakan politik yang diterapkan pada masa Umar bin Khattab yaitu memperluas wilayah kekuasaan Islam ke luar Jazirah Arab, termasuk Persia, Mesir, dan Levant. Umar Memperkenalkan sistem administrasi yang lebih terstruktur, termasuk pembentukan departemen dan penunjukan gubernur di wilayah yang dikuasainya. Pada masanya dikenal sebuah Gerakan perubahan berupa reformasi Sosial guna memperkenalkan sistem keuangan yang lebih baik, termasuk pembagian zakat dan pajak, serta membangun infrastruktur seperti jalan dan saluran irigasi.[91]

Setelah Umar bin Khattab wafat, kekhaifahan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan (644-656 M) Utsman dipilih melalui musyawarah majlis syuro yang dibentuk oleh Umar sebelum wafatnya. Dia dikenal sebagai khalifah yang lembut dan dermawan. Kebijakan Politik yang diterapkan oleh Utsman melanjutkan perluasan wilayah Islam dan memperkuat angkatan laut. Usman memerintahkan kompilasi resmi Al-Qur'an dalam satu mushaf untuk mencegah perbedaan pembacaan. Namun pada saat ia menjabat tentunya masa pemerintahannya tidak lepas dari kritik dan konflik yang menyertainya,[92] Utsman menghadapi kritik atas politik nepotisme Dimana dia lebih mengutamakan anggota keluarganya, yang menyebabkan ketidakpuasan dan pemberontakan yang akhirnya berujung pada pembunuhannya.

Setelah Usman wafat karena berakhir karena terbunuh oleh pemberontak Mesir, pemerintahan *Khulfaurrasyidin* dilanjutkan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib. Kala itu, umat Muslim mengalami kebingungan karena tidak ada tokoh pengganti yang jelas. Abdullah bin Saba, seorang pemimpin di Mesir, mengusulkan agar ‘Alī bin Abī Ṭālib diangkat sebagai khalifah. Usulan ini disetujui oleh mayoritas masyarakat Muslim, kecuali pihak Muawiyah

[90] Abdul Lathief dan Abdussyafi‟i Muhammad, *Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah*. Penerjemah: Abu Ziad Dhiaul-Haq dan Abdul Syukur Abdul Razak, (Jakarta: Pustaka Azam, 2011), h. 88.

[91] Abdul Lathief dan Abdussyafi‟i Muhammad, *Bangkit dan Runtuhnya*…, h. 89.

[92] Ahmad Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h.90.

bin Abi Sufyan. Awalnya, ‘Alī bin Abī Ṭālib menolak tawaran tersebut karena situasi yang kurang kondusif akibat kerusuhan yang terjadi di berbagai tempat. Namun, karena desakan para pengikutnya, ‘Alī bin Abī Ṭālib menerima tawaran tersebut dan secara resmi dibaiat menjadi khalifah keempat pada 23 Juni 656 M di Masjid Nabawi, Madinah.[93]

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālib dihadapkan pada situasi politik yang sangat sulit dengan banyaknya pemberontakan dan konflik internal. Kebijakan Politik yang dianut oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib ia berusaha menegakkan keadilan dan menanggulangi korupsi yang terjadi sebelumnya. Namun, menghadapi oposisi dari kelompok yang mendukung Utsman, yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Saudara pada masa pemerintahan ‘Alī bin Abī Ṭālibtidak terelakan yang mana terlibat dalam Perang Jamal dan Perang *Siffin* yang melibatkan pertempuran antara pasukan ‘Alī bin Abī Ṭālibdan pasukan oposisi. ‘Alī bin Abī Ṭālibakhirnya dibunuh oleh seorang *Khawarij* pada tahun 661 M.[94]

Pada masa pemerintahan *Khulafāurrashidīn* terdapat beberapa prinsip-prinsip umum yang dipegang teguh oleh para khalifah sebagai pemimpin pada masa pemerintahan *khulafaurasyidin*, yakni:[95]

1. Musyawarah dan Konsultasi. Keputusan penting biasanya diambil melalui proses musyawarah dengan para sahabat dan pemimpin komunitas;
2. Keadilan dan Kesejahteraan Sosial. Menekankan pada keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan perlindungan hak-hak kaum miskin dan terpinggirkan;
3. Penegakan Hukum Islam. Berpegang teguh pada ajaran Al-Qur'an dan Sunah sebagai dasar hukum dan kebijakan pemerintahan;
4. Kesederhanaan dan Keteladanan. Para khalifah dikenal dengan gaya hidup sederhana dan menjadi teladan bagi rakyat mereka.

Era *Khulafāurrashidīn* merupakan masa yang penting dalam sejarah Islam, di mana banyak prinsip dasar pemerintahan dan administrasi yang diterapkan menjadi fondasi bagi perkembangan peradaban Islam di masa-masa berikutnya.[96]

---

[93] Tegar Shidiq Pratama dan Dian Prayoga, *Masa Pemerintahan ‘Alī bin Abī Ṭālib Dari Tahun 655-660M*, (Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan, Vol. 4 No. 2, 2023), h. 111-118

[94] Ali Mushtafa Al-Ghurabi, *Tarikh Al-Farq Al-Islamiyah wa Nasatun Ilmu Al-Kalam inda AlMuslimin*, (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shabih Wa Auladuh 1993), h.78.

[95] Abū al- A’lā Mawdūdī, *Khilafah dan Kerajaan*, Cet.7 (Bandung: Mizan, 1998), h. 20.

[96] Periode selanjutnya merupakan periode klasik merupakan masa keemasan dan kejayaan Islam yang dibagi ke dalam dua fase. Pertama, adalah fase ekspansi, integrasi dan pusat kemajuan (650 - 1000 M). Pada masa ini daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan Barat, dan melalui Persia sampai ke India di belahan Timur. Daerah-daerah tersebut tunduk pada kekuasaan Islam. Pada masa ini pula berkembang dan memuncak ilmu pengetahuan, baik dibidang agama maupun umum dan kebudayaan serta peradaban Islam. Pada masa ini pula menghasilkan ulamaulama besar, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ibn Hambal Imam Syafi’i dalam bidang Fiqh. Imam alMaturidi, Imam al-Asya’ri, Wasil Ibn ‘Ata’, Abu Huzail, AlNazzam dan Al-Jubba’i dalam bidang Teologi. Zunnun alMisri, Abu Yazid al-Bustami dan al-Hallaj dalam bidang Tasawuf. Al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina dan Ibn Miskawaih dalam bidang Falsafah. Ibn Hayyam, al-Khawarizmi, alMas’udi dan al-Razi dalam bidang ilmu Pengetahuan, dan lain sebgainya.7 Kedua, fase disintegrasi (1000-1250 M) adalah masa keutuhan uma Islam dalam bidang politik mulai. Kekuasaan Khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat diambil alih dan dihancurkan oleh kekuasaan Hulagu Khan pada tahun 1258 M. Khalifah yang pada saat itu merupakan lambang kesatuan politik umat Islam hilang.,

Pada bab III yang lalu, penulis telah menguraikan pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib terkait dengan Kebebasan, Kekuasaan dan Keadilan. Kekuasaan menurut ‘Alī bin Abī Ṭālib adalah amanah yang harus dijalankan untuk melayani umat dengan prinsip kekuasaan yang berdaulat, menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran, dan memastikam kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa kekuasaan bukanlah sarana untuk mencari kemuliaan pribadi atau harta duniawi, melainkan tanggung jawab besar dari Allah SWT yang harus dipenuhi dengan integritas, transparansi, dan kasih sayang. Dalam nasihatnya kepada Mālik al-Ashtar, ‘Alī bin Abī Ṭālib memberikan panduan rinci tentang etika kepemimpinan, termasuk pentingnya mengutamakan rakyat kecil, menjaga keadilan, dan menjauhi keangkuhan. ‘Alī bin Abī Ṭālib juga menegaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki moralitas tinggi, menghormati kebebasan beragama, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, ia menekankan pembangunan ekonomi melalui reformasi sektor pertanian dan menjaga keseimbangan sosial sebagai inti pemerintahan yang stabil dan efektif.

Sedangkan kebebesan menurut ‘Alī bin Abī Ṭālib hak asasi yang melekat pada setiap individu, yang wajib dijunjung tinggi oleh negara dan masyarakat. Dalam pandangannya, kebebasan tidak hanya mencakup hak untuk menyampaikan pendapat, menjalankan keyakinan, dan menentukan pilihan hidup, tetapi juga harus berada dalam kerangka moralitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan bahwa kebebasan sejati bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang menghormati hak-hak orang lain serta tidak merusak tatanan sosial. Sebagai pemimpin yang bijaksana, ia mendorong dialog, kritik konstruktif, dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas, baik Muslim maupun non-Muslim. Baginya kebebasan merupakan pilar penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, dan sejahtera, yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan,

Terakhir, keadilan menurut ‘Alī bin Abī Ṭālib adalah landasan utama dalam pemerintahan yang baik, sebagaimana ditekankan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib dalam pesan-pesannya kepada Mālik al-Ashtar. ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kedekatan, karena hanya dengan keadilan, sebuah pemerintahan dapat berjalan efektif dan memperoleh legitimasi. Pemimpin harus memprioritaskan kepentingan rakyat melalui pengelolaan sumber daya yang bijaksana, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk golongan yang lemah dan rentan. ‘Alī bin Abī Ṭālib juga menekankan pentingnya empati, komunikasi yang terbuka, dan akuntabilitas dalam pemerintahan untuk menjaga kepercayaan rakyat. Dalam hal konflik, ia mengutamakan pendekatan damai dan menegakkan hukum secara konsisten. Pandangan-pandangannya mencerminkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang bertanggung jawab, menjadikan kesejahteraan dan keadilan rakyat sebagai fokus utama, yang relevan bagi pemerintahan modern hingga kini.

Pada bab IV ini, penulis ingin melakukan Analisa terhadap pandangan-pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib diatas, terutama melihat dari aspek Sejarah, qur’an dan pandangan para Filsuf. Sumber-sumber sejarah yang bersalkan dari literatur-literatur yang penulis temukan, serta beberapa hadis yang menceritakan kehidupan dan kebijaksanaan ‘Alī bin Abī Ṭālib yang sekiranya relevan dengan isi surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Malik al-Ahstar maupun yang dianalisis dari gaya kepemimpinan ‘Alī bin Abī Ṭālib dalam hal kekuasaan, kebebasan dan

kedilan untuk memahami kontribusinya sebagai pemimpin pada awal peradaban Islam berdasarkan kacamata filsafat.

A. Analisis Pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib Tentang Kekuasaan

‘Alī bin Abī Ṭālib, sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam, memberikan pandangan yang mendalam tentang kekuasaan sebagaimana terdapat dalam suratnya kepada Mālik al-Ashtar. Berikut penulis akan membahas pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang kekuasaan melalui aspek-aspek berikut: moralitas, hubungan sosial, kemajuan peradaban pembangunan dan strategi politik.

1. Moralitas Kekuasaan

Yang dimaksud dengan moralitas kekuasaan adalah hubungan antara kekuasaan dan tanggung jawab moral, bagaimana pemegang kekuasaan menggunakan pengaruhnya secara etis untuk kepentingan umum dan bukan keuntungan pribadi atau kelompok. *“Leaders must recognize the dual nature of power: it can cast a light of integrity and accountability or a shadow of corruption and ethical blindness, depending on how it is wielded.”*[97] Terkait dengan ini Immanuel Kant mengenai moral dalam politik, sama seperti etika deontologis yang ia anut yang mana etika tersebut menggarisbawahi kewajiban moral dan prinsip bahwa tindakan harus didasarkan pada aturan yang dapat diterapkan secara universal. Memandang dari perspektif politik, Kant berpendapat bahwa moralitas harus menjadi landasan kebijakan publik, dan tindakan politik harus sesuai dengan prinsip etis yang menghormati martabat manusia pentingnya belas kasih dan keadilan.[98]

Pada saat memimpin, ‘Alī bin Abī Ṭālib memandang bahwa moralitas adalah fondasi utama dalam pemerintahan. ‘Alī bin Abī Ṭālib juga sangat menekankan moral kekuasaan, kekuasaan tanpa moral adalah kekuasaan yang sangat buruk di mata ‘Alī bin Abī Ṭālib. Itu sebabnya ‘Alī bin Abī Ṭālib dalam awal suratnya kepada Mālik al-Ashtar menegaskan bahwa seorang penguasa itu mutlak harus memiliki sifat taqwa ‘Alī bin Abī Ṭālib menyatakan kepada Mālik al-Ashtar bahwa:

وَأَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، وَفِي الْجَلْوَةِ وَالْعَجَلَةِ، وَفِي الْخَلْوَةِ وَالِانْفِرَادِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَرَاكَ حَيْثُ مَا كُنتَ، وَيَسْمَعُكَ حَيْثُ مَا قَعَدْتَ.

Artinya: *“Dan aku wasiatkan kepadamu agar selalu bertakwa kepada Allah, baik dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi, baik dalam keadaan cepat maupun lambat, baik dalam keadaan menyendiri maupun bersama orang lain. Sesungguhnya Allah melihatmu di mana pun kamu berada, dan mendengarmu di mana pun kamu duduk.”*[99]

Dalam Islam ketaqwaan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang, terutama bagi seorang penguasa, karena dengan memiliki sifat taqwa seseorang bisa mengendalikan

---

[97] Johnson, C. E. *Meeting the ethical challenges of leadership: Casting light or shadow.* Los Angeles: SAGE Publications, 2009, h. 5

[98] Kant Immanuel. *Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace, and History* (P. Kleingeld, Ed., & D. L. Colclasure, Trans.). New Haven: Yale University Press, 2006, h. 73-85

[99] Wikishia, Teks:Surat Imam Ali kepada Mālik al-Ashtar, https://id.wikishia.net/view/Teks:Surat_Imam_Ali_kepada_Malik_al-Ashtar, diakses pada 24 November 2024 Pukul 15.00 WIB.

dirinya untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi hal-hal buruk. Dalam al-Quran surat al-Hujurat ayat 13 mengisyaratkan bahwa taqwa adalah puncak dari kepribadian sempurna seorang manusia.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya: *"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku[1] supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu."*

Pentingnya ketaqwaan ini dimata ʻAlī bin Abī Ṭālib juga diungkapkannya dalam berbagai kesempatan seperti di dalam Nahjul Balaghah khotbah ke 6:277 :

وَاعْلَمْ أَنَّ التَّقْوَى جُنَّةٌ لَكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ، وَزَادٌ لَكَ فِي كُلِّ خَيْرٍ

Artinya: *"Dan ketahuilah bahwa Taqwa adalah perisai bagimu dari segala keburukan, dan bekal bagimu dalam segala kebaikan."*[100]

Selain membahas tentang taqwa sebagai bentuk tertinggi moral yang harus dimiliki oleh penguasa ʻAlī bin Abī Ṭālib juga mewasiatkan bahwa seorang pemimpin harus memperlihatkan cinta dan rahmat kepada rakyatnya. Ia harus mampu menghapus kebencian dan kebingungan di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas keputusan politik, tetapi juga harus memperhatikan kondisi emosional dan sosial rakyatnya. Pentingnya pengampunan dan keringanan dalam menghadapi kesalahan rakyat. [101] Sebagaimana didalam suratnya kepada Mālik al-Ashtar menyatakan bahwa:

وَأَشْعِرْ قَلْبَک الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيةِ، وَالْمَحَبَّةَ لَهُمْ، وَاللُّطْفَ بِهِمْ، وَلاَ تَكونَنَّ عَلَيهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَک فِی الدِّينِ، وَإِمَّا نَظِيرٌ لَک فِی الْخَلْقِ، يفْرُطُ مِنْهُمُ الزَّلَلُ، وَتَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ، وَيؤْتَى عَلَى أَيدِيهِمْ فِی الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ، فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِک وَصَفْحِک مِثْلِ الَّذِی تُحِبُّ وَتَرْضَى أَنْ يعْطِيک اللهُ مِنْ عَفْوِهِ وَصَفْحِهِ، فَإِنَّک فَوْقَهُمْ، وَوَالِی الْاَمْرِ عَلَيک فَوْقَک، وَاللهُ فَوْقَ مَنْ وَلاَّک! وَقَدِ اسْتَكْفَاک أَمْرَهُمْ، وَابْتَلاَک بِهِمْ

Artinya: " *Tanamkan dalam hatimu rasa kasih sayang, cinta dan kelembutan budi pekerti pada rakyat. Jangan sampai kaujadikan dirimu laksana binatang buas yang bersiap memangsa mereka. Mereka itu sesungguhnya hanya satu di antara dua: saudaramu dalam seagama atau serupamu sebagai sesama makhluk. Kadang-kadang mereka tergelincir dalam kesalahan dan tergoda oleh pelanggaran, sehingga timbul akibat perbuatan tangan mereka, baik sengaja atau tidak, (suatu kejahatan). Oleh sebab itu, berilah maaf dan*

---

[100] Balagha.Net, Teks: Nahjul Balaghah https://balagha.net/taqwa-provision-of-believers/ali-ibn-abi-talib-taqwa, diakses pada 24 November 2024 Pukul 16:00 WIB

[101] Deddi Fasmadhy Satiadharmanto, Rifka Safira, Rahmiati, *Kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib Dan Penerapan Tahkim Dalam Penyelesaian Konflik: Analisis Kasus Pertempuran Siffin Dengan Pendekatan Hukum Empiris Dan Perspektif Islam*, Marwah Hukum, Vol. 2 No. 2, Juli 2024, h. 41-55

ampunanmu pada mereka sedapat mungkin, sebagaimana juga engkau mengharapkannya dari Tuhanmu. Engkau berada di atas mereka; pemimpin yang mengangkatmu berada diatasmu; dan Allah swt berada di atas orang yang telah mengangkatmu! Sungguh, Allah telah menugaskan kepadamu penyelesaian urusan mereka, dan Dia mengujimu dengan mereka".[102]

Hal ini mencerminkan pandangan bahwa pemimpin harus bersikap bijaksana dan tidak terburu-buru dalam menghukum, melainkan mencari cara untuk membimbing rakyat ke jalan yang benar. 'Alī bin Abī Ṭālib juga memberikan nasihat moral yang mendalam bagi penguasa:[103]

a. Integritas. Penguasa harus setia pada janji-janji yang dibuat dan tidak melanggarnya.
b. Menjaga Kehormatan. Ia menekankan pentingnya menjaga kehormatan individu dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain tanpa alasan yang jelas.

Nasihat yang disampaikan 'Alī bin Abī Ṭālib tersebut sejalan dengan pendapat John Rawls didalam teorinya tentang Keadilan sebagai Kewajaran (*Justice as Fairness*). Rawls berpendapat bahwa prinsip-prinsip keadilan harus diatur oleh kesepakatan sosial yang adil, di mana kebebasan dan kesetaraan hak harus dijamin dalam masyarakat politik. Rawls menekankan pentingnya keadilan distributif dalam menentukan kebijakan publik.

Apabila dianalisis berdasarkan perspektif al-Qur'an sikap tersebut sejalan dengan firman Allah SWT didalam surah al-imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya: "*Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal*".

Ayat ini turun karena pada saat itu, Ketika setelah nabi Muhammad SAW memberi kabar kepada kaum mukmin tuntunan secara umum, Allah lalu memberi tuntunan secara khusus dengan menyebutkan karuniaNya kepada Nabi Muhammad. Maka berkat rahmat yang besar dari Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka yang melakukan pelanggaran dalam *Perang Uhud*. Sekiranya engkau (Muhammad) bersikap keras, buruk perangai, dan berhati kasar, tidak toleran dan tidak peka terhadap kondisi dan situasi orang lain, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah, hapuslah kesalahan-kesalahan mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, yakni urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, dan kemasyarakatan. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad untuk melaksanakan hasil musyawarah, maka

---

[102] Wikishia, Teks:Surat Imam Ali kepada Mālik al-Ashtar, https://id.wikishia.net/view/Teks:Surat_Imam_Ali_kepada_Malik_al-Ashtar, diakses pada 16 Oktober 2024 Pukul 15.00 WIB.

[103] Sukron kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), h.12

bertawakallah kepada Allah, dan akuilah kelemahan dirimu di hadapan Allah setelah melakukan usaha secara maksimal. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

2. Hubungan Sosial antara Penguasa dan Rakyat

Masa kepemimpinan ‘Alī bin Abī Ṭālib erat hubungan antara penguasa dan rakyat yang mana harus didasarkan pada prinsip keterbukaan dan komunikasi. Ia menyarankan agar penguasa selalu mendengarkan kebutuhan rakyat dan tidak menjauh dari mereka. ‘Alī bin Abī Ṭālib memiliki pandangan bahwa pemimpin harus lebih responsif dan peka terhadap berbagai kebutuhan masyarakat dan menjaga hubungan yang harmonis dengan warga negara. Perilaku ini tercermin jelas sebagai nasihat ‘Alī bin Abī Ṭālib yang menyatakan sebagai berikut:

فَامْلِكْ هَوَاکَ، وَشُحَّ بِنَفْسِکَ عَمَّا لايَحِلُّ لَکَ، فَإِنَّ الشُّحَّ بِالنَّفْسِ الْإِنْصَافُ مِنْهَا فِيمَا أَحَبَّتْ أَوْ كَرِهَتْ

Artinya: “*Untuk itu, kuasailah hawa nafsumu dan tahan dirimu dari segala yang tidak dihalalkan bagimu. Menahan diri adalah bersikap adil pada diri sendiri, baik dalam hal yang kau sukai ataupun kau benci*”.[104]

Berdasarkan surat tersebut tercermin sikap bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālib sedang mengingatkan Malik untuk tidak terpengaruh oleh orang-orang yang kikir atau tamak, karena mereka dapat merusak kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. ‘Alī bin Abī Ṭālib menggarisbawahi pentingnya hubungan yang baik antara penguasa dan rakyat:[105]

a. Komunikasi. Penguasa harus meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan rakyatnya agar memahami kebutuhan dan masalah mereka.
b. Keterbukaan. ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan bahwa penguasa tidak boleh menjauh dari rakyatnya, karena hal ini dapat menyebabkan kurangnya informasi tentang kondisi masyarakat

Nilai komunikasi yang baik dan terbuka ini dapat dilihat pada saat ‘Alī bin Abī Ṭālib selalu mengutamakan *syura* (musyawarah) dalam pemerintahan. Sebagai khalifah, beliau kerap mengajak para sahabat, ahli agama, dan tokoh masyarakat untuk berdiskusi terkait persoalan yang dihadapi umat Islam. Tidak diragukan lagi kejujuran dan integritas menjadi nilai-nilai yang sangat penting dalam menjalankan kekuasaan pada saat pemerintahan ‘Alī bin Abī Ṭālib bin Abi Thalib.

‘Alī bin Abī Ṭālib terkenal karena kesediaannya menerima kritik dari rakyatnya. Beliau memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, bahkan kritik terhadap kebijakannya. Dalam salah satu khutbahnya, ‘Alī bin Abī Ṭālib berkata:

لا تَستَحِ من قَولِ الحَقِّ أو نَصِيحَةٍ عادِلَةٍ لِي، فإنّي لَسْتُ مَن يَعْتَبِرُ نَفسَهُ بَرِيئًا مِنَ الخَطَأ

"Janganlah kalian segan berkata benar atau memberi nasihat yang adil kepadaku, karena

---

[104] Wikishia, Teks:Surat Imam Ali kepada Mālik al-Ashtar, https://id.wikishia.net/view/Teks:Surat_Imam_Ali_kepada_Malik_al-Ashtar, diakses pada 16 Oktober 2024 Pukul 16.00 WIB.

[105] Sukron kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik… Op.Cit.,* h. 14.

aku bukanlah orang yang menganggap dirinya bebas dari kesalahan.".[106] Pernyataan ini mencerminkan bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālib sangat terbuka terhadap pendapat dan kritik, serta siap mendengarkan suara rakyat tanpa merasa tersinggung atau otoriter.

3. Kemajuan Peradaban Pembangunan (Reformasi Pembangunan)

Sebagaimanana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan pada pentingnya sektor ekonomi pembangunan hal ini tercermin sebagaimana ‘Alī bin Abī Ṭālib memastikan sektor pertanian dipastikan dilindungi oleh pemerintah. Serta mendorong perkembangan para pedagang agar menyejahterakan ekonomi masyarakat. Kutipan dari surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar pada bab sebelumnya menunjukkan pendekatan yang menitikberatkan pada keadilan distributif dan keseimbangan sosial. Dalam konteks filsafat hukum:

a. Aliran Filsafat Hukum Islam

‘Alī bin Abī Ṭālib sebagai Praktisi Etika Islam menggunakan pendekatan yang mencerminkan prinsip *maqashid syar'iyyah*, yakni perlindungan terhadap kemaslahatan masyarakat (*hifdz al-maslahah*).[107] Fokus pada pembangunan sektor pertanian mencerminkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi, yang menjadi pilar kesejahteraan umat. Prinsip ini mendukung keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, di mana kesejahteraan petani dan pembangunan ekonomi menjadi tujuan utama kebijakan.

b. Pendekatan Aristotelian

Pendapat ini memiliki kemiripan dengan pemikiran Aristoteles, yang berfokus pada konsep keadilan distributif dalam filsafat politiknya. Aristoteles menyatakan bahwa stabilitas suatu negara bergantung pada distribusi kekayaan yang merata dan pengelolaan sumber daya yang adil.[108] ‘Alī bin Abī Ṭālib menerapkan prinsip ini dengan menekankan pentingnya pertanian sebagai tulang punggung ekonomi negara. Ibnu Khaldun, seorang filsuf dan sejarawan Islam, mendukung gagasan ini dalam karya monumentalnya, *Muqaddimah*. Ia menyatakan bahwa pembangunan ekonomi (khususnya pertanian) adalah landasan stabilitas sosial dan politik. Menurut Ibnu Khaldun, jika pemerintah memberikan perlindungan dan insentif kepada petani, pendapatan negara akan meningkat secara alami melalui kemakmuran masyarakat.

Filosofi kekuasaan pada masa’Alī bin Abī Ṭālib dalam mendukung pembangunan ekonomi dengan mengedepankan sektor pertanian dapat dilihat melalui kacamata filsafat hukum modern, seperti:

a. Aliran Utilitarianisme. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, yang menekankan pentingnya kebijakan yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.[109] Fokus pada pembangunan sektor pertanian bertujuan

---

[106] Delmus Puneri Salim, *Politik Islam Dalam Al-Qur'an (Tafsir Siyasah Surat Ali Imran Ayat 159)*, Aqlam: IAIN Manado, Vol 1, No 1 (2018), h. 43-53

[107] Miftahul Huda, Nurwadjah Ahmad, dan Andewi Suhartini, *Konsep Maqashid Syari'ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam*, Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 19. No. 1. Januari – Juni 2022, h.149.

[108] Ana Suheri, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Morality, Volume 4 Nomor 1, Juni 2018, h.62

[109] Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001), h. 14-19.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, sehingga menghasilkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbanyak.

b. Teori Keadilan John Rawls. John Rawls dalam *A Theory of Justice* menekankan prinsip keadilan sosial, di mana kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk menguntungkan golongan paling rentan (seperti petani).[110] Pendekatan ‘Alī bin Abī Ṭālib mencerminkan nilai ini, karena beliau memprioritaskan pembangunan pertanian sebagai langkah mendukung kesejahteraan petani dan golongan lemah.

Berdasarkan kutipan yang ada didalam surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar yang mana pemikirannya sesuai dengan teori ekonomi berkelanjutan modern, yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus didasarkan pada perlindungan sumber daya alam.[111] Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan tidak merugikan generasi mendatang.

‘Alī bin Abī Ṭālib mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam kebijakannya, khususnya terkait pembangunan sektor pertanian. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai filsafat hukum Islam (*maqashid syar’iyyah*), sejalan dengan gagasan filsuf klasik seperti Aristoteles, dan didukung oleh pandangan filsuf modern seperti John Rawls, Jeremy Bentham, dan teori ekonomi berkelanjutan.

Berkenaan dengan beberapa pendapat para ahli filsafat tersebut, untuk itu penulis mencoba menelaah dengan beberapa hadis yang mengatur mengenai relevansi yang berkesinambungan dengan nilai-nilai pembangunan yang dicerminkan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib. Adapun hadis yang berbicara mengenai pentingnya pertanian yang berbunyi sebagai berikut, Rasulullah SAW bersabda: “*Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman atau menabur benih, lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya*." (HR. Bukhari dan Muslim).[112] Hadis ini menunjukkan bahwa aktivitas pertanian bukan hanya bernilai ekonomi tetapi juga bernilai ibadah. Islam memandang pentingnya pertanian sebagai bagian dari menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

4. Strategi Politik dalam Kekuasaan

Meninjau berdasarkan aspek strategi politik, ‘Alī bin Abī Ṭālib memberikan nasihat strategis yang mencerminkan pemahaman mendalam tentang dinamika kekuasaan yang harus memiliki moral. Ia menekankan pentingnya berkonsultasi dengan orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman, serta menghindari individu-individu yang memiliki sifat negatif seperti ketakutan atau keserakahan. Ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang baik memerlukan dukungan dari mereka yang memiliki pengetahuan dan

---

[110] John Rawls, *A theory of justice teori keadilan: dasar-dasar filsafat poliik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara*, Terjemahan : Yogyakarta : Pustaka Pelajar., 2011, h. 500.

[111] Wikishia, Teks:Surat Imam Ali kepada Mālik al-Ashtar, https://id.wikishia.net/view/Teks:Surat_Imam_Ali_kepada_Malik_al-Ashtar, diakses pada 20 Desember 2024 Pukul 16.00 WIB.

[112] News UAD, *Kesadaran Mencintai dan Merawat Bumi*, https://news.uad.ac.id/kesadaran-mencintai-bumi/:.text=%E2%80%9CDari%20Anas%20bin%20Malik%20ra.%20berkata:%20Rasulullah,kecuali%20akan%20menjadi%20sedekah%20baginya%E2%80%9D%20(HR.%20Al%2DBukhari). diakses pada 20 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB.

integritas. Konsep bernegosiasi ini sejalan dengan gagasan Robert Dahl dalam bukunya yang berjudul *Who Governs?*, baginya kekuasaan dalam politik tersebar di antara banyak kelompok yang saling bersaing.[113] Strategi politik, menurut Dahl, melibatkan koalisi dan negosiasi antara berbagai kelompok kepentingan untuk mencapai kesepakatan. Dia percaya bahwa sistem politik yang sehat adalah yang melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan, dan strategi politik yang efektif adalah yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan. Dan hal tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib dalam memutuskan strategi politiknya saat memimpin.[114]

‘Alī bin Abī Ṭālib juga mengingatkan tentang pentingnya pengambilan keputusan politik. Ia berpendapat bahwa penguasa harus mampu membedakan antara kebenaran dan kebohongan, serta tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Berdasarkan konsep strategi ‘Alī bin Abī Ṭālib dalam berpolitik, sebagaimana yang dijelaskan mencerminkan beberapa hal yang dominan, antara lain sebagai berikut:

a. Kebijakan Anti-Korupsi

‘Alī bin Abī Ṭālib menerapkan kebijakan tegas terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Beliau secara terbuka mengganti pejabat yang tidak amanah atau terlibat dalam korupsi, tanpa memandang status atau kedekatan pribadi. Setelah diangkat menjadi khalifah, ‘Alī bin Abī Ṭālib memecat gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan, karena dianggap tidak kompeten atau tidak adil. Salah satunya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjadi gubernur Syam.[115] ‘Alī bin Abī Ṭālibberkata, *"Aku tidak akan membiarkan mereka yang mengkhianati amanah rakyat untuk tetap berkuasa."*.

b. Menghindari Pemimpin dengan Sifat Negatif

‘Alī bin Abī Ṭālib menegaskan bahwa seorang pemimpin harus memilih orang-orang yang memiliki integritas dan menghindari individu dengan sifat negatif seperti ketakutan, keserakahan, atau kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan. ‘Alī bin Abī Ṭālib sangat selektif dalam menunjuk pejabat di bawahnya. Ia memilih mereka yang dikenal jujur, adil, dan kompeten. Sebaliknya, ‘Alī bin Abī Ṭālib tidak segan-segan menegur atau mengganti pejabat yang tidak sesuai dengan prinsip moralitas dan keadilan. Tentunya strategi ini mencerminkan *elitisme moral*, di mana pemimpin berusaha memastikan bahwa hanya individu-individu dengan standar moral tinggi yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan.[116]

c. Negosiasi dan Diplomasi

‘Alī bin Abī Ṭālib memahami pentingnya negosiasi dalam menyelesaikan konflik politik. Meskipun menghadapi banyak tantangan, ‘Alī bin Abī Ṭālib tetap mengutamakan dialog dan diplomasi sebagai langkah pertama sebelum menggunakan kekuatan militer. Contoh Strategi Politik:

---

[113] Robert Dahl, *Who Govern? Democracy and Power in an America City*, (New Haven and London, Yale University Press, 1961), h. 80

[114] Robert Dahl, *Who Govern? Democracy and Power in an America City*,… h. 82.

[115] Kementrian Agama Indonesia, *Sejarah Kebudayaan Islam/Kementerian Agama*, (Jakarta : Kementerian Agama 2014), h. 112.

[116] Muhadam Labolo, *Etika Pemerintahan*, (Purbalingga: CV. Eurika Media Aksara, 2023), h.2.

1) Perang *Shiffin* (657 M). ‘Alī bin Abī Ṭālib menunjukkan fleksibilitas politik dengan menerima tawaran perdamaian dari pasukan Muawiyah yang mengangkat mushaf Al-Qur'an. Meskipun keputusan ini kontroversial di kalangan pasukannya, ‘Alī bin Abī Ṭālib berupaya menghindari konflik lebih besar.[117]
2) Dialog dengan Khawarij. ‘Alī bin Abī Ṭālib membuka ruang dialog untuk mendengarkan pandangan Khawarij yang keluar dari barisannya. Meski akhirnya ia harus bertindak tegas terhadap kelompok ini, pendekatan diplomasi tetap menjadi prioritas awal.[118]

Strategi ini sejalan dengan gagasan Robert Dahl bahwa politik adalah proses negosiasi antara berbagai kelompok kepentingan. ‘Alī bin Abī Ṭālib berusaha merangkul kelompok-kelompok yang berbeda pandangan demi mencapai stabilitas.[119]

B. Analisis Pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib Tentang Kebebasan

Berikut analisis penulis terkait kebebasan dalam pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib yang dikorelasikan dengan pandangan para filsuf modern, antara lain sebagai berikut:.

1. Jangan Menindas Kebebasan

Sebagaimana yang ada didalam bab sebelumnya yang telah mengutip pada surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar yang menasihati untuk menanamkan rasa kasih sayang tanpa adanya diskriminasi mencerminkan beberapa analisis Filsafat hukum alam menekankan bahwa hukum memiliki dasar moral universal yang berasal dari kodrat manusia dan kehendak *ilahi*. Pemikiran ini sejalan dengan prinsip ‘Alī bin Abī Ṭālib yang menekankan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, yang memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun, termasuk oleh pemimpin.

Menurut Thomas Aquinas, salah satu tokoh utama aliran hukum alam, hukum yang baik harus selaras dengan hukum ilahi dan hukum kodrati. Dalam pandangan Aquinas: *"Hukum adalah perintah akal yang diberikan untuk kebaikan bersama dan ditetapkan oleh otoritas yang memiliki tanggung jawab untuk komunitas."*[120] Ini berarti bahwa keadilan dan perlindungan terhadap kebebasan rakyat adalah bagian integral dari hukum yang sah. Hubungan dengan ‘Alī bin Abī Ṭālib: berdasarkan surat ‘Alī bin Abī Ṭālib yang menjadi objek kajian penulis kepada Mālik al-Ashtar, ‘Alī bin Abī Ṭālibmenyatakan sebagaimana pada bab sebelumnya bahwa *"Mereka itu ada dua golongan: pertama, saudaramu dalam agama, dan kedua, sesama manusia ciptaan Tuhan."* Hal ini menunjukkan bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālibmengakui adanya martabat manusia yang universal dan pentingnya keadilan tanpa diskriminasi, yang merupakan inti dari hukum alam.[121]

---

[117] Yat Rospia Brata, *Perang Shifin*, Jurnal Artefak, Volume 12, Nomor 6, 2020, h. 85-96.

[118] Rubini, *Khawarij Dan Murji'ah Perspektif Ilmu Kalam,* Al-Manar, Volume 7 Nomor 1, Juni 2018, h. 123.

[119] Robert Dahl, *Who Govern? Democracy and Power in an America City*,…h. 82.

[120] Internet Ensiklopedia of Philosophy, *Thomas Aquinas: Filsafat Moral*, https://iep.utm.edu/thomasaquinas-moral-philosophy/, diakses pada 20 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB.

[121] Wikishia, *Teks:Surat Imam Ali kepada Mālik al-Ashtar;* https://id.wikishia.net/view/Teks:Surat_Imam_Ali_kepada_Malik_al-Ashtar, diakses pada 24 Desember 2024 Pukul 15.00 WIB.

Sebaliknya, positivisme hukum yang diwakili oleh pemikir seperti John Austin lebih berfokus pada hukum sebagai perintah yang berasal dari otoritas, tanpa memperhatikan unsur moralitas atau kebebasan. Dalam pandangan ini: *"Hukum adalah perintah dari penguasa kepada rakyatnya, dan rakyat wajib patuh selama hukum itu diberlakukan."*.[122] Positivisme hukum John Austin bertentangan dengan pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib yang menekankan kebebasan dan martabat manusia. Bagi positivis, hukum bisa saja menindas kebebasan rakyat selama itu sah secara legal. Contohnya adalah rezim otoriter yang memberlakukan hukum untuk memperkuat kekuasaan, tanpa mempertimbangkan aspek moral atau keadilan. Peringatan ‘Alī bin Abī Ṭālib terhadap Otoritarianisme yang menegaskan bahwa pemimpin agar tidak menyalahgunakan kekuasaan seperti "*binatang buas yang memangsa mereka*," yang merupakan kritik langsung terhadap pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada kekuasaan tanpa mempertimbangkan moralitas.

Pada aliran utilitarianisme, yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, prinsip utama adalah mencapai "*kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar*." Meski pada dasarnya utilitarianisme mengutamakan kesejahteraan rakyat, pandangan ini juga memiliki potensi untuk mengorbankan kebebasan individu jika dianggap perlu demi kepentingan umum.[123] Berbeda dengan aliran utilitarianisme, pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang keseimbangan kebebasan, tidak hanya memikirkan kesejahteraan kolektif, tetapi juga melindungi kebebasan individu. Ia berpendapat bahwa rakyat memiliki hak yang harus dihormati, sebagaimana tercermin dalam suratnya yang telah penulis kutip pada bab sebelumnya *"Tanamkanlah di hatimu rasa kasih sayang kepada rakyat, cinta kepada mereka, dan kelembutan terhadap mereka."* Ini menunjukkan bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālib percaya kesejahteraan tidak boleh dicapai dengan cara menindas atau melanggar hak-hak individu.

Immanuel Kant menyatakan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Dalam bukunya *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, Kant menekankan bahwa manusia memiliki martabat karena kemampuan mereka untuk bertindak secara rasional dan moral.[124] Pendekatan ini sejalan dengan pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib, yang melihat manusia sebagai makhluk bermartabat yang harus dihormati. Sedangkan, Dahl menekankan pentingnya keterlibatan banyak pihak dalam pengambilan keputusan politik untuk mencegah dominasi otoriter. Ini relevan dengan prinsip ‘Alī bin Abī Ṭālib yang mengutamakan konsultasi dan keadilan dalam pemerintahan. Beberapa argumentasi para ahli filsafat tersebut sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mendukung pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang kebebasan, Rasulullah SAW bersabda:

"إِنَّ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي اللَّهِ عِنْدَهُ عَلَى مِبَاحِدَ الْقَائِمَةِ مِنَ النُّورِ عِنْدَ الْوَهَّابِ وَيَدَاهُ يَمِينٌ"

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah akan ditempatkan di mimbar-mimbar dari cahaya di sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil*

---

[122] Depi Novianti, Konsep Hukuman Menurut John Austin, Nusantara, Volume 1 Nomor 1, 2024, h.1-18.

[123] Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation,* Op.Cit., h. 17.

[124] Endang Pratiwi, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?,* Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022, h.39.

dalam hukum, terhadap keluarga mereka, dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka." (HR. Muslim).[125]

Pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang kebebasan, dan perlindungan hak-hak rakyat mencerminkan prinsip-prinsip filsafat hukum alam dan moralitas universal. Pandangan ini bertolak belakang dengan positivisme hukum yang lebih fokus pada kekuasaan dan utilitarianisme yang kadang mengorbankan hak individu demi kepentingan umum. Hadis-hadis Nabi mendukung pandangan Ali, menegaskan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam pemerintahan.

2. Kebebasan Partisipasi Politik

Kebebasan partisipasi politik pada masa ‘Alī bin Abī Ṭālib merupakan topik yang kaya dan kompleks, mencerminkan dinamika sosial dan politik yang terjadi dalam masyarakat Islam awal. ‘Alī bin Abī Ṭālib, sebagai khalifah keempat dalam sejarah Islam, memimpin pada periode yang penuh tantangan dan konflik. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kebebasan berpolitik dipraktikkan dan dipahami oleh masyarakat saat itu, serta bagaimana prinsip-prinsip Islam mempengaruhi partisipasi politik. Salah satu hadist yang relevan dengan kebebasan partisipasi politik sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: *"Setiap Muslim adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya."*(HR. Bukhari dan Muslim).[126]

Hadist ini menekankan pentingnya tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya, serta hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kebebasan partisipasi politik pada masa ‘Alī bin Abī Ṭālib dapat dilihat dari beberapa aspek:

a. Musyawarah: ‘Alī bin Abī Ṭālib sering mengajak masyarakat untuk berdiskusi dan memberikan pendapat dalam pengambilan keputusan. Konsep musyawarah ini tercermin dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ۗ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya: *“Maka karena rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”*

b. Mufakat: pentingnya mufakat dalam mengambil keputusan yang melibatkan banyak pihak. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses politik sangat dihargai.

---

[125] Detiknews, "*Kedudukan Orang yang Adil di sisi Allah SWT*" , https://news.detik.com/infografis/d-5544886/kedudukan-orang-yang-adil-di-sisi-allah-swt, diakses pada 25 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB.

[126] Eka Purwitasari, *Benarkah Pemimpin Adalah Cerminan dari Rakyatnya? Simak Dalilnya!,* Rumah Zakat, https://www.rumahzakat.org/pemimpin-cerminan-rakyat/:~:text=Hadis%20Rasulullah%20saw.,akan%20mempengaruhi%20kualitas%20kepemimpinan%20mereka diakses pada 25 Desember 2024 Pukul 18.00 WIB.

c. Penerapan Keadilan: ‘Alī bin Abī Ṭālib dikenal sebagai pemimpin yang memperjuangkan keadilan. Ia berusaha untuk mendengarkan suara-suara dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki pandangan berbeda. Hal ini terlihat dalam kebijakannya untuk mengadakan arbitrase (tahkim) setelah Perang Siffin, di mana ia ingin menghindari lebih banyak pertumpahan darah di antara umat Islam.
d. Penghargaan terhadap Pendapat: Dalam banyak situasi, ‘Alī bin Abī Ṭālib menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik dan masukan dari sahabat-sahabatnya maupun rakyat kecil. Ini menciptakan lingkungan di mana orang-orang merasa memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat mereka tanpa takut akan reperkusi. Apabila merujuk pada konsep *Politika*, Aristoteles membedakan antara bentuk pemerintahan yang baik (seperti monarki, aristokrasi, dan *politeia*) dengan bentuk pemerintahan yang buruk (tirani, oligarki, dan demokrasi berlebihan). Pemimpin yang baik, menurut Aristoteles, adalah yang melayani rakyat dan mengambil keputusan demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.[127]

Dalam konteks kebebasan partisipasi politik pada masa ‘Alī bin Abī Ṭālib, beberapa aliran filsafat dapat diidentifikasi berdasarkan aliran ini menekankan pentingnya keadilan sosial dan musyawarah dalam pemerintahan. Tokoh seperti Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa pemerintahan yang baik harus didasarkan pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pemikiran-pemikiran tentang hak asasi manusia dan kebebasan individu juga relevan.

3. Hak Asasi Manusia dalam Pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib

Salah satu tema sentral dalam surat ‘Alī bin Abī Ṭālib adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia. ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi. Dalam suratnya, ia menegaskan: *"Ingatlah bahawa rakyat negara itu terbahagi kepada dua. Mereka sama ada saudara seagama dengan kamu atau saudara sesama manusia. Mereka mempunyai kelemahan dan boleh melakukan kesilapan, malah sesetengahnya memang melakukan kesalahan. Maafkan mereka seperti kamu mahukan Allah mengampunkan kamu.".* [128] Pernyataan ini menunjukkan bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālib menganggap pentingnya toleransi dan pengertian terhadap kesalahan manusia. Kebebasan tidak hanya berarti tidak adanya penindasan, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap hak individu untuk membuat kesalahan dan mendapatkan kesempatan untuk memperbaikinya.

Sikap ini terbukti nyata Setelah Perang Jamal (656 M), ‘Alī bin Abī Ṭālib menunjukkan sikap yang sangat toleran terhadap musuh-musuhnya, meskipun mereka memerangi dia. Perang ini terjadi akibat konflik internal di kalangan umat Islam setelah wafatnya khalifah Utsman bin Affan, di mana Aisyah, Thalhah, dan Zubair memimpin pemberontakan terhadap ‘Alī bin Abī Ṭālib. Setelah perang berakhir dan ‘Alī bin Abī Ṭālib

---

[127] Salsabila Nurul Syifa, dkk, *Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles serta Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang – Undang Dasar Tahun 1945*, Jurnal Filsafat Terapan, Volume 1 Nomor 1, (2023), h. 1-25

[128] Machfud Saefudin, dkk, *Dinamika Perdaban Islam Prespektif Historis* (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2013), h. 31

menang, ia tidak memilih untuk membalas dendam terhadap mereka yang melawannya. Sebaliknya, ‘Alī bin Abī Ṭālib memberi ampunan kepada musuh-musuh yang tertangkap dan bahkan memperlakukan Aisyah, yang memimpin pasukan lawan, dengan hormat. Ia mengantarkannya dengan aman kembali ke Madinah.[129] Tindakan ini mencerminkan bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālib memahami pentingnya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ia tidak memaksakan hukuman berat kepada mereka yang telah melakukan kesalahan, tetapi justru memberi mereka ruang untuk belajar dari kesalahan mereka dan kembali pada jalan yang benar. Serta apabila ditelaah berdasarkan firman Allah SWT, ‘Alī bin Abī Ṭālib telah mencerminkan sikap tersebut didalam surah al-Isra’ ayat 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

Artinya: “*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna*”. Secara tidak langsung ayat ini menjelaskan kepada umat muslim bahwa hak manusia bagi setiap individu merupakan hak kodrati yang telah Allah berikan dimana manusia diciptakan sama. Untuk itu, walaupun ada perbedaan dan kesalahan setiap manusia berhak mendapatkan toleransi serta tidak menindas yang lemah serta mengakui setiap hak individu yang diberikan Allah SWT.

Menurut penulis sikap ‘Alī bin Abī Ṭālib mencerminkan pola pikir modern, karena sejalan dengan perspektif Eleanor Roosevelt, sebagai ketua komite yang merumuskan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 1948, memainkan peran penting dalam memperluas konsep HAM ke tingkat internasional. Deklarasi ini berisi 30 pasal yang mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Eleanor Roosevelt, HAM harus mencakup tidak hanya kebebasan dari penindasan politik, tetapi juga hak untuk hidup dengan martabat, yang mencakup hak atas pekerjaan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Roosevelt percaya bahwa HAM harus diterapkan di seluruh dunia dan semua negara wajib menjunjung tinggi hak-hak ini tanpa pengecualian.[130]

4. Kebebasan Hak untuk Hidup (Hak Kodrati)

Hak untuk hidup merupakan hak kodrati yang menjadi landasan fundamental bagi semua hak asasi manusia lainnya. Dalam pemerintahan Imam ‘Alī bin Abī Ṭālib as, hak untuk hidup tidak hanya diakui sebagai hak dasar, tetapi juga dihormati dan dilindungi secara menyeluruh. Sebagai pemimpin, ‘Alī bin Abī Ṭālib menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip ini dengan memperingatkan pentingnya menghindari pertumpahan darah yang tidak semestinya, pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib bahwa nyawa manusia adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat. Bahkan, dalam konteks masyarakat yang pluralistik pada masa pemerintahannya, ‘Alī bin Abī Ṭālib menjamin hak hidup tidak hanya kepada kaum Muslim, tetapi juga kepada non-Muslim dan masyarakat dari berbagai latar

---

[129] Alif Kurniawan, dkk, *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam: Dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern*, (Malang: Qoulun Pustaka, 2014), h. 300.

[130] Rosevelt House, *My Most Important Task” Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights*, https://www.rooseveltthouse.hunter.cuny.edu/exhibits/my-most-important-task/, diakses pada 27 Januari 2025 Pukul 12.00 WIB.

belakang, sebagaimana diisyaratkan dalam kebijakan beliau yang adil dan penuh rahmat terhadap semua lapisan masyarakat. Argumentasi tersebut sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib dalam suratnya yang memberikan nasehat bahwa:

ثُمَّ الْصَقْ بِذَوِى الْمُرُوءَاتِ وَالْاَحْسَابِ، وَأَهْلِ الْبُيوتَاتِ الصَّالِحَةِ، وَالسَّوَابِقِ الْحَسَنَةِ، ثُمَّ أَهْلِ النَّجْدَةِ وَالشَّجَاعَةِ، وَالسَّخَاءِ وَالسَّمَاحَةِ; فَإِنَّهُمْ جِمَاعٌ مِنَ الْكرَمِ، وَشُعَبٌ مِنَ الْعُرْفِ. ثُمَّ تَفَقَّدْ مِنْ أُمُورِهِمْ مَا يَتَفَقَّدُ الْوَالِدَانِ مِنْ وَلَدِهِمَا، وَلاَ يَتَفَاقَمَنَّ فِى نَفْسِک شَىءٌ قَوَّيتَهُمْ بِهِ، وَلاَ تَحْقِرَنَّ لُطْفاً تَعَاهَدْتَهُمْ بِهِ وَإِنْ قَلَّ; فَإِنَّهُ دَاعِيةٌ لَهُمْ إِلَى بَذْلِ النَّصِيحَةِ لَک، وَحُسْنِ الظَّنِّ بِک. وَلاَ تَدَعْ تَفَقُّدَ لَطِيفِ أُمُورِهِمُ اتِّكالاً عَلَى جَسِيمِهَا، فَإِنَّ لِلْيسِيرِ مِنْ لُطْفِک مَوْضِعاً يَنْتَفِعُونَ بِهِ، وَلِلْجَسِيمِ مَوْقِعاً لا يسْتَغْنُونَ عَنْهُ.

Artinya:” *Utamakanlah mereka yang berasal dari lingkungan yang menjaga kebersihan pribadinya, dari keluarga-keluarga terhormat dan yang tercatat jasa-jasa mereka di kalangan masyarakat; kemudian yang dikenal kekesatriaan, keberanian, kedermawanan dan kemurahan hatinya. Mereka itulah tempat berkumpulnya kemuliaan dan kebaikan. Perhatikan baik-baik segala urusan mereka seperti halnya kedua orangtua terhadap anak-anak mereka. Jangan membesar-besarkan apa saja yang telah kauberikan kepada mereka guna penambah kekuatan mereka, dan jangan meremehkan kasih sayang yang kau curahkan atas mereka betapapun itu hanya sedikit. Semuanya itu akan mendorong mereka bersikap tulus dan berbaik-sangka terhadap dirimu. Oleh karena itu, jangan kau tinggalkan perhatianmu terhadap hal yang kecil-kecil dari urusan mereka, hanya disebabkan engkau telah berasa cukup memperhatikan urusan mereka yang besar-besar. Mereka pasti akan merasakan manfaat perhatianmu atas yang kecil sebagaimana mereka membutuhkannya atas yang besar.*”[131]

Hak untuk hidup memiliki akar yang dalam dalam filsafat hukum, terutama dalam kaitannya dengan hak kodrati (*natural rights*). Hak ini dianggap sebagai hak bawaan yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, terlepas dari status sosial, ras, atau keyakinan agama. Dalam pemikiran filsafat hukum, hak untuk hidup sering dikaitkan dengan beberapa aliran dan tokoh penting berikut:

a. Aliran Hukum Kodrat (*Natural Law*)

Aliran hukum kodrat menegaskan bahwa hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, berasal dari hukum alamiah yang bersifat universal dan abadi. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Islam yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah anugerah dari Allah Swt kepada setiap manusia. John Locke, salah satu tokoh utama aliran hukum kodrat, menyatakan: "*Every man has a property in his own person. This nobody has any right to but himself.*" Locke memandang bahwa hak untuk hidup adalah hak dasar yang tidak dapat dirampas oleh siapa pun kecuali berdasarkan hukum yang adil.[132] Pandangan ini memiliki korelasi yang kuat dengan prinsip ‘Alī bin Abī

---

[131] Wikisyiah, *Teks:Surat Imam Ali kepada Mālik al-Ashtar,* https://id.wikishia.net/view/Teks:Surat_Imam_Ali_kepada_Malik_al-Ashtar, diakses pada 13 Februari 2025 Pukul 20.00 WIB.

[132] John Locke, *The Second Treatise of Government, Barnes & Noble Publishing*, USA, 2004, h. 17-19

Ṭālib yang melarang pertumpahan darah yang tidak sah dan menempatkan keadilan sebagai landasan utama dalam melindungi hak hidup.

b. Teori Kontrak Sosial

Berdasarkan teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau, hak untuk hidup diakui sebagai bagian dari kontrak antara individu dan negara. Rousseau berpendapat bahwa setiap individu menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada negara untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak dasar, termasuk hak hidup.[133] ʻAlī bin Abī Ṭālib menerapkan konsep ini dalam suratnya kepada Mālik al-Ashtar, di mana ia menegaskan pentingnya pemerintah untuk melindungi rakyat tanpa membedakan latar belakang mereka. Ia menekankan bahwa pemerintahan tidak boleh dijalankan dengan cara menindas atau merampas hak dasar masyarakat, termasuk nyawa mereka.

c. Perspektif Utilitarianisme

Pendekatan utilitarianisme, yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, menekankan bahwa tindakan yang benar adalah yang memberikan kebahagiaan terbesar kepada jumlah orang terbanyak.[134] Dalam konteks hak hidup, pandangan ini dapat dikaitkan dengan kebijakan ʻAlī bin Abī Ṭālib yang memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyatnya secara merata, tanpa membeda-bedakan status sosial. Kebijakan beliau yang tegas terhadap keadilan distribusi Baitul Mal menunjukkan bagaimana hak hidup juga mencakup aspek kesejahteraan fisik dan ekonomi.

Hak hidup bukan hanya hak kodrati tetapi juga memiliki dimensi transendental. Adapun hak hidup dalam pandangan Islam mencakup:[135]

1) Dimensi Duniawi. Hak untuk hidup di dunia, yang berarti setiap manusia harus dihormati, dilindungi, dan tidak dirampas nyawanya tanpa alasan yang sah menurut hukum.
2) Dimensi Akhirat. Kehidupan manusia tidak berhenti di dunia, melainkan berlanjut di akhirat. Oleh karena itu, hak hidup juga mencakup upaya untuk menjamin kehidupan abadi yang baik melalui ketaatan kepada Allah Swt.

Korelasi dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang ada didalam Pasal 3 DUHAM berbunyi: "*Everyone has the right to life, liberty and security of person.*".[136] ʻAlī bin Abī Ṭālib telah mengimplementasikan prinsip ini jauh sebelum disusunnya deklarasi tersebut, bahkan dengan cara yang lebih holistik. Beliau tidak hanya menjamin hak hidup dalam konteks fisik, tetapi juga memastikan martabat, kebebasan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perbedaan utamanya adalah bahwa HAM dalam Islam menempatkan Tuhan sebagai pusat, sedangkan DUHAM bersifat sekuler dan menempatkan manusia sebagai pusat.

---

[133] Idrus Ruslan, *Pemikiran "Kontrak Sosial" Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama*, Idrus Ruslan, Al-Adyan, Volume 8 , Nomor 2, Juli-Desember 2013, h. 17.

[134] Bentham, *An Introduction to the Principles*, Op.Cit, h. 31-34.

[135] Rohmat Chozin, *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas Xii Sma/Smk*, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2019, h. 300.

[136] Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948.

Hak untuk hidup, sebagaimana diajarkan dan diterapkan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib, tidak hanya bersifat fisik tetapi juga spiritual. Filosofi beliau yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak dasar manusia relevan untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dunia modern dalam hal perlindungan HAM. Pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib mencerminkan integrasi nilai-nilai hukum kodrat, kontrak sosial, dan utilitarianisme, dengan tambahan dimensi spiritual yang menjadikannya model yang sempurna untuk melindungi hak asasi manusia.

C. Analisis Pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib Tentang Keadilan

Apabila merujuk pada karya Plato yang berjudul " *The Republic*", Plato memandang keadilan sebagai tatanan yang harmonis dalam masyarakat. Menurutnya, keadilan terjadi ketika setiap individu dan kelas sosial menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan keahliannya. Keadilan sosial adalah keteraturan di mana setiap orang menjalankan tugasnya sesuai dengan bakatnya, tanpa mengganggu peran orang lain. Sedangkat tingkatan individu, keadilan adalah harmoni antara bagian jiwa, yaitu akal (*logika*), keberanian (*thumos*), dan keinginan (*epithumia*), di mana akal memimpin.[137] Konsep keadilan ini juga selalu ditekankan Allah SWT kepada umat manusia terkhusus kepada para pemimpin sebagai bentuk *waliyullah* dalam mengurus urusan duniawi berupa pemerintahan. Salah satu surah yang mengamanahkan mengenai keadilan kepada sesama terutama rakyatnya, yakni surah an-Nisa ayat 59, yang mana Allah SWT berfirman:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.

Berdasarkan konsep teori Plato dan firman Allah SWT, apabila merujuk pada surat ‘Alī bin Abī Ṭālib Bin Abi Thalib kepada Mālik al-Ashtar, maka ‘Alī bin Abī Ṭālib tidak hanya memberikan instruksi praktis kepada Malik, tetapi juga menekankan prinsip-prinsip keadilan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pemimpin sesuai dengan amanah Allah SWT yang berfirman didalam surah an-Nisa’ ayat 59. Berikut beberapa analisis terkait masalah keadilan dalam pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib:

1. Keadilan sebagai Inti dan Dasar Pemerintahan dan Penegakkan Hukum

   ‘Alī bin Abī Ṭālib memandang keadilan sebagai inti dari setiap pemerintahan yang baik. Dalam suratnya, ia menekankan bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Ia berkata: *"Sungguh, kamu adalah pemimpin bagi mereka dan kamu bertanggung jawab atas mereka. Oleh karena itu, berlakulah adil kepada semua orang."* Prinsip ini mencerminkan ajaran Rasulullah SAW dalam hadis:

---

[137] Internet Encyclopedia of Philosophy, *Plato: The Republic https://iep.utm.edu/republic/*, diakses pada 11 Februari 2025 Pukul 21.00 WIB.

:عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

« إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا»

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang adil akan berada di atas mimbar-mimbar cahaya di sisi Allah: yaitu mereka yang berlaku adil dalam keputusan mereka, terhadap keluarga mereka, dan terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka."* (HR. Muslim).

‘Alī bin Abī Ṭālib menerapkan keadilan secara universal, melibatkan setiap individu tanpa diskriminasi, dan memastikan bahwa semua rakyatnya mendapat hak yang sama. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālib menganggap keadilan bukan hanya sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap pemimpin. Keadilan menjadi landasan bagi legitimasi kekuasaan dan keberlangsungan pemerintahan. Tanpa keadilan, sebuah pemerintahan akan kehilangan dukungan rakyatnya dan berpotensi menghadapi penolakan.[138]

Sebagai dasar dari pemerintahan ‘Alī bin Abī Ṭālib juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan merata. Ia mengingatkan Malik untuk tidak membedakan antara orang kaya dan miskin, atau antara teman dan musuh.[139] Komitmen ‘Alī bin Abī Ṭālib untuk memastikan bahwa semua individu diperlakukan dengan adil tanpa memandang status sosial atau kedekatan pribadi. Ini adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang adil, di mana setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang setara di depan hukum. Dengan menegakkan hukum secara adil, ‘Alī bin Abī Ṭālib menanamkan kepercayaan rakyat terhadap sistem pemerintahan Islam.

Berkenaan dengan dasar pemerintahan untuk menegakkan hukum itu sendiri di dalam sebuah negara, ‘Alī bin Abī Ṭālib menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kedudukan seseorang. Dalam suratnya ‘Alī bin Abī Ṭālib memerintahkan:

ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَذَوِى الصِّنَاعَاتِ، وَأَوْصِ بِهِمْ خَيراً: الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ، وَالْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ، وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ وَجُلاَّبُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَالْمَطَارِحِ، فِى بَرِّكَ وَبَحْرِكَ، وَسَهْلِكَ وَجَبَلِكَ، وَحَيثُ لايَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا، وَلاَ يَجْتَرِءُونَ عَلَيهَا، فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لاتُخَافُ بَائِقَتُهُ، وَصُلْحٌ لاتُخْشَى غَائِلَتُهُ

Artinya: “*Perhatikan dan perlakukan dengan baik para pedagang dan ahli pertukangan. Yaitu mereka yang tetap berusaha di tempatnya atau yang berpindah-pindah dengan hartanya, ataupun yang berpenghasilan dengan tenaganya. Dengan merekalah tersedia bahan-bahan kebutuhan rakyat dan barang-barang keperluan sehari-hari. Dan merekalah*

---

[138] Hadeethenc.com, *Keutamaan dan Adab. Fikih Akhlak. Akhlak Terpuji*, https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/4935, diakses pada 11 Februari 2025 Pukul 21.00 WIB.

[139] Muhammad, Abu Ja“far, Tarikh Ath-Thabari. *Terj. Abu Ziad Muhammad Dhiaul-Haq dan Abdul Syukur Abdul Razak*. (Jakarta : Pustaka Azam, 2011), h.670.

yang menghadirkannya dari tempat-tempat jauh dan pusat-pusatnya di darat, di laut, di kota dan di pegunungan, yang kebanyakan rakyat tidak dapat mencapainya ataupun tidak berani pergi ke sana."[140] mencerminkan pandangan bahwa hukum adalah alat untuk menjaga keadilan, bukan sarana untuk melayani kepentingan pihak tertentu.

Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum Immanuel Kant, yang berpendapat bahwa hukum harus didasarkan pada prinsip moral universal dan bersifat impersonal. Kant menekankan bahwa keadilan harus bersifat objektif, tanpa diskriminasi atau kepentingan pribadi. "Hukum harus menjadi representasi dari kewajiban moral universal yang mengatur tindakan individu dan negara." Bahwa pemimpin tidak boleh tunduk pada pengaruh kekayaan atau kepentingan elit, melainkan harus memastikan bahwa hukum berlaku sama untuk semua termasuk kasta terbawah sekali pun.

Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah jika orang mulia mencuri, mereka membiarkannya; tetapi jika orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya."* (HR. Bukhari dan Muslim) Hadis ini mendukung prinsip keadilan Ali, di mana hukum tidak boleh diskriminatif.

ʻAlī bin Abī Ṭālib memberikan petunjuk kepada Mālik al-Ashtar untuk selalu mencari solusi damai sebelum menggunakan kekerasan. Menurut Ali, konflik harus diselesaikan melalui dialog, mediasi, dan negosiasi. Kekerasan hanya boleh menjadi pilihan terakhir jika semua jalan damai telah gagal. Pandangan ini sejalan dengan filsafat hukum John Rawls, yang dalam bukunya *A Theory of Justice* menekankan pentingnya "*fair terms of cooperation*". Menurut Rawls, keadilan sosial dicapai melalui dialog dan kesepakatan yang adil di antara pihak-pihak yang berbeda. Dalam pendekatan Ali, negosiasi adalah bentuk mencari solusi yang paling adil tanpa merusak tatanan sosial. Rawls menyatakan: "*Keadilan adalah hasil dari konsensus antara individu-individu yang rasional dalam suatu masyarakat yang beradab*."[141] Rasulullah SAW bersabda: *"Barang siapa yang menahan amarahnya, padahal ia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk dan mempersilakannya memilih bidadari mana yang ia sukai."* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)[142] Hadis ini mengajarkan pentingnya mengutamakan kesabaran dan menahan diri, terutama dalam situasi konflik.

2. Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya

ʻAlī bin Abī Ṭālib adalah contoh pemimpin yang menekankan pentingnya administrasi dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana dalam pemerintahan. Pemikirannya menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya negara harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, menghindari kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan

---

[140] Wikishia, *Teks:Surat Imam Ali kepada Mālik al-Ashtar*; https://id.wikishia.net/view/Teks:Surat_Imam_Ali_kepada_Malik_al-Ashtar, diakses pada 24 Desember 2024 Pukul 15.00 WIB.

[141] John Rawls, *A theory of justice teori keadilan: dasar-dasar filsafat poliik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011 M.

[142] Iwan Taufik, Agar Amarah Tak Berbuah Masalah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. https://uinsgd.ac.id/agar-amarah-tak-berbuah masalah/:~:text=Tidak%20hanya%20itu%2C%20Rasulullah%20saw,Daud%2C%20no.%204777). Diakses pada pada 24 Desember 2024 Pukul 15.00 WIB.

dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Sebagaimana pada bab sebelumnya penulis mengutip suratnya kepada Mālik al-Ashtar, gubernur Mesir, yang mana ‘Alī bin Abī Ṭālib menasihati: *"Hendaklah hal yang paling kau cintai adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah (tidak melampaui batas) dalam kebenaran, yang paling umum dalam keadilan, dan yang paling merangkul keridaan rakyat."*[143] Prinsip ini tidak hanya mencerminkan keadilan distributif dalam pandangan filsafat hukum Islam tetapi juga selaras dengan pemikiran modern tentang akuntabilitas pemerintahan.

Filsafat hukum yang relevan dengan pengelolaan sumber daya menurut ‘Alī bin Abī Ṭālib dapat dilihat dari konsep keadilan distributif Aristoteles, yang menekankan bahwa sumber daya harus dialokasikan secara merata sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi setiap individu dalam masyarakat. Dalam pandangan Aristoteles, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional.[144] ‘Alī bin Abī Ṭālib menerapkan prinsip ini dengan menegaskan pentingnya keadilan yang merata bagi seluruh rakyat, tanpa mengistimewakan golongan tertentu. Hal ini tercermin dalam pernyataannya bahwa, *"kemarahan rakyat umum akan mengalahkan keridaan golongan tertentu."* Dengan kata lain, kesejahteraan umum harus menjadi prioritas utama dalam pemerintahan.

Selain itu, prinsip keadilan ‘Alī bin Abī Ṭālib dapat dikaitkan dengan pemikiran John Rawls dalam teori keadilannya yang dikenal sebagai *justice as fairness*. Rawls menekankan pentingnya "*equal liberty*" (kebebasan yang setara) dan "*difference principle*" (prinsip perbedaan), di mana pemerintah harus memastikan bahwa keuntungan sosial dan ekonomi didistribusikan sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling membutuhkan.[145] Dalam konteks Ali, hal ini diwujudkan dengan memastikan bahwa sumber daya negara digunakan untuk kepentingan umum, terutama untuk rakyat kecil seperti petani dan buruh. Hadis Nabi SAW mendukung hal ini, Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: *"Seorang pemimpin adalah penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya."* (HR. Bukhari dan Muslim).[146]

Hadis ini menggarisbawahi bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan kesejahteraan rakyatnya. Prinsip akuntabilitas ini selaras dengan konsep modern bahwa setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dalam pandangan Ali, transparansi dalam administrasi, seperti memeriksa kondisi keuangan negara secara rutin dan mencatat semua

---

[143] Wikishia, *Teks:Surat Imam Ali kepada Mālik al-Ashtar*, https://id.wikishia.net/view/Teks:Surat_Imam_Ali_kepada_Malik_al-Ashtar, diakses pada 24 Desember 2024 Pukul 15.00 WIB.

[144] Salsabila Nurul Syifa, dkk, *Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles serta Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang – Undang Dasar Tahun 1945*, Op.Cit. h. 1-25

[145] Rawls, John, *A theory of justice teori keadilan: dasar-dasar filsafat poliik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara*, Op.Cit. h.44.

[146] Hikmah, Teladan *Tanggung Jawab Umar bin Khattab kepada Rakyatnya*, Kemenag RI, https://kemenag.go.id/hikmah/teladan-tanggung-jawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatnya-P4VBw, diakses pada 24 Desember 2024 Pukul 15.00 WIB.

pengeluaran dan pendapatan dengan jelas, adalah elemen penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Ibn Khaldun, dalam *Muqaddimah*, menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya negara yang adil dan bijaksana sebagai fondasi peradaban.[147] Ia menulis bahwa pemerintahan yang mengabaikan keadilan dan transparansi akan mengalami keruntuhan karena kehilangan dukungan rakyat. Hal ini selaras dengan prinsip Ali, di mana ia menegaskan bahwa kemarahan rakyat secara umum akan menggoyahkan stabilitas pemerintahan.

Al-Mawardi, seorang ahli fikih dan pemerintahan, menekankan bahwa tugas utama pemimpin adalah memastikan keadilan dalam distribusi kekayaan negara dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat.[148] Pendapat ini sejalan dengan kebijakan ʻAlī bin Abī Ṭālib yang memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan petani, buruh, dan golongan yang kurang beruntung, sembari tetap menjaga keseimbangan untuk golongan lainnya.

Namun, pandangan ini tidak luput dari kontradiktif terhadap pandangan beberapa ahli, seperti Niccoḷo Machiavelli, dalam *The Prince*, mengedepankan pendekatan pragmatis terhadap kekuasaan yang sering kali mengesampingkan moralitas demi kepentingan stabilitas politik.[149] Machiavelli mungkin berpendapat bahwa kebijakan tegas Ali, seperti pemecatan Muawiyah bin Abu Sufyan, terlalu berisiko karena memicu konflik yang merugikan stabilitas pemerintahan. Pendekatan Machiavelli lebih berorientasi pada hasil, sementara ʻAlī bin Abī Ṭālib lebih menitikberatkan moralitas sebagai landasan pemerintahan.

3. Keadilan sebagai Sarana Pemberdayaan Rakyat (Hubungan Dengan Rakyat)

ʻAlī bin Abī Ṭālib juga melihat keadilan sebagai sarana untuk memberdayakan rakyat. Ia percaya bahwa dengan menerapkan keadilan, masyarakat akan merasa aman dan terlindungi, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif bagi pembangunan masyarakat. Dalam suratnya, ia menyatakan:

فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَنَعَ مِنْهُ. وَلٰيكنِ الْبَيعُ بَيعاً سَمْحاً: بِمَوَازِينِ عَدْل وَأَسْعَار

.لاتُجْحِفُ بِالْفَرِيقَينِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ. فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيک إِياهُ فَنَكلْ بِهِ، وَعَاقِبْهُ فِی غَيرِ إِسْرَاف

ثُمَّ اللهَ اللهَ فِی الطَّبَقَةِ السُّفْلَی مِنَ الَّذِينَ لاحِيلَةَ لَهُمْ، مِنَ الْمَسَاكينِ وَالْمُحْتَاجِينَ وَأَهْلِ الْبُؤْسَی

وَالزَّمْنَی، فَإِنَّ فِی هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعاً وَمُعْتَرّاً

"Ingatlah Allah dan ingatlah selalu orang-orang seperti itu yang dititipkan-Nya kepadamu! Berilah mereka bagian dari Bayt Al-Mal serta bagian dari rampasan perang dan hasil tanah di seluruh penjuru negeri. Semua mereka, yang dekat maupun yang jauh, telah ditetapkan untuknya bagiannya dan diperhatikan kepentingannya. Jangan sekali-kali kau disibukkan

---

[147] Bagas Mukti Nasrowi, K*onsep Pendidikan Islam Perspektif Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Studi Arab, 8.2 (2017), h. 173–84

[148] Rashda Diana, Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam, Tsaqafah, 13.1 (2017), h. 157

[149] Esyi Esyi, Ulasan Buku, *Il Principe (Sang Pangeran) Karya Niccolo Machiavelli*, KHIRANI: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol.1, No.2 Juni 2023, h. 58-63

oleh kemewahan sehingga melalaikan mereka. Dan jangan beranggapan bahwa kau tidak akan dituntut akibat melalaikan yang remeh semata-mata disebabkan kau telah menyempurnakan berbagai urusan yang besar lagi penting. Curahkanlah perhatianmu kepada mereka dan jangan sekali-kali kau palingkan wajah-mu dari mereka. Telitilah juga hal-ihwal orang-orang yang tidak dapat mencapaimu disebabkan kehinaan mereka di mata orang banyak. Tugaskanlah beberapa orang kepercayaanmu –yang bersahaja dan tawadhu'–untuk meneliti keadaan orang-orang itu. Kemudian penuhilah kewajibanmu terhadap mereka sehingga kau dapat mempertanggungjawabkannya kelak, pada saat perjumpaanmu dengan Allaw swt. Mereka itu adalah bagian dari rakyatmu yang paling mendambakan kesadaranmu untuk kau penuhi haknya lebih dari yang lain. Betapapun juga, bebaskanlah dirimu dari tuntutan Allah dengan memberikan kepada setiap orang haknya yang ditetapkan Allah baginya. Perhatikan baik-baik semua anak yatim dan orang lanjut usia, serta orang-orang lemah yang tak berdaya sementara hatinya tidak mengizinkannya untuk mengemis meminta-minta. Tugas seperti ini adalah sesuatu yang berat bagi para penguasa, namun kebenaran memang berat semuanya. Meskipun Allah akan meringankannya juga bagi mereka yang mencari keuntungan di Hari Akhir lalu mereka menyabarkan diri mereka sendiri, dan yakin akan kebenaran janji Allah bagi mereka.".[150]

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya sekadar prinsip abstrak, tetapi juga merupakan alat praktis untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan menerapkan keadilan, seorang pemimpin dapat membangun kepercayaan dan rasa aman di antara rakyatnya.

Imam 'Alī bin Abī Ṭālib memandang keadilan sebagai sarana pemberdayaan rakyat dan menjadikannya sebagai fondasi utama dalam hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Dalam pandangan beliau, keadilan tidak hanya prinsip moral atau hukum yang abstrak, tetapi merupakan alat praktis untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan sosial. Dalam suratnya kepada Mālik al-Ashtar, 'Alī bin Abī Ṭālib menekankan pentingnya memberikan perhatian khusus kepada golongan masyarakat yang rentan, seperti fakir miskin, orang tua, anak yatim, dan mereka yang tidak memiliki daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beliau menyatakan bahwa seorang pemimpin harus mencurahkan perhatian kepada golongan ini dan tidak membiarkan kesibukan dengan urusan besar mengalihkan perhatian dari kebutuhan dasar mereka.

Pernyataan 'Alī bin Abī Ṭālib ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya menyangkut distribusi yang merata, tetapi juga pengakuan terhadap hak-hak kelompok yang rentan sebagai bagian integral dari tanggung jawab pemerintah. Dalam filsafat hukum, konsep ini sejalan dengan pemikiran John Rawls dalam *A Theory of Justice*. Rawls menekankan pentingnya "principle of redress," di mana struktur sosial harus dirancang untuk memberikan perlakuan khusus kepada kelompok yang paling lemah dalam

[150] Wikishia, *Teks:Surat Imam Ali kepada Mālik al-Ashtar*; https://id.wikishia.net/view/Teks:Surat_Imam_Ali_kepada_Malik_al-Ashtar, diakses pada 24 Desember 2024 Pukul 15.00 WIB.

masyarakat agar kesenjangan sosial dapat diminimalkan.[151] Hal ini juga tercermin dalam kebijakan ‘Alī bin Abī Ṭālib yang menuntut penguasa untuk secara aktif mencari informasi tentang kondisi rakyatnya yang tidak dapat menyuarakan kebutuhan mereka. Rawls menyebut bahwa keadilan bukan hanya sekadar alokasi sumber daya, tetapi juga cara sistemik untuk melindungi hak-hak mereka yang kurang beruntung.

‘Alī bin Abī Ṭālib juga memerintahkan transparansi dan tanggung jawab penuh dalam pengelolaan sumber daya publik, seperti Bayt al-Mal (perbendaharaan negara). Beliau menegaskan bahwa rakyat memiliki hak atas sumber daya ini, dan tugas pemimpin adalah memastikan bahwa setiap orang mendapatkan bagiannya. Hal ini menunjukkan pemikiran progresif yang menekankan keadilan distributif, di mana pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga sebagai pemberi perlindungan aktif terhadap kesejahteraan rakyatnya. Aristoteles dalam karyanya *Nicomachean Ethics* mengajarkan bahwa keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap individu sesuai dengan kebutuhan dan kontribusinya. Pendekatan ‘Alī bin Abī Ṭālib dalam memastikan distribusi sumber daya sesuai kebutuhan rakyat mencerminkan prinsip ini dengan sangat jelas.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga mendukung pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang tanggung jawab sosial pemimpin. Rasulullah SAW bersabda: *"Tidaklah seorang pemimpin yang mengurusi urusan kaum Muslimin, kemudian dia mati dalam keadaan menipu mereka, melainkan Allah mengharamkan surga baginya."* (HR. Bukhari dan Muslim).[152] Hadis ini menegaskan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin bukan hanya menjaga keadilan secara prosedural tetapi juga memperhatikan aspek substansial keadilan yang berdampak langsung pada kehidupan rakyatnya.

Namun, pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib juga memiliki dimensi yang dapat dikritik dari perspektif pemikiran modern. Thomas Hobbes, dalam *Leviathan*, berargumen bahwa kekuasaan negara harus dipusatkan untuk menjamin stabilitas dan keamanan masyarakat.[153] Hobbes mungkin menganggap bahwa pendekatan keadilan distributif ‘Alī bin Abī Ṭālib yang melibatkan pembagian sumber daya kepada golongan rentan dapat melemahkan otoritas pemerintah, terutama ketika sumber daya terbatas atau terdapat ancaman terhadap stabilitas negara. Perspektif ini memandang keadilan sebagai alat untuk mengamankan ketertiban, bahkan jika itu berarti mengorbankan hak-hak tertentu demi stabilitas keseluruhan.

Meskipun begitu, pendekatan ‘Alī bin Abī Ṭālib tetap dianggap sebagai model kepemimpinan yang sangat visioner karena berhasil mengintegrasikan nilai-nilai etika ke dalam praktik pemerintahan. Beliau percaya bahwa rasa aman dan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada keadilan akan mendorong mereka untuk berkontribusi lebih banyak

---

[151] John Rawls, *A theory of justice teori keadilan: dasar-dasar filsafat poliik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara*, Op.Cit., h. 45 .

[152] UIN Syahada Padangsidimpuan, *Ancaman Allah Bagi Pelaku Kezaliman*, https://www.uinsyahada.ac.id/ancaman-allah-bagi-pelaku-kezaliman/ diakses pada 24 Desember 2024 Pukul 15.00 WIB.

[153] Redaksi, Leviathan: *Filsafat Politik Thomas Hobbes*, https://mengeja.id/2024/04/26/leviathan-filsafat-politik-thomas-hobbes/#:~:text=Menurut%20Hobbes%2C%20kehidupan%20di%20Negara,itu%20Materialisme%20Historis%20dan%20Dialektis?, diakses pada 24 Desember 2024 Pukul 15.00 WIB

pada pembangunan masyarakat. Dengan keadilan, rakyat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian aktif dari proses pembangunan negara. Perspektif ini memperlihatkan bahwa keadilan tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga alat strategis untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, sekaligus menciptakan masyarakat yang stabil dan harmonis.

4. Kepemimpinan yang Adil dan Bertanggung Jawab

‘Alī bin Abī Ṭālib memberikan nasihat mendalam tentang kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab kepada Mālik al-Ashtar, menekankan prinsip keadilan, integritas moral, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah. Sebagaimana kutipan surat yang telah di kutip pada bab sebelumnya oleh penulis salah satu pernyataannya, ‘Alī bin Abī Ṭālib menyebutkan: "*Berlakulah adil terhadap rakyatmu, terhadap keluargamu, dan terhadap dirimu sendiri. Jika tidak, engkau akan berbuat zalim. Dan barang siapa menzalimi hamba-hamba Allah, maka Allah akan menjadi lawannya. Dan siapa yang Allah menjadi lawannya, argumennya akan runtuh, dan dia akan berada dalam perang dengan Allah hingga dia berhenti dan bertobat.*"[154] Prinsip ini mencerminkan pandangan bahwa keadilan adalah inti dari pemerintahan yang baik, dan kepemimpinan adalah amanah besar yang memerlukan tanggung jawab moral serta spiritual.

Berdasarkan perspektif filsafat hukum, pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang keadilan sejalan dengan konsep keadilan naturalis yang dipelopori oleh Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan adalah "*memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya*" dan merupakan keutamaan tertinggi yang harus dimiliki oleh pemimpin.[155] Keadilan tidak hanya melibatkan pemberian hak-hak dasar, tetapi juga keseimbangan dalam memperlakukan rakyat, keluarga, dan diri sendiri. Pandangan ini tercermin dalam nasihat ‘Alī bin Abī Ṭālib yang menekankan bahwa seorang pemimpin harus berlaku adil dalam segala hal, termasuk terhadap dirinya sendiri dan orang-orang terdekatnya. Konsep kepemimpinan ‘Alī bin Abī Ṭālib juga dapat dianalisis melalui pandangan Immanuel Kant tentang moralitas dalam hukum. Kant berpendapat bahwa tindakan pemimpin harus didasarkan pada prinsip moral yang universal, yakni menghormati martabat dan hak setiap individu. ‘Alī bin Abī Ṭālib mengingatkan Malik untuk menjaga akhlak dan integritasnya, menjauhkan diri dari hawa nafsu, serta menghindari ketamakan terhadap kekuasaan dan harta.

Sementara itu, John Locke, seorang filsuf kontrak sosial, menekankan bahwa legitimasi kepemimpinan hanya dapat diperoleh jika pemimpin memenuhi kewajiban moralnya untuk melindungi hak-hak dasar rakyat, termasuk hak atas keadilan dan kesejahteraan.[156] Pandangan Locke ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dianjurkan ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Malik. ‘Alī bin Abī Ṭālib

---

[154] Wikishia, *Teks:Surat Imam Ali kepada Mālik al-Ashtar*; https://id.wikishia.net/view/Teks:Surat_Imam_Ali_kepada_Malik_al-Ashtar, diakses pada 24 Desember 2024 Pukul 15.00 WIB.

[155] Salsabila Nurul Syifa, dkk, *Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles serta Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang – Undang Dasar Tahun 1945*, Op.Cit. h. 24..

[156] John Locke, *The Second Treatise of Government, Barnes & Noble Publishing*, USA, Op.Cit, h. 17-19

menyarankan agar setiap keputusan pemimpin dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sebuah prinsip yang juga menjadi dasar bagi sistem pemerintahan modern yang demokratis.

Hadis Rasulullah SAW mendukung prinsip kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab sebagaimana disampaikan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib. Rasulullah SAW bersabda:

خِيارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُم وَتُصَلُّونَ عليهم، وشِرارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ

Artinya: "Pemimpin yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang mencintai rakyatnya *dan dicintai oleh rakyatnya. Dan pemimpin yang paling dibenci oleh Allah adalah mereka yang membenci rakyatnya dan dibenci oleh rakyatnya*." (HR. Muslim).[157] Hadis ini menegaskan bahwa hubungan yang sehat antara pemimpin dan rakyatnya harus didasarkan pada cinta, keadilan, dan tanggung jawab.

Beberapa pemikir pragmatis, seperti Niccoḷo Machiavelli, memiliki pandangan berbeda tentang kepemimpinan. Dalam The Prince, Machiavelli menekankan bahwa seorang pemimpin tidak selalu perlu bersikap adil, melainkan harus pragmatis dan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mempertahankan kekuasaan.[158] Dalam konteks ini, pendekatan ‘Alī bin Abī Ṭālib yang berlandaskan moralitas dan keadilan mungkin dianggap terlalu idealis oleh Machiavelli, terutama dalam situasi konflik politik yang kompleks. Namun, pandangan Machiavelli ini dapat diperdebatkan. Apabila merujuk pada gaya kepemimpinan ‘Alī bin Abī Ṭālib pada masanya bahwa keadilan dan moralitas bukan hanya prinsip ideal, tetapi juga fondasi yang diperlukan untuk menjaga kepercayaan rakyat dan stabilitas pemerintahan. Ini tercermin dalam tindakannya yang tegas terhadap para pejabat yang korup dan tidak adil, meskipun keputusan tersebut sering kali memicu kontroversi.

D. Keterkaitan konsep Kekuasaan, Kebebasan dan Keadilan dengan Filsafat Politik Modern

Surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar memiliki relevansi yang kuat dengan filsafat politik modern, terutama dalam hal konsep kekuasaan, kebebasan, dan keadilan. Pemikiran ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang kekuasaan sebagai amanah dan tanggung jawab sejalan dengan teori-teori legitimasi dalam filsafat politik modern, di mana kekuasaan yang sah harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang kebebasan sebagai hak dasar yang harus dilindungi oleh negara juga mencerminkan pemikiran dalam filsafat politik liberal, di mana kebebasan individu dianggap sebagai hak yang tidak boleh dilanggar. ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan bahwa kebebasan

---

[157] Devi Setya, 5 Kriteria Pemimpin yang Ideal Menurut Rasulullah SAW, https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6998264/5-kriteria-pemimpin-yang-ideal-menurut-rasulullah-saw. , diakses pada 24 Desember 2024 Pukul 15.00 WIB.

[158] Esyi Esyi, Ulasan Buku, *Il Principe (Sang Pangeran) Karya Niccolo Machiavelli*, Op.Cit, h. 63

harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial, sebuah konsep yang juga menjadi dasar dalam teori-teori politik modern tentang hak dan kewajiban warga negara.[159]

Keadilan, yang menjadi tema utama dalam surat Ali, juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan teori-teori keadilan dalam filsafat politik modern. Pemikiran ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang keadilan sebagai prinsip yang harus diterapkan secara merata kepada semua orang, tanpa memandang status sosial atau kekuasaan, sejalan dengan pemikiran Immanuel Kant dan John Rawls tentang keadilan sebagai prinsip universal.

‘Alī bin Abī Ṭālib menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits untuk mendukung pandangannya tentang kekuasaan, kebebasan, dan keadilan. Salah satu ayat yang sering dikutip oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib adalah:

"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ"

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.*" (QS. An-Nisa: 58).

Ayat ini menekankan pentingnya menegakkan keadilan dan menjaga amanah, yang merupakan prinsip utama dalam pemerintahan yang diajarkan oleh Ali. ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan bahwa seorang pemimpin harus selalu berusaha untuk menegakkan keadilan dan tidak membiarkan hawa nafsu atau kepentingan pribadi mempengaruhi penilaiannya. Berdasarkan konteks kebebasan, ‘Alī bin Abī Ṭālib sering mengutip ayat:

"لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ"

Artinya: "*Tidak ada paksaan dalam agama; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah.*" (QS. Al-Baqarah: 256).

Ayat ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan berpendapat adalah hak yang harus dilindungi oleh pemerintah. ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan bahwa pemerintah tidak boleh memaksakan keyakinan atau pendapat tertentu kepada rakyatnya, tetapi harus menghormati kebebasan mereka untuk memilih dan berpikir secara bebas.

Surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar adalah salah satu dokumen yang paling berharga dalam sejarah pemikiran politik Islam. Pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang kekuasaan, kebebasan, dan keadilan menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang visioner dan seorang pemikir yang mendahului zamannya. Konsep-konsep yang diajarkannya dalam surat tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan filsafat politik modern dan menjadi inspirasi bagi pemerintahan yang adil dan beretika di zaman sekarang. Dalam filsafat politik modern, pemikiran ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang kekuasaan sebagai amanah, kebebasan sebagai hak dasar, dan keadilan sebagai pilar utama pemerintahan, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh para filsuf besar seperti John Locke, John Stuart Mill, Immanuel Kant, dan John Rawls. Surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar adalah bukti bahwa pemikiran politik Islam memiliki nilai-nilai universal yang tetap relevan dalam konteks politik modern dan dapat menjadi landasan bagi pembangunan masyarakat yang adil, sejahtera, dan beretika.

---

[159] Sadri Mahmoud. Sac*ral Defense of Secularism: The Political Theologies of Soroush, Shabestari, and Kadivar*. (International Journal of Politics, Culture and Society), 2021, Volume 15 Nomor 2, h.89.

E. Konflik Dan Resolusi Menurut Surat ‘Alī bin Abī Ṭālib Kepada Mālik al-Ashtar

Surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar, yang diberikan saat Malik diangkat sebagai gubernur Mesir, merupakan salah satu teks klasik dalam literatur Islam yang memberikan panduan mendalam tentang pemerintahan yang adil dan bijaksana. Salah satu tema penting dalam surat ini adalah bagaimana menangani konflik dan resolusi konflik. ‘Alī bin Abī Ṭālib memberikan nasihat yang sangat relevan tentang bagaimana seorang pemimpin harus menghadapi dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan kemanusiaan.

1. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Menghadapi Konflik

   ‘Alī bin Abī Ṭālib memahami bahwa konflik adalah bagian yang tak terhindarkan dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk memiliki sikap yang benar dalam menghadapi konflik. ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan bahwa pemimpin harus bersikap adil, bijaksana, dan tidak memihak ketika berhadapan dengan konflik, baik itu antara rakyat maupun di antara para pejabat pemerintah.

   Salah satu prinsip utama yang ditekankan ‘Alī bin Abī Ṭālib adalah keadilan. Ia menulis, "*Ketika engkau dihadapkan pada perselisihan di antara rakyatmu, berusahalah untuk berlaku adil dan janganlah engkau memihak pada satu pihak semata-mata karena hubungan pribadi atau keuntungan tertentu.*"[160] Ini menunjukkan bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālib menganggap keadilan sebagai landasan utama dalam resolusi konflik. Pemimpin harus mengesampingkan segala bentuk bias atau prasangka dan memfokuskan diri pada apa yang benar dan adil dalam situasi tersebut. Selain keadilan, ‘Alī bin Abī Ṭālib juga menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Ia menyarankan agar pemimpin tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan, terutama dalam situasi yang melibatkan konflik. "*Janganlah engkau memutuskan perkara dalam keadaan marah atau terburu-buru, karena keputusan yang diambil dalam kondisi seperti itu sering kali tidak tepat dan dapat menyebabkan ketidakadilan.*"[161] Ini menunjukkan bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālib memahami pentingnya ketenangan dan pertimbangan yang matang dalam menyelesaikan konflik.

2. Strategi Resolusi Konflik Menurut ‘Alī bin Abī Ṭālib

   ‘Alī bin Abī Ṭālib memberikan beberapa strategi spesifik yang harus diikuti oleh seorang pemimpin dalam menyelesaikan konflik. Salah satu strategi utama adalah mendengarkan semua pihak yang terlibat. "*Dengarkanlah setiap orang yang datang kepadamu dengan keluhan atau perselisihan, dan janganlah engkau menolak mereka hanya karena mereka berasal dari golongan yang lemah atau tidak memiliki pengaruh.*" Dengan demikian, ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan pentingnya inklusivitas dan keadilan dalam proses resolusi konflik.

   Selain itu, ‘Alī bin Abī Ṭālib juga menekankan pentingnya dialog dan negosiasi sebagai alat utama dalam menyelesaikan konflik, pada suratnya ia memberikan pesan,

---

[160] Agus Hasan Bashori dan Ulil Amri Syafri, *Studi Kritis Konsep Sanad Kitab Nahj Al-Balaghah Sebagai Upaya Membangun Budaya Tabayyun Dalam Keilmuan Islam* (el Harakah Volme 18 Nomor 2 Tahun 2016), h. 166.

[161] Agus Hasan Bashori dan Ulil Amri Syafri, *Studi Kritis Konsep Sanad Kitab Nahj Al-Balaghah Sebagai Upaya Membangun Budaya Tabayyun Dalam Keilmuan Islam*, Op.Cit. h. 168.

"*Apabila engkau mampu menyelesaikan suatu perselisihan melalui dialog yang damai dan negosiasi, maka lakukanlah itu sebelum engkau mengambil tindakan yang lebih keras.*"[162] Ini menunjukkan bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālib lebih memilih pendekatan yang damai dan kooperatif dalam menyelesaikan konflik, daripada menggunakan kekerasan atau paksaan. Selain itu, ‘Alī bin Abī Ṭālib juga memberikan nasihat tentang pentingnya memperbaiki hubungan setelah konflik diselesaikan. "*Setelah perselisihan selesai, berusahalah untuk memperbaiki hubungan di antara pihak-pihak yang bertikai, sehingga tidak ada rasa dendam atau kebencian yang tersisa.*" Ini menunjukkan bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālib memahami pentingnya rekonsiliasi dan membangun kembali kepercayaan di antara pihak-pihak yang pernah berselisih.[163]

3. Pentingnya Keadilan dalam Resolusi Konflik

Salah satu aspek yang paling ditekankan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib dalam suratnya adalah pentingnya keadilan dalam setiap tahap resolusi konflik. Ia menyatakan bahwa seorang pemimpin yang tidak adil dalam menyelesaikan perselisihan tidak hanya akan kehilangan kepercayaan rakyatnya, tetapi juga akan mendapatkan murka dari Allah. "*Ingatlah bahwa Allah selalu mengawasi segala perbuatanmu, dan Dia tidak akan membiarkan kezaliman terjadi tanpa pembalasan.* Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam setiap keputusanmu, dan pastikan bahwa engkau selalu berlaku adil.".[164]

‘Alī bin Abī Ṭālib juga memperingatkan tentang bahaya nepotisme dan favoritisme dalam penyelesaian konflik. Ia menulis, "*Janganlah engkau memberikan keistimewaan kepada saudara atau teman-temanmu dalam perkara yang menyangkut keadilan. Jika engkau melakukannya, engkau akan mengkhianati amanah yang diberikan kepadamu dan menciptakan ketidakadilan di antara rakyatmu.*"[165] Ini menunjukkan bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālib sangat menghargai integritas dan keadilan dalam pemerintahan, dan ia menekankan bahwa seorang pemimpin harus menjauhi segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

4. Pemimpin Sebagai Pihak yang Bertanggung Jawab

‘Alī bin Abī Ṭālib juga menekankan bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab penuh atas segala keputusan yang diambil dalam proses resolusi konflik. Ia menulis, "*Jika engkau membuat keputusan yang salah atau tidak adil, engkau harus siap untuk bertanggung jawab atas akibatnya, baik di hadapan rakyatmu maupun di hadapan Allah.*"[166] Ini menunjukkan bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālib mengajarkan konsep akuntabilitas dalam kepemimpinan, di mana pemimpin harus siap untuk menghadapi konsekuensi dari setiap tindakannya. ‘Alī bin Abī Ṭālib juga menekankan pentingnya seorang pemimpin

---

[162] Wikishia, *Teks:Surat Imam Ali kepada Mālik al-Ashtar*; https://id.wikishia.net/view/Teks:Surat_Imam_Ali_kepada_Malik_al-Ashtar, diakses pada 24 Desember 2024 Pukul 15.00 WIB.

[163] Murodi, *Rekonsiliasi Politik Umat Islam Pasca Ali bin Abi Thalib*, Medan: Kencana Prenada Media Group, 2020, h. 160.

[164] Agus Hasan Bashori dan Ulil Amri Syafri, *Studi Kritis Konsep Sanad Kitab Nahj Al-Balaghah Sebagai Upaya Membangun Budaya Tabayyun Dalam Keilmuan Islam* (el Harakah Volme 18 Nomor 2 Tahun 2016), h. 170.

[165] Wikishia, *Teks:Surat Imam Ali kepada Mālik al-Ashtar*; https://id.wikishia.net/view/Teks:Surat_Imam_Ali_kepada_Malik_al-Ashtar, diakses pada 24 Desember 2024 Pukul 15.00 WIB.

[166] Wikishia, *Teks:Surat Imam Ali kepada Mālik al-Ashtar*; https://id.wikishia.net/view/Teks:Surat_Imam_Ali_kepada_Malik_al-Ashtar, diakses pada 24 Desember 2024 Pukul 15.00 WIB.

untuk bersikap rendah hati dan terbuka terhadap kritik. *"Janganlah engkau merasa bahwa dirimu selalu benar, dan janganlah engkau menutup telinga terhadap nasihat atau kritik, karena sering kali kebenaran datang dari mereka yang lebih rendah darimu."* Ini menunjukkan bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālib mengajarkan pentingnya sikap terbuka dan inklusif dalam kepemimpinan, di mana pemimpin harus siap menerima masukan dari berbagai pihak.[167]

5. Implikasi Modern dari Ajaran ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang Konflik dan Resolusi

Pemikiran ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang konflik dan resolusi memiliki relevansi yang kuat dalam konteks modern. Prinsip-prinsip keadilan, kebijaksanaan, inklusivitas, dan akuntabilitas yang diajarkannya adalah fondasi utama dalam banyak teori resolusi konflik kontemporer. Misalnya, dalam pendekatan modern terhadap resolusi konflik, pentingnya mendengarkan semua pihak, menghindari bias, dan menekankan dialog dan negosiasi sebagai cara utama untuk menyelesaikan perselisihan, semuanya sejalan dengan ajaran Ali. Dalam konteks pemerintahan modern, ajaran ‘Alī bin Abī Ṭālib juga relevan dalam hal akuntabilitas dan transparansi. ‘Alī bin Abī Ṭālib mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus selalu bersikap adil dan bertanggung jawab atas tindakannya, sebuah prinsip yang menjadi dasar dalam banyak sistem demokrasi dan pemerintahan yang baik di seluruh dunia.[168]

---

[167] Agus Hasan Bashori dan Ulil Amri Syafri, *Studi Kritis Konsep Sanad Kitab Nahj Al-Balaghah Sebagai Upaya Membangun Budaya Tabayyun Dalam Keilmuan Islam* (el Harakah Volme 18 Nomor 2 Tahun 2016), h. 177.

[168] Marshall GS. Hudgson,. *The Venture of Islam, Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia, buku pertama* (terj. Mulyadhi Kartanegara) (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 330.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian analisis pada bab-ba sebelumnya penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kandungan surat ‘Alī bin Abī Ṭālib kepada Mālik al-Ashtar merupakan pedoman kepemimpinan yang mencerminkan prinsip-prinsip utama pemerintahan Islam, yaitu Kebajikan, kebersihan dan keadilan. Dalam surat ini, ‘Alī bin Abī Ṭālib menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan integritas, kejujuran, dan kepedulian terhadap rakyat. Ia mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus menghindari kesombongan, korupsi, serta mengutamakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial. Prinsip-prinsip ini menjadikan surat ‘Alī bin Abī Ṭālib sebagai salah satu dokumen politik Islam yang tetap relevan hingga masa kini dalam memahami etika kepemimpinan dan pemerintahan yang berlandaskan keadilan serta kebajikan.
2. Pandangan politik ‘Alī bin Abī Ṭālib mengenai kebebasan, kekuasaan, dan keadilan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai surat politiknya, terutama yang ditujukan kepada Mālik al-Ashtar.
    a. Terkait kekuasaan, ‘Alī bin Abī Ṭālib menegaskan bahwa kekuasaan bukan sebagai tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi sebagai amanah yang harus dijalankan dengan adil dan bijaksana. Beberapa poin penting dalam pandangannya tentang kekuasaan:
        1) ‘Alī bin Abī Ṭālib menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama pemerintahan.
        2) Kekuasaan adalah tanggung jawab, bukan hak istimewa. Pemimpin bukanlah penguasa yang *absolut*, melainkan pelayan rakyat yang harus bertindak dengan transparan dan adil.
        3) Pemimpin harus memiliki integritas dan ketakwaan, untuk itu seorang pemimpin yang tidak memiliki moralitas dan ketakwaan akan cenderung menyalahgunakan kekuasaan.
        4) Pemimpin selalu mendengarkan pendapat rakyat dan tidak mengambil keputusan secara otoriter.
        5) Pemimpin harus menjauhi sikap nepotisme dan korupsi, dan menindak tegas para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, tanpa memandang kedekatan pribadi atau keluarga.
    b. Terkait kebebasan, ‘Alī bin Abī Ṭālib menganggap kebebasan sebagai hak asasi yang melekat pada setiap individu. Namun, kebebasan yang dimaksud bukanlah

kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang harus berjalan seiring dengan moralitas dan tanggung jawab sosial. Beberapa poin penting pandangannya tentang kebebasan yaitu bahwa:

1) Seorang pemimpin harus menghormati hak rakyatnya untuk berbicara dan menjalankan keyakinannya, baik Muslim maupun non-Muslim.
2) Kebebasan yang tidak diiringi dengan keadilan dapat merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, menurutnya kebebasan harus berlandaskan prinsip-prinsip moral dan tidak merugikan hak orang lain.
3) Menentang segala bentuk tirani dan penindasan, baik oleh pemimpin terhadap rakyat maupun oleh kelompok kuat terhadap yang lemah.

c. Terkait keadilan dalam pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib adalah landasan utama dalam pemerintahan. Menurutnya, keadilan harus ditegakkan tanpa diskriminasi dan tanpa memihak kelompok tertentu. Beberapa aspek penting dalam pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib tentang keadilan:

1) Sumber daya negara harus digunakan untuk kepentingan umum dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
2) Menegakkan hukum secara menyeluruh tanpa didasaroi oleh status sosial, suku, atau agama. Menurutnya, pemimpin harus memperlakukan rakyat secara adil tanpa membedakan antara yang kuat dan yang lemah.
3) ‘Alī bin Abī Ṭālib percaya bahwa pemerintahan yang adil akan mendapatkan legitimasi dan kepercayaan rakyat. Tanpa keadilan, pemerintahan akan menghadapi perlawanan dan ketidakstabilan sosial.
4) Bagi ‘Alī bin Abī Ṭālib pemerintah yang adil akan memberikan perlindungan bagi rakyatnya. Baginya memberikan perhatian besar pada perlindungan rakyat dari penindasan, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari individu atau kelompok yang berpengaruh.

3. Pandangan politik ‘Alī bin Abī Ṭālib terkait kekuasaan, kebebasan, dan keadilan memiliki keterkaitan yang kuat dengan filsafat politik modern, baik dalam konsep etika kepemimpinan maupun dalam implementasi kebijakan pemerintahan. Dalam suratnya kepada Mālik al-Ashtar, Ali menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah alat untuk dominasi, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan keadilan. Prinsip ini selaras dengan gagasan teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, di mana legitimasi kekuasaan berasal dari kesepakatan rakyat dan harus digunakan untuk kesejahteraan mereka. ‘Alī bin Abī Ṭālib juga menekankan pentingnya kebebasan yang diimbangi dengan tanggung jawab sosial, sejalan dengan konsep kebebasan positif dan negatif yang dijelaskan oleh Isaiah Berlin. Kebebasan bukan sekadar kebebasan dari penindasan, tetapi juga kebebasan untuk mencapai kesejahteraan dan berpartisipasi

dalam pemerintahan yang adil. Dalam aspek keadilan, ‘Alī bin Abī Ṭālib menekankan prinsip keadilan distributif, yaitu memastikan kesejahteraan rakyat dan menolak segala bentuk ketidakadilan serta diskriminasi. Konsep ini sangat relevan dengan pemikiran John Rawls dalam *A Theory of Justice*, yang menekankan bahwa keadilan harus memastikan keuntungan bagi kelompok yang paling lemah dalam masyarakat. Selain itu, surat Ali juga mencerminkan gagasan etika politik Immanuel Kant, di mana kepemimpinan harus dijalankan dengan prinsip moral yang universal dan tidak hanya berdasarkan kepentingan pragmatis semata.

B. Saran

Berdasarkan analisis terhadap pandangan ‘Alī bin Abī Ṭālib mengenai kebebasan, kekuasaan, dan keadilan serta relevansinya dalam filsafat politik modern, penulis memiliki beberapa saran yang dapat diambil untuk implementasi dalam sistem pemerintahan kontemporer. Pertama, pemimpin dan pejabat negara hendaknya meneladani prinsip kepemimpinan ‘Alī bin Abī Ṭālib yang menekankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan kekuasaan, guna menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pribadi atau golongan. Kedua, prinsip kebebasan yang ia usung dapat dijadikan pedoman dalam merancang kebijakan publik yang tetap menghormati hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, serta kebebasan beragama, namun tetap dalam batasan moralitas dan keadilan sosial agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat. Ketiga, konsep keadilan ‘Alī bin Abī Ṭālib dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi dan sosial dengan memastikan distribusi kekayaan yang merata, perlindungan bagi kelompok rentan, serta penegakan hukum yang tidak memihak. Oleh karena itu, nilai-nilai politik yang diwariskan oleh ‘Alī bin Abī Ṭālib dapat menjadi inspirasi bagi pemimpin dan pembuat kebijakan di era modern untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulhasan, Ali Tareq, *Imam Ali (a.s) & Transcendental Phenomenology: Letter to Mālik al-Ashtar as lifeworld system thinking Paradigm*, Researchgate : January, 2017.

Abu Ja"far, Muhammad, *Tarikh Ath-Thabari. Terj. Abu Ziad Muhammad Dhiaul-Haq dan Abdul Syukur Abdul Razak*. Jakarta : Pustaka Azam, 2011 M.

Ahlul Bait Indonesia, *HAM dalam Pemerintahan Islam Imam Ali as*, https://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/s13-berita/ham-dan-pemerintahan-ala-imam-ali-as/, diakses pada 9 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

Ana Suheri, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional,* Jurnal Morality, Volume 4 Nomor 1, Juni 2018 M.

Anis, Muhammad, *Perkembangan Politik Masa Al-Khulafa Al-Rasyidun*. Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan, 8(1), 2016 M.

al-Ghurabi, Ali Mushtafa, *Tarikh Al-Farq Al-Islamiyah wa Nasatun Ilmu Al-Kalam inda AlMuslimin*, Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shabih Wa Auladuh 1993.

al-Maududi, Sayyid Abu al-A'la *The Islamic Law and Constitution* (Lahore: Islamic Publications, 1997 M.

al-Salus, Ali, *Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan Syar'i* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997 M.

Aldzakhiroh, Nilna, dkk, *Political Dynamics of the Era of Ali Bin Abi Thalib (Contribution of the Political System in Islamic Civilization)*, Aldzakhiroh, Vol 7, No 2, 2024 M.

al-Ju'fi, Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari,* Juz IX, Cet. I; Dar al-Ṭauq al-Najah, 1422 H

al-Akkad, Abbas Mahmoud, *Ketakwaan Khlaifah Ali bin Abi Thalib* (terj. Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

as-Suyuthi, Jalaluddin, *Tarikh al-Khulafa'*, Mekah Mukarroinah: Makiabah Nizar Mushthafa al-Baz, 2000 lihat juga Ahmad Syalabi, Sefarah Kebudayaan Islam, Jilid I (terj: Mukhtarv Yahya), Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992 M.

Abu Zahwi, Muhammad, *al-Hadis wa al-Muhaddisin*, Dar al-Fikr: Mesir, 1988 M.

Abdurrahman, *Dudung. Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu,1999.

Al-Islam, *Imam Ali's Letter to Mālik al-Ashtar: The Richest Treasure*, The Research Treasure, https://www.al-islam.org/richest-treasure-imam-ali/imam-alis-letter-malik-al-ashtar-richest-treasure diakses pada tanggal 17 Agustus 2024

Brata, Yat Rospia, *Perang Shifin*, Jurnal Artefak, Volume 12, Nomor 6, 2020 M.

Berlin, Isaiah, *Two Concepts of Liberty*, (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2004), https://plato.stanford.edu/entries/berlin/, diakses pada 23 Juni 2024 pukul 18.00 WIB.

Balagha.Net, Teks: Nahjul Balaghah https://balagha.net/taqwa-provision-of-believers/ali-ibn-abi-talib-taqwa, diakses pada 24 November 2024 Pukul 16:00 WIB

Bashori, Agus Hasan dan Ulil Amri Syafri, *Studi Kritis Konsep Sanad Kitab Nahj Al-Balaghah Sebagai Upaya Membangun Budaya Tabayyun Dalam Keilmuan Islam* (el Harakah Volme 18 Nomor 2, 2016 M.

Dahl, Robert, *Who Govern? Democracy and Power in an America City*, New Haven and London, Yale University Press, 1961 M.

Enslikopedia Gramedia, *Jean-Jacques Rousseau (1712—1778)*, internet encyclopedia of philosophy, https://iep.utm.edu/rousseau/, diakses pada 23 Juni 2024 Pukul 19.30 WIB.

Fatah, Saifullah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994 M.

Fera, R. D., *Ketentuan Fiqh Siyāsah Terhadap Perbuatan Tercela Sebagai Syarat Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daera*h. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020 M.

Hasjmy, Ahmad, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Hamzah, Saidin dan Hamriana, *Khulafah Al- Rasyidun: Masa Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib*, CARITA : Jurnal Sejarah dan Budaya, Volume 3 Nomor 1, Mei 2022.

Hudgson, Marshall GS, *The Venture of Islam, Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia, buku pertama* (terj. Mulyadhi Kartanegara), Jakarta: Paramadina, 1999M.

House, Rosevelt, *My Most Important Task" Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights*, https://www.roosevelthouse.hunter.cuny.edu/exhibits/my-most-important-task/, diakses pada 27 Januari 2025 Pukul 12.00 WIB.

Immanuel, Kant, *Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace, and History*, New Haven: Yale University Press, 2006 M.

Iqbal. Muhammad, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007 M.

Johnson, C. E. *Meeting the ethical challenges of leadership: Casting light or shadow*. Los Angeles: SAGE Publications, 2009 M.

Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995 M.

Jimly al-Siddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995 M.

Jousouf Sou'yb, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979 M.

Kamil, Sukron, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013 M.

Kementrian Agama Indonesia, *Sejarah Kebudayaan Islam/Kementerian Agama*, Jakarta : Kementerian Agama 2014 M.

Kurniawan, Alif, dkk, *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam: Dari Masa Klasik, Tengah, Hingga Modern*, (Malang: Qoulun Pustaka, 2014 M.

Khatibah, K., *Penelitian kepustakaan. Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 5(01), 2011.

Lathief, Abdul, Abdussyafi"i Muhammad, *Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah*. Penerjemah: Abu Ziad Dhiaul-Haq dan Abdul Syukur Abdul Razak, Jakarta: Pustaka Azam, 2011.

Lewis, Bernard, *Bangsa Arab dalam Lintasan Sejarah; dari segi Geografi, Sosial, Budaya dan Persatuan Islam* (terj. Said Jamburi), Jacarta: Pedoman IImu Jaya, 1988 M

Laski, Harold J, *The State In Theory and Practice,* (The Viking Press: New York), 1974 M.

Labolo, Muhadam, *Etika Pemerintahan*, Purbalingga: CV. Eurika Media Aksara, 2023 M.

Miftahul Huda, Nurwadjah Ahmad, dan Andewi Suhartini, *Konsep Maqashid Syari'ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam*, Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 19. No. 1. ,Januari – Juni 2022 M.

Muzaffari, Mehdi, *Kekuasaan dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994 M.

Muzairi et al., *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Grafindo Persada, 2001 M.

Masduki, *Khalifah Ali Bin Abi Tahlib; Awal Tragedi Perang Saudara dalam Sejarah Islam*, Jurnal Al-Fath, Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember, 2008 M.

Mawdūdi, Abū al- A'lā, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Mizan, 1998 M.

Muhammad, Abu Ja"far. *Tarikh Ath-Thabari Jilid 3. Penerjemah. Abu Ziad Muhammad Dhiaul-Haq dan Abdul Syukur Abdul Razak*. Jakarta : Pustaka Azam, 2011 M.

Mahmoud, Sadri, Sac*ral Defense of Secularism: The Political Theologies of Soroush, Shabestari, and Kadivar.* (International Journal of Politics, Culture and Society), Volume 15 Nomor 2, 2021 M.

Nasution, Harun, *Teologi Islam; aliran, sejarah, analisa perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1986 M.

NU.Online, *Kebijakan Politik Nabi Muhammad SAW*, https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/kebijakan-politik-nabi-muhammad-saw-ZPtFu, dia,sesuai pada 8 Desember 2024 pukul 12.00 WIB.

Purnomo. Sjechul Hadi, *Islam dalam Lintas Sejarah Perpolitikan. (teori dan praktik).* (CV. Aulia. Surabaya). 2004 M.

Qutaibah, Ibnu. *Politik dan Kekuasaan Dalam Sejarah Para Khalifah*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,2016 M.

Ristiana, Ita, *Dakwah Khalifah Ali Dalam Konteks Politik (36-41 H)*, Jurnal Dakwah, Volume 9 Nomor 2, Juli-Desember 2008 M.

Rawls, John, *A theory of justice teori keadilan: dasar-dasar filsafat poliik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011 M.

Royani, Yayan Muhammad, *Ujaran Kebencian Masa Kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib Dan Relevansinya Dengan Regulasi Di Indonesia: Sebuah Kajian Sejarah Hukum Islam*, (Disertasi: Pascasarjana Uin Walisongo Semarang), 2021 M.

Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy, Rifka Safira, Rahmiati, *Kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib Dan Penerapan Tahkim Dalam Penyelesaian Konflik: Analisis Kasus Pertempuran Siffin Dengan Pendekatan Hukum Empiris Dan Perspektif Islam*, Marwah Hukum, Vol. 2 No. 2, Juli 2024 M.

Salim, Delmus Puneri, *Politik Islam Dalam Al-Qur'an (Tafsir Siyasah Surat Ali Imran Ayat 159),* Aqlam: IAIN Manado, Vol 1, No 1, 2018 M.

Syifa, Salsabila Nurul, dkk, *Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles serta Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang – Undang Dasar Tahun 1945*, Jurnal Filsafat Terapan, Volume 1 Nomor 1, 2023 M.

Saefudin, Machfud, dkk, *Dinamika Perdaban Islam Prespektif Historis*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2013 M.

Shidiq, Tegar., dan Dian Prayoga, *Masa Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib Dari Tahun 655-660M*, (Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan, Volume 4 nomor 2, 2023M.

Szelenyi, Iván, *Weber's theory of domination and post-communist capitalisms*, Springlink: Volume 45 nomor 3, 2016 M.

Spring, *Hobbes, Locke, Montesquieu, and Rousseau on Government*, (Bill of Rights in Action: Developments in democracy, 2004), https://teachdemocracy.org/online-lessons/bill-of-rights-in-action/bria-20-2-c. diakses pada 23 Juni 2024 Pukul 19.30 WIB.

Sari, Milya, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6 (1), 2020 M.

Syarif, Mujar ibn, dkk., *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008 M.

Taimiyah, Ibn, *al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (RiyaD: al-Maktabah al-Salafiyah wa Maktabatuha, 1387 H.

----------, *Tugas Negara menurut Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 M.

Yagi, Kiichiro, *Teori Kapital Marx dalam Sejarah Ekonomi: Konsep Kapital Marx, Mazhab Klasik, Mazhab Austria, dan Teori Pertumbuhan*, Evolut Inst Econ: Volume 18 Nomor 2, 2022.

Yusuf, M. Aris , *Teori Kekuasaan: Pengertian, Legitimasi, dan Sumber Kekuasaan*, Politik Ekonomi, https://www.gramedia.com/literasi/teori-kekuasaan/, diakses pada 23 Juni 2024 Pukul 19.00 WIB.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008 M.

WikiShia, Teks:Surat Imam Ali kepada Mālik al-Ashtar, https://id.wikishia.net/view/Teks:Surat_Imam_Ali_kepada_Malik_al-Asytar, diakses pada 31 Oktober 2024 Pukul 18:04 WIB.

Zainudin, Muhadi, dan Abd Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam*, Bandung:Putra Mediatama Press, 2008 M.
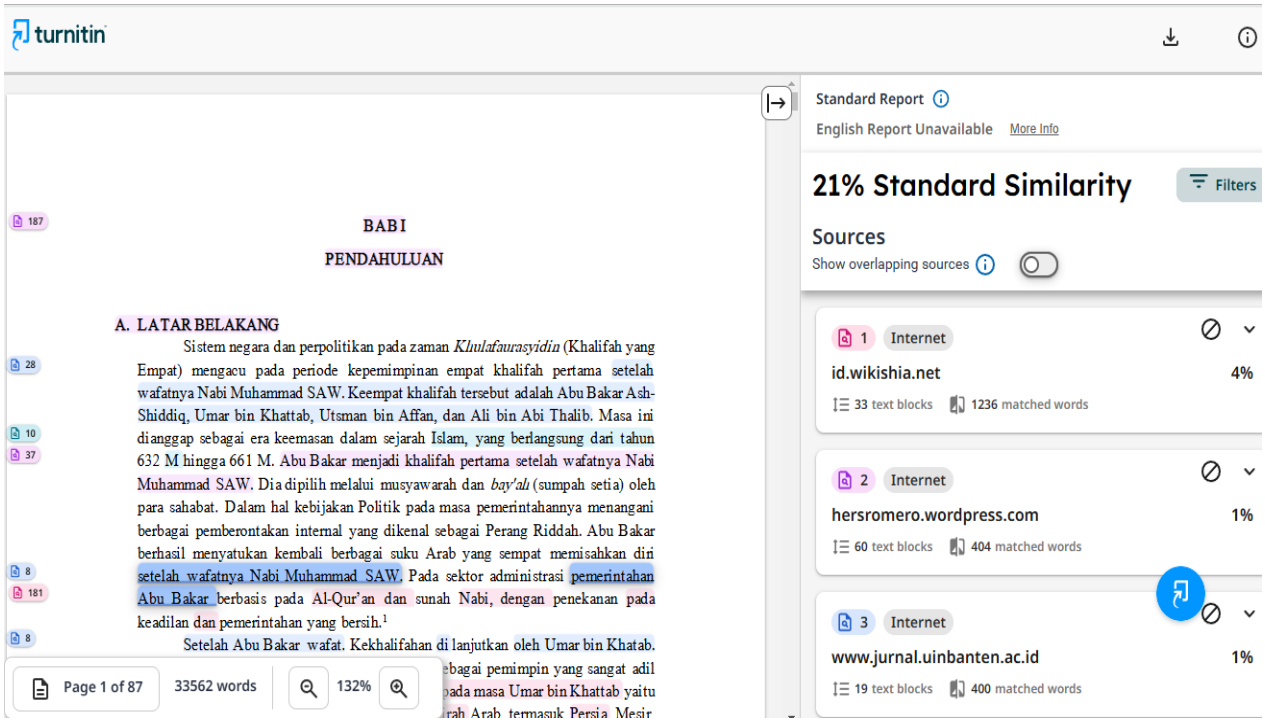
LAMPIRAN BUKTI CEK PLAGIASI